



LAPORAN AKHIR
ANALISIS
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2011-2015

KERJA SAMA
BADAN PUSAT STATISTIK DIY
DAN BALAI STATISTIK DAERAH BAPPEDA DIY
TAHUN 2016

LAPORAN AKHIR

ANALISIS PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2011-2015

BADAN PUSAT STATISTIK DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Pelaksanaan	3
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Sasaran	5
E. Manfaat.....	5
F. Lokasi Kegiatan.....	5
G. Sumber Pendanaan	5
H. Alokasi Pengerahan Tenaga Ahli dan Pendukung	5
I. Rencana Kerja	6
J. Lingkup Pekerjaan	6
II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pembangunan	8
1. Konsepsi Pembangunan	8
2. Pembangunan Wilayah	8
B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	10
1. Definisi PDRB	10
2. Pendekatan Penghitungan	10
3. Metode Penghitungan	11
4. Turunan PDRB	13
5. PDRB menurut Lapangan Usaha.....	13
6. PDRB menurut Pengeluaran.....	14
7. PDRB Tahun Dasar 2010 Berbasis SNA 2008	16
C. Kualitas Pertumbuhan	17
1. Pertumbuhan Ekonomi	17
2. Kesenjangan (Disparitas) Antarwilayah.....	18

3. Kesenjangan (Disparitas) Pendapatan dan Kemiskinan	20
4. Ketimpangan Antarwilayah dengan Indeks Williamson.....	21
D. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	23
1. Kependudukan	23
2. Ketenagakerjaan	24
III METODOLOGI.....	27
A. Sumber Data	28
B. Kerangka Pikir Analisis	28
C. Implementasi SNA dalam Penyempurnaan Penghitungan PDRB dan Perubahan Tahun Dasar 2010	29
1. Penggantian Tahun Dasar 2000 menjadi Tahun 2010.....	30
2. <i>System of National Accounts</i> (SNA) 2008	30
3. Implementasi SNA 2008 dalam Penyusunan PDB/PDRB Tahun Dasar 2010	31
D. Indikator Penyajian PDRB	35
1. Distribusi Persentase	36
2. PDRB per Kapita	36
3. Indikator Perkembangan	36
4. Indeks Berantai	36
5. Indeks Harga Implisit	36
6. Indeks Berantai dari Indeks Harga Implisit (Laju Inflasi)	37
E. Indikator Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	37
1. Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	37
2. Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan	40
3. Indikator Kemiskinan	45
4. Indikator Ketimpangan (Disparitas)	48
IV. PDRB Menurut Lapangan Usaha	55
A. Hasil Perhitungan PDRB Tahun Dasar 2010	56
B. Struktur Perekonomian PDRB seri 2010	59
C. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan	62
1. Pertumbuhan menurut Kategori	63
2. Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota	65
D. PDRB Per Kapita	66

E. Inflasi IHK dan Inflasi PDRB	67
F. Indeks Perkembangan Kategori	69
G. Perbandingan Nilai PDRB Antarkabupaten/kota.....	70
H. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi	75
V. PDRB Menurut Pengeluaran	79
A. Struktur PDRB Pengeluaran	81
1. Konsumsi Rumah Tangga	81
2. Konsumsi Pemerintah	83
3. Investasi	84
4. Ekspor dan Impor	85
B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran	86
VI. Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	89
A. Tren Pertumbuhan	91
1. Tren Pertumbuhan Kategori	91
2. Tren Pertumbuhan Konsumsi	92
B. Tren Pertumbuhan Kabupaten/Kota	93
C. Penduduk dan Ketenagakerjaan	95
1. Angka Beban Tanggungan (<i>Dependency Ratio/DR</i>)	95
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	96
3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	98
4. Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)	100
5. Produktivitas Tenaga Kerja	101
D. Kemiskinan dan Ketimpangan	105
1. Kemiskinan	106
2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan	108
E. Disparitas antar Kabupaten/Kota	110
1. Indeks Ketimpangan Regional	110
2. Disparitas Sektoral (<i>Shift Share Analysis</i>)	111
F. Capaian Kualitas Pertumbuhan Ekonomi	117
VII. Kesimpulan dan Rekomendasi	121
A. Kesimpulan	122
B. Rekomendasi	127

Daftar Pustaka	129
Lampiran	131

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Contoh Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA 1968 dan SNA 2008	32
Tabel 3.2. Perbandingan Klasifikasi PDB/PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 dan 2010	34
Tabel 3.3. Perbandingan Klasifikasi PDB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010.....	35
Tabel 4.1. Perbandingan angka PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Kategori Tahun Dasar 2000 dan 2010	57
Tabel 4.2. Perbandingan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	58
Tabel 4.3. Distribusi Persentase PDRB D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2015	60
Tabel 4.4. Pertumbuhan Ekonomi menurut Kategori di DI Yogyakarta 2011–2015, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2011-2015, dan Andil Pertumbuhan Tahun 2015 (persen)	63
Tabel 4.5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di DI Y 2011–2015, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2011-2015 dan Andil Pertumbuhan 2015 (persen)	66
Tabel 4.6. Perkembangan PDRB Per Kapita D.I. Yogyakarta, 2011 – 2015	67
Tabel 4.7. Indeks Perkembangan PDRB D.I.Yogyakarta menurut Kategori, 2011-2015 (2010=100)	70
Tabel 4.8. Nilai PDRB Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2011 – 2015 (juta rupiah).....	71
Tabel 4.9. Nilai PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2015**) (juta rupiah)	73
Tabel 4.10. Kontribusi Sektor-sektor Dominan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2011, 2013, 2015 (persen)	74
Tabel 4.11. Nilai PDRB Per Kapita menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2011 - 2015 (rupiah)	75
Tabel 4.12. Ringkasan PDRB Provinsi–Provinsi di Indonesia, 2015.....	76
Tabel 5.1. Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan di DI	

	Yogyakarta, 2011–2015 (juta rupiah).....	82
Tabel 5.2.	Struktur PDRB menurut Penggunaan di DIY, 2011 – 2015 (persen)	83
Tabel 5.3.	Nilai dan Andil Investasi Fisik terhadap PDRB dan ICOR di DIY, 2011–2015.....	85
Tabel 5.4.	Pertumbuhan PDRB menurut Penggunaan di DIY, 2011–2015 (persen) ..	87
Tabel 6.1.	TPT menurut Pendidikan, Daerah, dan Jenis Kelamin, 2015	100
Tabel 6.2.	Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Elastisitas Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Sektor di DIY, 2011-2015 (persen) ,	101
Tabel 6.3.	Produktivitas Tenaga Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Produksi dan Tenaga Kerja per Tahun, dan Rata-rata Pertumbuhan PTK Sektoral di DIY, 2011–2015	102
Tabel 6.4.	Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2011 – 2015	110
Tabel 6.5.	Pangsa Regional (PR) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2011–2015	112
Tabel 6.6.	Proportional Shift (PS) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2011–2015	114
Tabel 6.7.	Different Shift (DS) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2011–2015	115
Tabel 6.8.	Rekapitulasi Perubahan PDRB dan Nilai Pergeseran Netto di DIY, 2011-2015	116
Tabel 6.9.	Kategori Pertumbuhan Kabupaten/ Kota di DIY, 2011-2015	117

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Kerangka Pikir Analisis	28
Gambar 3.2. Diagram Perbandingan Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita	37
Gambar 3.3. Bagan Konsep Penduduk dan Tenaga Kerja	40
Gambar 3.4. Plot Pengeluaran Per kapita dan Garis Kemiskinan	46
Gambar 3.5. Kurva Lorenz.....	49
Gambar 4.1. Perbandingan Pertumbuhan PDRB DI Yogyakarta Tahun Dasar 2000 dan 2010.....	58
Gambar 4.2. Produk Domestik Regional Bruto D.I Yogyakarta, 2011-2015 (triliun rupiah)	59
Gambar 4.3. Distribusi Persentase PDRB D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor, 2013- 2015 (persen)	61
Gambar 4.4. Pertumbuhan dan Pangsa Distribusi Beberapa Lapangan Usaha 2015	64
Gambar 4.5. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha, 2013-2015.....	64
Gambar 4.6. Inflasi IHK dan Inflasi PDRB D.I.Yogyakarta, 2011-2015 (persen)	68
Gambar 4.7. Nilai PDRB menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2011 - 2015 (triliun rupiah)	72
Gambar 5.1. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DIY, 2011-2015	82
Gambar 6.1. Pertumbuhan Beberapa Kategori, 2011-2015 (persen)	92
Gambar 6.2. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran, 2011-2015 (persen)	93
Gambar 6.3. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2011	94
Gambar 6.4. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2015	94
Gambar 6.5. Angka Beban Tanggungan Penduduk DIY, 2010-2015	95
Gambar 6.6. Perkembangan TPAK Penduduk DIY menurut Daerah, 2011-2015	97
Gambar 6.7. TKK dan TPT Penduduk DIY, 2011-2015 (persen)	98
Gambar 6.8. Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2011	103

Gambar 6.9.	Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2015	103
Gambar 6.10.	Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional, 2011 – 2015	106
Gambar 6.11.	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di DIY, 2011 – 2015	108
Gambar 6.12.	Kurva Lorenz DIY Hasil Susenas September 2015	109
Gambar 6.13.	Rasio Gini dan KBD (Persentase Pendapatan yang diterima oleh 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY, 2011–2015 (persen)	109
Gambar 6.14.	Indeks Williamson DIY, 2011-2015	111
Gambar 6.15.	Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Kemiskinan dan Gini Rasio, 2011-2015	118
Gambar 6.16.	Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Target Pertumbuhan dalam RPJMD DIY 2012-2017, Tahun 2011-2015 (persen)	119

BAB 1

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sasaran
- E. Manfaat
- F. Lokasi Kegiatan
- G. Sumber Pendanaan
- H. Alokasi Pengerahan Tenaga Ahli dan Pendukung
- I. Rencana Kerja
- J. Lingkup Pekerjaan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2015 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017. Visi Pembangunan DIY 2012-2017 adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkanlah Misi Pembangunan, diantaranya melalui misi yang kedua yaitu: “Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif”. Salah satu tujuan dari misi kedua tersebut adalah memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif, dan kreatif. Misi pembangunan ini akan diwujudkan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan, yaitu: meningkatkan pendapatan per kapita per tahun dari 6,8 juta rupiah menjadi 8,5 juta rupiah, meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Antarwilayah (Indeks Williamsons) dari 0,4574 menjadi 0,4481, mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) dari 0,3022 menjadi 0,2878.

Secara lebih rinci penjabaran dari visi tersebut adalah mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dengan menjadikan masyarakat lebih makmur secara ekonomi. Arah kebijakan pembangunan yang akan diwujudkan pada tahun 2025 yang menjadikan DIY sebagai pusat pendidikan, pusat budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia memerlukan dukungan dari pembangunan dari berbagai sektor-sektor ekonomi lain, seperti: industri, perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya serta ditopang oleh pembangunan sarana prasarana yang mengedepankan semangat kerakyatan.

Sebagai pusat pendidikan, indikasi maju dari sisi diantaranya bisa dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi pendidikan penduduknya. Menurut kacamata kesehatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dikatakan maju jika derajat kesehatan masyarakatnya tinggi, laju pertumbuhan penduduknya kecil, angka harapan hidupnya tinggi, dan mempunyai kualitas pelayanan sosial yang baik. Di sisi kelayakan kehidupan bermasyarakat, Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju ditandai dengan masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan ketenteramannya, dan juga masyarakat yang peran sertanya dalam pembangunan di segala bidang nyata dan efektif. Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju juga ditunjukkan oleh tersedianya infrastruktur yang baik, lengkap dan memadai sehingga membuka dan mempermudah akses ekonomi ke segala penjuru wilayah.

Sebagai pusat budaya, pemahaman yang benar mengenai budaya sebagai tata nilai, simbol-simbol dan produk dari peri kehidupan manusia di DIY mendasar untuk

dikembangkan dengan baik tanpa melepaskan diri dari akarnya. Kraton Ngayogyakarta dan Puro Pakualaman sebagai pusat budaya Jawa tetap eksis dan menjadi sumber dari perkembangan budaya masyarakat. Walaupun demikian, dengan karakter manusia DIY yang toleran terhadap adanya perbedaan, budaya dari luar daerah yang mempunyai nilai positif pun juga dapat diterima sehingga sosok budaya DIY memperkaya khasanah budaya nusantara. Sebagai pusat budaya, maka DIY juga berupaya melakukan pelestarian budaya, produk budaya maupun nilai budayanya.

Sebagai salah satu tujuan utama wisata nusantara, DIY terus berupaya mengembangkan sektor kepariwisataan. Berbagai isu strategis yang diangkat, antara lain: memperkaya variasi kunjungan wisata baik yang berbasis wisata budaya maupun wisata alam, menyusun konektivitas antardestinas wisata dan kawasan strategis pariwisata, menyiapkan dan memperbaiki akses, atraksi, dan fasilitas pendukung, dan memperkuat kemitraan dengan komunitas pariwisata.

Perencanaan pembangunan DIY ke depan dituntut lebih berkualitas agar arah pembangunan tepat sasaran. Untuk itu dalam modal perencanaan pembangunan DIY membutuhkan ragam dan validitas data yang baik. Badan Pusat Statistik Provinsi DIY sebagai penyedia data untuk semua mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan data hasil kegiatan pengumpulan data primer maupun kompilasi yang dilakukan di wilayah DIY. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data komprehensif tentang nilai tambah ekonomi, dan dari data tersebut dapat diperoleh indikator-indikator ekonomi yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik indikator turunan langsung maupun melalui analisis silang lebih lanjut.

Berdasarkan penghitungan tahun dasar 2010, kondisi komposisi distribusi persentase struktur ekonomi DIY tidak ada lapangan usaha yang mendominasi. Nilai tambah ekonomi dari lapangan usaha industri pengolahan mempunyai persentase tertinggi, yaitu sebesar 13,1 persen kemudian diikuti oleh pertanian sebesar 10,7 persen, dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar konstruksi sebesar 10,2 persen. Meskipun semakin tergeser perannya, sektor pertanian masih menjadi penyokong yang diandalkan karena menyangkut hajat hidup dan mata pencaharian utama sebagian besar penduduk. Hal ini secara empiris dibuktikan oleh Clark yang melakukan penelitian dengan menggunakan data statistik di beberapa negara yang disimpulkan bahwa makin tinggi pendapatan per kapita suatu negara makin kecil peranan sektor primer dalam menyediakan kesempatan kerja. Sebaliknya, sektor sekunder dan sektor tersier makin penting peranannya dalam menampung tenaga kerja.

Indikator ekonomi makro lain yang diturunkan dari PDRB adalah laju pertumbuhan ekonomi. Dinamika pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir dibayangi oleh kondisi perekonomian nasional yang belum menunjukkan kecenderungan arah yang positif. Pada tahun 2015 capaian pertumbuhan DIY pada titik terendah, yaitu sebesar 4,9 persen,

dibanding empat tahun sebelumnya yang masih di atas 5 persen. Di tengah tertekannya pertumbuhan ekonomi ternyata beberapa kategori lapangan usaha masih mampu tumbuh mengesankan di atas 7 persen, yaitu: jasa keuangan, jasa lainnya, jasa perusahaan, jasa pendidikan, dan dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Fenomena ekonomi yang terjadi di DIY tidak dapat lepas dari situasi sosial dan budaya yang tumbuh dan terjadi. Untuk itu dalam analisis ini ditelaah pula indikator makro ekonomi lain, seperti tingkat pengangguran, inflasi, ketimpangan pendapatan, ketimpangan antardaerah, dan kemiskinan untuk melengkapi kajian dalam analisis PDRB ini.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Kepala BPS Nomor 106 Tahun 2014 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2016;

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPPEDA DIY Nomor: 7/DPA/2016.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB DIY 2011-2015 adalah memperoleh data dan analisis yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan ekonomi di DIY.

2. Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Analisis PDRB DI Yogyakarta 2011-2015 Tahun Anggaran 2016 adalah:

1. Mengetahui struktur dan dinamika ekonomi DIY berdasarkan tahun dasar 2010;
2. Menyediakan angka PDRB DIY dan Kabupaten/Kota 2011-2015 dan turunannya tahun dasar 2010;
3. Menyediakan hasil analisis PDRB DIY dan Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015 menurut kategori dan subkategori lapangan usaha;
4. Menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat dipergunakan untuk peningkatan kualitas perencanaan dan validitas implementasi program pembangunan.

D. Sasaran

Data PDRB DIY Tahun 2011-2015 menurut lapangan usaha dan menurut penggunaan serta data pendukung lain yang terkait.

E. Manfaat

Manfaat hasil Penyusunan Analisis PDRB DIY 2011–2015 adalah pilihan rekomendasi kebijakan hasil analisis dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sasaran pembangunan daerah dan juga kabupaten/kota se-DIY ke depan.

F. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengumpulan data, penghitungan, dan analisis adalah di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Sumber Pendanaan

Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015 seluruhnya dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2016.

H. Alokasi Pengerahan Tenaga Ahli dan Pendukung

Dalam pelaksanaan Analisis PDRB DIY 2011-2015 ini menggunakan tenaga ahli dan pendukung yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah: 7 orang terdiri dari unsur pimpinan di Bappeda dan BSD DIY dan BPS Provinsi DIY;
2. Tim Pelaksana: 64 orang dari BPS Provinsi DIY dan BPS Kabupaten/Kota se-DIY yang berpendidikan S3, S2, S1, dan SLTA.
3. Tim Ahli: 1 orang dari Dosen/Fungsional Tertentu/Eselon II/III.

I. Rencana Kerja

Tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan Analisis PDRB DIY 2011-2015, urutannya sebagai berikut:

1. Pemrosesan berkas-berkas Kontrak Kerja (Surat Perjanjian);
2. Penyusunan Metodologi Analisis;
3. Pengumpulan data sekunder;
4. Kompilasi dan pengolahan data;
5. Penghitungan Indikator;
6. Analisis dan penyajian;
7. Penyerahan Draft Publikasi.

J. Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan Penyusunan Analisis PDRB DIY Tahun Anggaran 2011-2015, meliputi:

1. Menyediakan angka PDRB DIY dan Kabupaten/Kota se DIY 2011-2015 berdasar kategori lapangan usaha SNA 2008 dan juga pengeluaran;
2. Menganalisis laju pertumbuhan ekonomi daerah menurut kategori dan penggunaan tahun 2011-2015;
3. Menganalisis gambaran dan dinamika struktur perekonomian daerah serta besarnya peranan masing-masing sektor dan sub sektor Tahun 2011-2015;
4. Menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi kabupaten/kota di DIY tahun 2011-2015;
5. Menganalisis tingkat inflasi sektoral atas dasar harga produsen tahun 2011-2015 dan membandingkan dengan inflasi dari Indeks Harga Konsumen (IHK) kelompok pengeluaran barang dan jasa;
6. Menganalisis pendapatan perkapita penduduk, disparitas pendapatan dan disparitas regional tahun 2011-2015;
7. Menganalisis tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan penduduk di DIY, kabupaten/kota, perkotaan dan pedesaan tahun 2011-2015 (termasuk pengangguran terdidik).

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pembangunan
- B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- C. Kualitas Pertumbuhan
- D. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan

1. Konsepsi Pembangunan

Konsep pembangunan di tahun 1970-an yang cukup populer adalah yang didefinisikan oleh Portes (1970), yang mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Situasi lingkungan juga mempengaruhi konsepsi pembangunan yang muncul. Di era tahun 1990-an, Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Konsepsi mengenai pembangunan juga dikemukakan Alexander (1994), yaitu proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Berdasarkan beberapa konsepsi di atas, maka makna terpenting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

2. Pembangunan Kewilayahan

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu negara maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga mempunyai kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Pembahasan pembangunan ekonomi secara nasional dititikberatkan pada analisis ekonomi makro, sementara pembahasan pembangunan

ekonomi di tingkat wilayah membahas kegiatan perekonomian ditinjau dari sudut penyebaran kegiatan ke berbagai lokasi dalam suatu ruang ekonomi (*economic space*) tertentu (Sukirno, 1976).

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengelola semua sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan atau kesempatan kerja baru serta untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah pembangunan yang bersangkutan (Blakely, 1989 dalam Mudrajat Kuncoro, 2004, 110). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang No 22 Tahun 1999 / Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 / Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Substansi lain dari kedua UU tersebut yaitu adanya bagian pemberian kewenangan urusan, sumber daya manusia, dan pembiayaan. Terkait dengan urusan pembiayaan, makna terpenting adalah daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber daya potensi ekonomi serta sumber daya alamnya tanpa adanya intervensi terlalu jauh dari pemerintah pusat. Hal ini akan berdampak terhadap percepatan pembangunan daerah sehingga kemajuan daerah lebih cepat tercapai.

Pembangunan suatu daerah juga mengalami tahapan-tahapan perkembangan. Hoover dan Fisher (Nurcahyani, 2001) menyebutkan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi regional, meliputi: pertama, ekonomi subsisten. Dalam tahapan ini masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhan sendiri pada tingkat cukup untuk hidup sehari-sehari. Kehidupan penduduk sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian dan pengumpulan hasil-hasil alamnya.

Kedua, pengembangan transportasi dan spesialisasi lokal. Pada tahap kedua ini telah terdapat peningkatan baik dalam prasarana maupun sarana transportasi yang mengakibatkan terjadinya beberapa spesialisasi pada lokasilokasi tertentu. Di kalangan masyarakat petani timbul spesialisasi baru di luar pertanian dimana hasil produksi, bahan dasar dan pemasarannya masih terbatas dan tergantung pada daerah pertanian bersangkutan.

Ketiga, perdagangan antardaerah. Hal ini terjadi karena telah terdapat perbaikan dalam bidang transportasi dan terjadi perubahan-perubahan di sektor kegiatan dari arah produksi jenis ekstensifikasi menjadi pertanian yang lebih dititikberatkan ke intensifikasi. Hasil sampingannya juga dapat dipakai sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk kegiatan industri pedesaan.

Keempat, industrialisasi. Dengan makin bertambahnya penduduk dan menurunnya potensi dari peningkatan produksi pertanian dan produksi ekstraktif lainnya, daerah dipaksa untuk mengembangkan sumber pendapatan dan lapangan kerja yaitu melalui industrialisasi yang lebih menitikberatkan pada kegiatan kegiatan-kegiatan yang menyangkut industri-industri manufaktur serta pertambangan dan galian.

Kelima, spesialisasi daerah. Dalam tahap ini daerah telah sampai pada tingkat spesialisasi kegiatan, baik barang dan jasa-jasa untuk keperluan penjualan ke daerah lain yang termasuk tenaga ahli dan jasa-jasa khusus lainnya.

Keenam, aliran faktor produksi antardaerah. Peningkatan infrastruktur dan arus informasi pada akhirnya meningkatkan tingkat mobilisasi faktor produksi antardaerah.

Di awal era otonomi daerah, permasalahan pokok pembangunan daerah terletak pada penetapan prioritas kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Bila dalam penetapan prioritas kebijakan pembangunan kurang akurat maka permasalahan ini berlarut-larut dan menyebabkan kemajuan perekonomian daerah berjalan di tempat. Energi sumber daya dan pembiayaan pembangunan yang seharusnya sudah dimanfaatkan untuk implementasi lanjut bagi pengembangan potensi daerah masih berkutat untuk menentukan skala prioritas kebijakan.

Konsepsi pembangunan ekonomi daerah menurut Blakely tersebut di atas pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Pada umumnya, pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, antara lain diukur besaran nilai tambahnya yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Boediono (1999, 1), faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang atau kesempatan kerja di daerah.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Definisi PDRB

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/ wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

2. Pendekatan Penghitungan

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu

periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha/ sektor, yaitu: 1. *Pertanian*; 2. *Pertambangan dan Penggalian*; 3. *Industri Pengolahan*; 4. *Listrik, Gas, dan Air Bersih*; 5. *Konstruksi*; 6. *Perdagangan, Hotel, dan Restoran*; 7. *Pengangkutan dan Komunikasi*; 8. *Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan*; 9. *Jasa-jasa*.

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/ wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir meliputi: *pengeluaran konsumsi rumah tangga*, *pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba*, *pengeluaran konsumsi pemerintah*, *pembentukan modal tetap domestik bruto*, *perubahan inventori/ stok*, dan *ekspor neto*.

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/ wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: *upah dan gaji*, *sewa tanah*, *bunga modal*, dan *keuntungan*; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga *penyusutan barang modal tetap* dan *pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi)*. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Angka PDRB hasil perhitungan dari **ketiga pendekatan** tersebut **secara teoritis akan sama**. Selanjutnya, PDRB seperti yang diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar **harga pasar** karena mencakup **penyusutan** dan **pajak tak langsung neto**.

3. Metode Penghitungan

a. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan penghitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

b. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Konstan

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Jadi jika disebut pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan

ekonomi) maka perhitungannya berdasarkan atas dasar harga konstan (PDB/PDRB atas dasar harga konstan). Dikenal empat cara untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu revaluasi, ekstrapolasi, deflasi, dan deflasi berganda.

Revaluasi

Prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Dalam hal ini, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara masing-masing atas dasar harga konstan. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan dalam proses produksi, karena selain mencakup komponen input yang sangat banyak, data harga yang tersedia juga tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio tertentu. Rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi biaya antara dengan output pada tahun dasar.

Ekstrapolasi

Menurut metode ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatannya.

Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output pada tahun dasar 2000. Dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio tetap nilai tambah terhadap output pada tahun dasar 2000, maka diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

Deflasi

Menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang sesuai. Indeks harga yang dimaksud dapat juga dipakai sebagai inflator, dalam keadaan di mana nilai tambah atas dasar harga berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga tersebut.

Deflasi Berganda

Dalam metode deflasi berganda ini, yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dengan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan biasanya menggunakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar (IHPB) sesuai dengan cakupan

komoditasnya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar. Pada kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, karena selain komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.

4. Turunan PDRB

a. PDRB atas dasar Harga Pasar

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah/ wilayah, termasuk penyusutan dan pajak tak langsung neto.

b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas dasar Harga Pasar

PDRN atas dasar harga pasar merupakan PDRB atas dasar harga pasar dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud adalah nilai susutnya barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

c. PDRN atas dasar Biaya Faktor

PDRN atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto. Pajak tak langsung neto merupakan pajak tak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tak langsung bersifat menaikkan harga jual, sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, PDRN atas dasar biaya faktor disebut sebagai **Pendapatan Regional**.

d. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan **jumlah penduduk pada pertengahan tahun**. Terdapat dua ukuran PDRB per kapita, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (riil).

5. PDRB menurut Lapangan Usaha

Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa ini pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 9 (sembilan) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai sebagai lapangan usaha atau industri.

Pengelompokan 9 lapangan usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsektor. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.

Jika dipadankan dengan pengelompokan kegiatan ekonomi sebelum tahun 1960-an, maka sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang sangat tergantung pada sumber daya alam termasuk ke dalam **Sektor Primer**. Sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta konstruksi di mana inputnya sebagian besar berasal dari sektor primer termasuk ke dalam **Sektor Sekunder**. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan sektor penunjang dari kedua kelompok sektor tersebut diklasifikasikan sebagai **Sektor Tersier**.

6. PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut penggunaan terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa dikurangi penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga selama satu tahun. Sumber data utama perkiraan nilai konsumsi rumah tangga adalah hasil pengolahan SUSENAS BPS Provinsi DIY. Sementara untuk harga setiap jenis bahan yang dikonsumsi (harga konsumen) diperoleh dari hasil pengolahan Survei Biaya Hidup (SBH) BPS Provinsi DIY.

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Lembaga swasta yang tidak mencari untung terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atas jasa kepada masyarakat, seperti: organisasi serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tujuan dari kegiatan tersebut tidak mencari untung. Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung diperoleh dari hasil penghitungan Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SKLNP).

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), sedangkan untuk pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini daerah otonom tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat desa diperoleh dari daftar K1, K2 dan K3 dari BPS. Apabila diteliti lebih jauh maka pengeluaran pemerintah terdiri dari dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja

pegawai, belanja barang, subsidi dan pengeluaran lainnya. Dari kelompok pengeluaran rutin yang dihitung sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah adalah belanja pegawai, belanja barang dan pengeluaran rutin lainnya. Subsidi tidak dimasukkan, karena pengeluarannya merupakan transfer.

Kelompok pengeluaran pembangunan yang tujuan utamanya untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik di segala bidang merupakan investasi pemerintah dan tidak termasuk pengeluaran konsumsi pemerintah. Tetapi pembiayaan yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, dimasukkan sebagai konsumsi pemerintah.

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun barang bekas dari luar negeri termasuk luar wilayah/daerah. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

PMTDB dibedakan atas pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi, pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan, pembentukan modal dalam bentuk alat angkutan/kendaraan, dan pembentukan modal untuk barang modal lainnya.

Ditinjau dari sudut kepemilikan, PMTDB dapat dihitung berdasarkan pengeluaran untuk pembelian barang modal oleh masing-masing pelaku usaha (9 sektor). Sementara kalau ditinjau dari jenis barang modal itu sendiri, maka pembentukan modal dapat dihitung berdasarkan arus barang (*commodity flows*).

Perkiraan nilai PMTDB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung nilai barang-barang modal yang masuk ke region dan barang modal yang masuk antar region atau antar pulau, ditambahkan dengan persentase tertentu terhadap nilai produksi bruto sektor konstruksi/ bangunan. Sementara perkiraan nilai PMTDB atas dasar harga konstan tahun 2000 diperoleh dengan cara mendeflate/ membagi nilai pembentukan modal tetap bruto (nilai barang impor) atas dasar harga berlaku dengan IHPB barang impor, dan dengan IHPB sektor industri untuk barang modal antar pulau. Data mengenai investasi diperoleh dari BI Yogyakarta dan Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Pemda DIY.

Pengertian inventori adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik barang yang sudah jadi maupun yang sedang dalam proses. Perubahan inventori/stok pada suatu tahun diperoleh dari seluruh nilai inventori/ stok pada akhir tahun dikurangi dengan seluruh nilai inventori/stok pada akhir tahun sebelumnya (pada awal tahun yang bersangkutan).

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu region dengan penduduk region lain atau dengan luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor dirinci menjadi 2 (dua), yaitu: ekspor dan impor dengan negara lain dan ekspor dan impor antar region/provinsi.

7. PDRB Tahun Dasar 2010 Berbasis SNA 2008

Selama satu dekade terakhir telah banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan regional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional dan regional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar tersebut dilakukan dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *2008 System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Table* (SUT).

Implikasi dari perubahan harga tahun dasar memberikan dampak, antara lain: meningkatkan nominal PDB/PDRB yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu negara/wilayah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi, dan pergeseran struktur perekonomian. Dampak lain adalah merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi, dan juga berdampak pada perubahan input data untuk *modelling* dan *forecasting*.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut: secara umum perekonomian Indonesia relatif stabil; selama 10 (sepuluh) tahun terakhir telah terjadi perubahan struktur ekonomi terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru; rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun; teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008; tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB/PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan indeks harga produsen (*producer price index/PPI*); dan tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk *benchmarking*/menetapkan PDB/PDRB.

Analisis PDRB 2011-2015 ini sudah mendasarkan penghitungan PDRB berdasarkan SNA 2008. Oleh karena cakupannya sudah berbeda, maka terhadap publikasi analisis sebelumnya tidak dapat langsung dibandingkan.

C. Kualitas Pertumbuhan

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai pemerataan tidaklah terlalu bermakna. Namun meraih keduanya secara bersamaan bukanlah perkara mudah. Para ekonom pun punya pandangan berbeda mengenai hal ini. Mengorbankan pemerataan seringkali diperlukan guna meraih pertumbuhan, kata para ekonom penganut aliran capital fundamentalism. Pertumbuhan hanya bisa berlangsung ketika ketimpangan justru eksis dalam masyarakat, terutama pada fase awal pembangunan, kata ekonom Simon Kuznets, 60 tahun lampau.

Teori pertumbuhan ekonomi Walt Whitman Rostow (1916-1979) yang juga diadopsi dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia pada masa Orde Baru telah menimbulkan permasalahan kesenjangan pendapatan yang menganga. Di samping itu tahapan pembangunan juga telah menimbulkan kesenjangan sosial dan afiliasi politik yang berujung terjadinya krisis ekonomi dan sosial di tahun 1998.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Persentase pertambahan output itu harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Sedangkan menurut Tambunan (1996), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan seluruh ekonomi negara Indonesia. Kemiskinan yang berlangsung terus di banyak negara di Afrika merupakan salah satu contoh dari akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut (stagnasi). Oleh karena itu, masalah pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian ekonom, baik dari negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara industri maju.

Teori pertumbuhan menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Mereka lebih memfokuskan perhatian pada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Misalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.

Menurut Sukirno (1997), faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, dan luas pasar sebagai sumber pertumbuhan.

Todaro (2000) mengatakan, ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu: Pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi.

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi jika sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pendapatan yang diinvestasikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan stok modal (*capital stock*) yang pada akhirnya akan diinvestasikan lagi dalam bentuk pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku. Kondisi demikian akan memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa yang akan datang. Pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja, yang terjadi beberapa tahun kemudian secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja. Dimana peningkatan tenaga kerja terjadi jika penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan kerja secara umum. Sedangkan kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi memungkinkan pemanfaatan barang modal secara lebih produktif.

2. Kesenjangan (Disparitas) Antarwilayah

Menurut Arsyad (1997), penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama kita pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan, namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di negara sedang berkembang. Misalnya ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, dan kebebasan untuk memilih. Uppal dkk, (1986), mengatakan bahwa penurunan kesenjangan antar daerah dapat disebabkan karena adanya alokasi dana pembangunan, antar lain seperti misalnya transfer pemerintah pusat melalui berbagai grant dan pengeluaran pemerintah pusat di masing-masing provinsi melalui daftar isian proyek (DIP).

Pendiri ilmu ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo (dalam Lipsey, 1985), sangat memperhatikan distribusi pendapatan di antara tiga kelas sosial yang besar yaitu pekerja, pemilik modal, dan pemilik tanah. Untuk mengatasi persoalan ini mereka

menentukan tiga faktor produksi : tenaga kerja, modal, dan tanah. Balas jasa untuk setiap faktor produksi ini merupakan pendapatan bagi tiga kelas dalam masyarakat. Smith dan Ricardo tertarik pada apa yang menentukan pendapatan masing-masing kelompok dari pendapatan nasional, dan bagaimana suatu pertumbuhan dalam pendapatan nasional mempengaruhi distribusi pendapatan ini. Teori ini meramalkan bahwa kalau masyarakat mengalami perkembangan tuan tanah akan menjadi makmur dan kapitalis akan menjadi semakin melarat.

Disparitas antarwilayah adalah perbedaan tingkat PDB per kapita yang dapat diakibatkan pertumbuhan yang berbeda antar wilayah. Setiap negara selalu mempunyai wilayah yang maju secara ekonomi dan ada pula yang tertinggal. Perbedaan ini terletak pada perkembangan sektor-sektor ekonominya, baik sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi, sektor jasa seperti perbankan, asuransi, kesehatan, maupun sektor infrastruktur, perumahan dan lain sebagainya. Pembangunan wilayah yang merata tidak berarti setiap wilayah mempunyai tingkat pertumbuhan atau perkembangan yang sama, atau mempunyai pola pertumbuhan yang seragam untuk setiap wilayah. Pengertian pembangunan wilayah yang merata mengarah kepada pengembangan potensi wilayah secara menyeluruh sesuai kapasitas dan potensi yang dimiliki, sehingga dampak positif dari pertumbuhan ekonomi terbagi secara seimbang kepada seluruh wilayah atau daerah. Pada dasarnya tujuan akhir dari pembangunan wilayah yang seimbang adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di wilayah pedesaan/daerah belakang sehingga taraf hidupnya sejajar atau setara dengan taraf hidup penduduk di wilayah perkotaan/maju melalui pembangunan sektor pertanian, industri, perdagangan atau bisnis, fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. (Alam, 2006).

Menurut Yadiansyah (2007), faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antardaerah di Indonesia adalah, yang pertama: konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi nasional yang diterapkan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung terpusat di Pulau Jawa, sehingga membuat terbelakangnya pembangunan ekonomi provinsi di luar Jawa, khususnya Indonesia Bagian Timur. Kedua, alokasi investasi. Pola distribusi nilai tambah industri antardaerah adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Terpusatnya investasi di Pulau Jawa atau terhambatnya perkembangan investasi daerah disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kebijakan dari birokrasi yang terpusat sampai pada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di luar Jawa (Tambunan, 1996).

Ketiga adalah tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antarpulau. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal antardaerah. Keempat, yaitu perbedaan sumber daya. Dasar pemikiran "klasik" sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDA-nya akan lebih maju masyarakatnya dan

lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin. Selain itu dibutuhkan faktor-faktor lain yaitu teknologi dan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Daerah-daerah di Indonesia yang kaya sumber daya alam seperti NAD, Riau, Kalimantan, dan Papua memang masih lebih baik di banding daerah di luar Jawa yang miskin SDA, tetapi tingkat pendapatan di daerah-daerah kaya tersebut tidak lebih tinggi dibanding daerah di Jawa yang relatif kaya SDM dan teknologi. Kelima, adalah perbedaan kondisi demografis antardaerah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Terakhir adalah kurang lancarnya perdagangan antardaerah. Ketidاكلancaran ini disebabkan terutama oleh keterbatasan sarana prasarana transportasi dan komunikasi, perdagangan antar provinsi meliputi barang jadi, barang modal, input antara, barang baku, dan material-material lainnya untuk produksi dan jasa jadi terganggu.

3. Kesenjangan (Disparitas) Pendapatan dan Kemiskinan

Menurut Ray (1998) ketimpangan ekonomi merupakan dasar dari disparitas individu yang memperbolehkan untuk memiliki sesuatu barang, pada saat individu-individu yang lain memilih sesuatu yang persis sama. Disparitas pendapatan dan kekayaan seseorang dalam banyak situasi berhubungan dengan isu-isu pendapatan dan kebebasan dalam berpolitik. Menurut Wie (1983), bahwa masalah ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat dilihat dari tiga segi, yaitu pembagian pendapatan antargolongan pendapatan atau ketimpangan relatif, pembagian pendapatan antardaerah perkotaan dan pedesaan, dan pembagian pendapatan antardaerah. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antaradaerah perkotaan dan daerah pedesaan bisa dilihat dari segi perbedaan pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Hal ini bisa dilihat dari dua indikator, yaitu: perbandingan antara tingkat pendapatan perkapita di daerah perkotaan dan pedesaan dan disparitas dari pendapatan daerah perkotaan dan pedesaan (perbedaan dalam pendapatan rata-rata antarakedua daerah sebagai persentase dari pendapatan nasional rata-rata). Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antardaerah adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah di Indonesia, yang menyebabkan pula ketimpangan dalam tingkat pendapatan perkapita antardaerah.

Tambunan (2001) mengatakan, ada sejumlah indikator yang digunakan untuk menganalisis "*development gap*" atau "disparitas" antar kabupaten/kota, provinsi, atau negara, yaitu:

- a. Distribusi PDRB menurut provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Konsumsi rumah tangga per kapita.

Asumsi yang digunakan untuk menganalisis konsumsi rumah tangga per kapita adalah *saving behavior* dari masyarakat tidak berubah dan pangsa kredit di dalam pengeluaran tidak berubah.

c. *Human Development Index*.

Asumsi semakin baik pembangunan di wilayah, maka semakin tinggi HDInya.

d. Kontribusi sektoral terhadap PDRB.

Kontribusi sektoral terhadap PDRB dapat dihitung melalui angka distribusi persentase PDRB baik berdasarkan harga yang berlaku maupun berdasarkan harga konstan.

e. Struktur Fiskal.

Daerah yang tingkat pembangunannya tinggi, dilihat dari pendapatan riil perkapita yang tinggi, penerimaan pemerintah daerah tersebut (PAD asli) juga tinggi.

Selain itu, menurut Tambunan (2001), distribusi pendapatan akan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Pada akhir proses pembangunan, ketimpangan akan menurun, yakni saat sektor industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pengsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

4. Ketimpangan Antarwilayah dengan Indeks Williamson

Untuk memahami konvergensi dan divergensi dalam perkembangan suatu wilayah, Williamson mengamati tingkat kesenjangan diberbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda. Williamson menilai tingkat kesenjangan dengan memperkenalkan Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan perkapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional. Jadi Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standar deviasi. Dengan demikian makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar dan begitupun sebaliknya semakin rendah Indeks Williamson maka akan semakin rendah kesenjangan di wilayah tersebut. Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi. Williamson menggunakan indeks ini untuk mengukur tingkat kesenjangan dari berbagai negara dengan tahun yang relatif sama. Dalam melakukan perhitungan Williamson menggunakan data PDB perkapita serta jumlah penduduk dari berbagai negara. Hasil perhitungan ini kemudian digabungkan dengan tingkat perkembangan ekonomi (berdasarkan tingkat PDB) negara-negara tersebut dari Kuznets. Berdasarkan penggabungan kedua perhitungan tersebut, Williamson menyatakan bahwa ada hubungan sistematis antara tingkat pembangunan nasional dan ketidaksamaan regional. Tingkat ketidaksamaan regional adalah sangat tinggi dalam golongan pendapatan menengah berdasarkan Kuznets, tetapi secara konsisten lebih rendah apabila kita bergerak ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Dapat dikatakan juga bahwa pada waktu tingkat perkembangan perekonomian suatu negara masih rendah, maka tingkat kesenjangan pun semakin rendah (nilai CV rendah). Nilai CV ini terus meningkat bagi negara-negara yang tingkat perkembangan ekonominya semakin tinggi. Sampai suatu saat tercapai titik balik, dimana tingkat perkembangan ekonomi negara semakin tinggi maka nilai CV-nya semakin rendah. Bagi negara-negara yang telah maju ternyata nilai CV-nya rendah, seperti negara-negara yang sangat belum berkembang. Apabila hubungan antara Indeks Williamson dengan perkembangan ekonomi digambarkan dengan grafik, maka grafik tersebut akan berbentuk huruf U terbalik (Williamson, 1975).

Menurut Williamson (1975), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan antarwilayah, yaitu :

a. *Labor Migration* (Perpindahan Tenaga Kerja)

Perpindahan tenaga kerja antar daerah mungkin sangat selektif karena baik oleh hambatan keuangan dari pada tingkat pendapatan yang rendah atau kelambanan tradisional di masyarakat pedesaan, dan daerah non industri yang miskin. Orang-orang yang pindah mungkin ditandai sebagai orang-orang yang bersemangat dan berjiwa *entrepreneur*, terdidik dan mempunyai keterampilan dan dalam unsur-unsur produktif. Perpindahan penduduk yang selektif semacam ini akan memberikan penekanan terhadap adanya tendensi kearah terpencarnya pendapatan regional, tingkat partisipasi tenaga kerja, jika yang lain tetap, cenderung akan menguntungkan daerah yang kaya dan merugikan daerah yang miskin. Lebih dari itu, *human capital* yang berharga cenderung mengalir keluar dari daerah miskin ke daerah kaya yang membuat sumber-sumber regional perkapita yang dimiliki akan lebih pincang dan ketidaksamaan akan lebih besar.

b. *Capital Migration* (Perpindahan Modal)

Perpindahan modal swasta secara inter-regional cenderung berakibat buruk. Faedah eksternal ekonomis dan faedah umum yang berasal dari aglomerasi dari proyek-proyek modal di daerah kaya yang menyebabkan berpindahnya modal dari daerah miskin, hal ini cenderung memperjelas ketidaksamaan regional dan memperluas perpecahan antar daerah kaya dan daerah miskin. Resiko yang tinggi, kekurangan kemampuan *entrepreneur*, dan pasar modal yang belum berkembang boleh jadi akan menekan kegiatan investasi dan akumulasi modal di daerah miskin.

c. *Central Government Policy* (Kebijakan Pemerintah Pusat)

Pemerintah pusat secara terang-terangan ataupun tidak melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pembangunan nasional yang menimbulkan peningkatan ketidaksamaan regional. Jika keadaan politik di wilayah yang miskin kurang

memuaskan maka pemerintah pusat dapat saja mengalihkan investasi dari daerah miskin ke daerah kaya. Hal ini akan menyebabkan kesenjangan yang semakin besar. Tetapi apabila pemerintah pusat cenderung berlaku adil maka kebijaksanaannya dapat mengurangi kesenjangan ini. Dengan memperhatikan pola investasi regional pemerintah pusat, hendaknya jelas bahwa setelah pembangunan berlangsung, maka investasi pemerintah diharapkan semakin berkurang, dan dalam banyak hal investasi pemerintah akan dibiayai oleh investasi sebelumnya.

d. *Interregional Linkages* (Keterkaitan antar Daerah)

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada permulaan pembangunan mungkin efek menyebar dari perubahan teknologi dan perubahan sosial serta pengandaan pendapatan adalah kecil., tetapi selanjutnya diharapkan pada saat pembangunan telah berjalan, peningkatan disuatu daerah akan memberikan efek yang menyebar ke daerah di sekitarnya.

D. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

1. Kependudukan

Tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang terjadi di negara/wilayah tersebut. Dalam demografi dikenal istilah transisi demografis. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah. Dalam proses transisi demografi, periode perubahan dibagi atas empat tahap. *Tahap Pertama*, adalah periode dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian keduanya sama-sama tinggi. Pada *tahap kedua*, karena adanya perbaikan dalam fasilitas kesehatan, tingkat kematian menurun. Namun penurunan yang terjadi pada tingkat kematian ini tidak disertai dengan penurunan tingkat kelahiran, akibatnya pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Pada *tahap ketiga*, penurunan tingkat kematian diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran. Penurunan pada tingkat kelahiran ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perubahan pola berpikir masyarakat akibat pendidikan yang diperolehnya dan juga disebabkan oleh perubahan pada aspek sosial ekonomi. Pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk mulai menurun. Pada tahap akhir proses transisi ini baik tingkat kelahiran maupun tingkat kematian sudah tidak banyak berubah lagi. Angka kelahiran dan kematian yang secara alamiah memang harus terjadi. Akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah (Susanti, 1995).

Apabila proses transisi demografi dikaitkan dengan proses peningkatan pendapatan perkapita, maka pada awal proses pembangunan peningkatan pendapatan perkapita biasanya diikuti dengan penurunan angka kematian yang begitu cepat daripada penurunan angka kelahiran. Penurunan angka kematian yang cepat ini disebabkan oleh membaiknya

gizi masyarakat akibat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Selain itu peningkatan pendapatan masyarakat ini juga akan menyebabkan penerimaan pajak pemerintah meningkat, dan hal ini tentu saja memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya di bidang kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan pendapatan perkapita biasanya diikuti dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, akibat lain dari penurunan angka kematian yang lebih cepat daripada penurunan angka kelahiran adalah tingginya jumlah penduduk usia muda dan usia tua pada struktur penduduk menurut umur, akibat dari hal ini adalah jumlah penduduk yang hidupnya ditanggung oleh penduduk usia kerja menjadi semakin tinggi. Dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita, perubahan pada aspek sosial-ekonomi dan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kelahiran juga akan turun dengan cepat. Sehingga tingkat pertumbuhan penduduk menurun dan dengan sendirinya jumlah penduduk yang menjadi tanggungan penduduk usia kerja akan menurun.

2. Ketenagakerjaan

Menurut konsep BPS, yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu (i) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan (ii) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan tidak ingin bekerja (contohnya adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penganggur sukarela lain). Jumlah penduduk dalam golongan (i) dinamakan penduduk usia kerja dan penduduk dalam golongan (ii) dinamakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk dalam (i) dari jumlah penduduk dalam (ii). Perbandingan di antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (dan dinyatakan dalam persen) dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dalam prakteknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (atau kesempatan kerja penuh) apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari 4 persen.

Menurut Tambunan (1996), tenaga kerja adalah bagian dari penduduk (usia kerja), baik yang bekerja maupun yang kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sangat tergantung pada besarnya pertumbuhan penduduk secara kumulatif setiap tahun. Angkatan kerja adalah penduduk yang berdasarkan usia sudah bisa bekerja. Menurut Subri (2003), tenaga kerja adalah usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan itu dapat

berupa lebih besarnya penawaran di banding permintaan terhadap tenaga kerja dan lebih besarnya permintaan di banding penawaran tenaga kerja.

Sedangkan menurut Ananta (1990), tenaga kerja adalah bagian penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Perserikatan Bangsa-bangsa menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja. Indonesia menggolongkan penduduk usia 10 tahun ke atas sebagai tenaga kerja, dengan alasan terdapat banyak penduduk usia 10-14 dan 65 tahun ke atas yang bekerja. Angkatan kerja adalah bagian tenaga kerja yang benar-benar mau bekerja memproduksi barang dan jasa. Di Indonesia angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang benar-benar mau bekerja. Mereka yang mau bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

Thomas Robert Malthus dalam Albert WS Kusen (2013), menyebutkan bahwa ukuran pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yakni jika Pendapatan Nasional Bruto (PNB) potensialnya meningkat. Sektor yang paling dominan adalah sektor industri dan pertanian. Jika output di kedua sektor itu ditingkatkan, maka PNB potensialnya akan bisa di tingkatkan. Menurut Thomas Robert Malthus ada dua faktor yang sangat menentukan pertumbuhan yaitu faktor ekonomi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi; dan juga faktor nonekonomis seperti keamanan atas kekayaan, konstitusi dan hukum yang pasti, etos kerja dan disiplin pekerja yang tinggi. Tetapi, diantara faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah faktor akumulasi modal.

Meski relasi antara pertumbuhan dan ketimpangan telah memicu debat panjang para ahli, namun tetap ada keinginan kuat untuk "mengawinkan" keduanya. Oleh karena kompleksitasnya permasalahan pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ini, dalam dua dekade terakhir telah memunculkan sejumlah gagasan konseptual agar implikasi pembangunan lebih baik, mulai dari *redistribution with growth*, *the quality of growth*, *broad-based growth*, *pro-poor growth*, hingga *inclusive growth*. Analisis PDRB ini hanya berfokus membahas tentang konsep kualitas pertumbuhan (*the quality of growth*).

BAB 3

METODOLOGI

- A. Sumber Data
- B. Kerangka Pikir Analisis
- C. Implementasi SNA dalam Penyempurnaan Penghitungan PDRB dan Perubahan Tahun Dasar 2010
- D. Indikator Penyajian PDRB
- E. Indikator Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

BAB III METODOLOGI

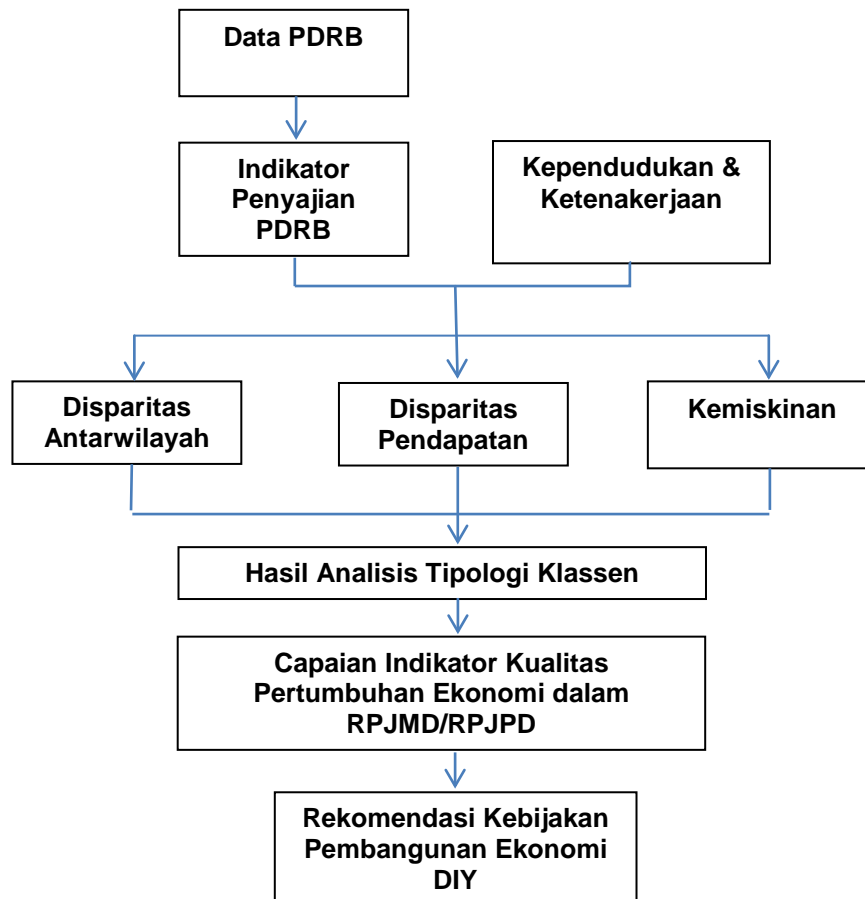
A. Sumber Data

Data yang digunakan dalam Analisis PDRB 2010-2014 ini bersumber dari data PDRB DIY dan PDRB Kabupaten/Kota yang merupakan hasil pengolahan data dari kegiatan Survei Khusus Neraca Produksi dan Neraca Konsumsi, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk 2010 (SP2010), survei dan kompilasi data keuangan dari Pemerintah Daerah DIY maupun kabupaten/kota, kompilasi data keuangan dari Bank Indonesia Cabang Yogyakarta, Survei Statistik Harga Konsumen, Survei Statistik Niaga dan Jasa, Survei Statistik Pertanian, Survei Industri Besar Sedang (IBS), Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK), dan data-data dari DIY dalam Angka (DDA DIY).

B. Kerangka Pikir Analisis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan sumber data, maka kerangka pikir analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Pikir Analisis



C. Implementasi SNA dalam Penyempurnaan Penghitungan PDRB dan Perubahan Tahun Dasar 2010

Data neraca nasional telah digunakan oleh berbagai kalangan: pemerintah, analisis ekonomi, pelaku usaha, organisasi internasional, dan lain-lain. Indikator utama dari neraca nasional, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan pendapatan nasional, memiliki peran penting dalam menganalisis perekonomian suatu negara. Telah banyak keputusan/ kebijakan ekonomi yang diambil oleh setiap negara didasarkan pada data neraca nasional.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Adaptasi pencatatan statistik nasional dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran perekonomian yang berkembang signifikan secara lebih komprehensif dan *up to date*, agar keterbandingan antar negara dapat dilakukan. Selain itu data tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk membantu pengambil keputusan dalam mengatur potensi yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2000 ke tahun 2010 sekaligus melakukan implementasi *System of National Accounts 2008* (SNA-2008). Secara sederhana perubahan tahun dasar adalah melakukan penetapan perubahan harga tahun dasar yang digunakan dalam penghitungan PDB/PDRB atas dasar harga konstan dengan harga baru dan terkini yang dianggap representatif.

Perubahan tahun dasar PDB/PDRB dari tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 yang mengadopsi sebagian rekomendasi SNA2008 dilakukan dengan menerapkan *benchmarking*, yaitu dengan menyesuaikan level baru PDB/PDRB menggunakan Tabel Penyediaan dan Penggunaan (TPP) atau yang dikenal dengan *Supply and Use Tables* (SUT). Setelah dilakukan penyusunan SUT maka selanjutnya dilakukan *referencing* (pergeseran tahun dasar PDB/PDRB dari 2000 menjadi 2010). Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara PDB/PDRB tahun dasar 2000 yang masih menggunakan sistem lama dan PDB/PDRB tahun dasar 2010 yang sudah menggunakan sistem baru. Dengan demikian efek dari perubahan sistem penghitungan PDB dan agregat makro ekonomi dapat lebih ter jelaskan dan terukur.

1. Penggantian Tahun Dasar 2000 menjadi Tahun 2010

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan pergantian tahun dasar penghitungan PDB/PDRB antara 5 sampai 10 tahun. Tahun dasar yang digunakan dalam menghitung PDB/PDRB saat ini adalah tahun dasar 2000, sehingga Indonesia sudah selayaknya melakukan pembaharuan terhadap tahun dasar agar penghitungan PDB/PDRB lebih sempurna dan lebih up to date. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Rekomendasi PBB dalam SNA1993 (*part* 16:76), bahwa pergantian tahun dasar penghitungan PDB dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun agar dapat memberikan gambaran perkembangan ekonomi sesuai dengan kondisi terkini.
- b. Teridentifikasinya pembaharuan konsep, sumber data dan metodologi berbasis SNA2008 yang akan diimplementasikan dalam penyusunan PDB/PDRB tahun dasar 2010.
- c. Pada tahun 2010, perekonomian Indonesia dipandang relatif stabil dengan laju pertumbuhan PDB sebesar 6,10 persen dan tingkat inflasi mencapai 6,96 persen. Meskipun pada tahun 2008 perekonomian Indonesia terimbas krisis finansial global.
- d. Perubahan struktur ekonomi nasional dari tahun 2000 dan 2010 dipandang cukup signifikan akibat perubahan dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru.
- e. Tersedianya Tabel Penyediaan dan Penggunaan (TPP) Indonesia 2010 yang menggambarkan keseimbangan transaksi *supply* dan *use* atas berbagai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu industri.
- f. Tersedianya neraca produksi menurut sektor institusi selain neraca produksi menurut lapangan usaha yang diturunkan dari *Full Sequence of Account* (FSA) 2010.
- g. Tersedianya koresponden/ konversi klasifikasi antara klasifikasi menurut lapangan usaha (KBLI2009) dengan Klasifikasi baku komoditi Indonesia (KBKI 2010) dan antara Kode *Harmonized System* (HS) dengan KBLI2009 untuk penyusunan TPP Indonesia 2010.
- h. Tersedianya *deflator* baru untuk penghitungan PDB/PDRB yaitu Indeks harga produsen (*Producers Price Index* /PPI).
- i. Tersedianya hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) yang dapat digunakan sebagai basis analisis, seperti data jumlah penduduk dan ketenagakerjaan.

2. System of National Accounts (SNA) 2008

Perubahan sosial ekonomi yang banyak terjadi di masyarakat saat ini mengakibatkan terjadinya transaksi ekonomi baru yang cara pengukurannya berbeda-beda. Oleh karena itu, *Inter Secretariat Working group on National Accounts* (ISWGNA) yang terdiri dari join group dari 5 (lima) organisasi dunia yaitu Eurostat, IMF, UNSD, OECD dan Worldbank melakukan standarisasi pengukuran dan klarifikasi terhadap metode penghitungan atas

transaksi ekonomi terkini yang tertuang dalam SNA. Selain itu Organisasi internasional tersebut melakukan inisiasi secara global dan bersama-sama bagi negara anggotanya untuk melakukan implementasi SNA 2008 serta mendukung pengembangan statistik ekonomi. Pada Februari 2013 dalam sidang komisi statistik PBB, ISWGNA menyampaikan laporan tentang monitoring pelaksanaan implementasi SNA 2008 di setiap negara anggotanya mulai tahun 2009-2019.

System of National Accounts 2008 (SNA2008) atau Sistem Neraca Nasional 2008 adalah standar rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud terkait dengan penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca berstandar internasional. Dalam sejarahnya, SNA2008 merupakan versi yang kelima, dimana versi sebelumnya adalah SNA 1947, SNA 1953, SNA 1968, dan SNA 1993.

SNA merupakan sebuah alat utama untuk mengevaluasi, menganalisis, dan meramal fenomena ekonomi suatu ne-gara, yaitu produksi, konsumsi, akumulasi, pendapatan, dan kekayaan. Dengan menggunakan informasi dari SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dimengerti. Selain itu, SNA juga digunakan untuk mengkoordinasikan *framework* untuk seluruh statistik lainnya (*central statistical framework*) sehingga diperoleh definisi dan data yang konsisten. Terakhir, SNA telah digunakan untuk laporan internasional tentang data neraca nasional yang telah sesuai dengan standar, konsep, definisi, dan klasifikasi yang diterima secara internasional (*international comparisons*).

3. Implementasi SNA 2008 dalam Penyusunan PDB/PDRB Tahun Dasar 2010

Konsep/definisi, klasifikasi, dan metode yang digunakan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia masih menggunakan SNA 1968. Sejalan dengan program Reformasi Birokrasi, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menetapkan untuk mengimplementasikan SNA 2008 dalam penyusunan PDB/PDRB di Indonesia. Implementasi ini dilakukan pada saat perubahan tahun dasar PDB/PDRB yang dipublikasikan pada 2014.

Manfaat implementasi SNA 2008 dalam penyusunan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain:

- a. Menjaga keterbandingan, keselarasan, dan konsistensi data PDB dengan indikator lain maupun dengan negara lain;
- b. Memperkecil perbedaan antara data PDB yang dihitung di level Nasional dengan data PDRB di level regional;
- c. Memudahkan pengguna data untuk melakukan analisis sosio-ekonomi.

Kegiatan implementasi SNA 2008 dalam penyusunan PDB/PDRB dan perubahan tahun dasar PDB/PDRB akan memberikan dampak terhadap nilai PDB/PDRB. Berdasarkan pengalaman beberapa negara yang telah mengimplementasikan SNA 2008, dampak yang timbul akibat mengimplementasikan SNA 2008 adalah meningkatnya besaran PDB/PDRB negara yang bersangkutan. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan konsep dan metodologi dari SNA 1968 ke SNA 2008. Berikut beberapa contoh perubahan konsep dan metode yang terjadi dari SNA 1968 ke SNA 2008.

Tabel 3.1. Contoh Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA 1968 dan SNA 2008

Rincian	SNA 1968	SNA 2008
1. Biaya penelitian dan pengembangan (R&D)	Diperlakukan sebagai biaya antara	Diperlakukan sebagai PMTB
2. Biaya eksplorasi mineral dan evaluasi	Diperlakukan sebagai biaya antara	Diperlakukan sebagai PMTB
3. Metode penghitungan output bank komersial	Menggunakan metode Imputed Output of Bank Services (IBSC)	Menggunakan metode Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)
4. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah pertumbuhan hewan dan tumbuhan mulai dari bibit sampai siap dipanen
5. Biaya pembuatan produk original	Diperlakukan sebagai biaya antara	Diperlakukan sebagai PMTB

Dari hasil identifikasi revisi dari SNA 1968 ke SNA 1993 dan 2008 terdapat sebanyak 118 revisi dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

a. Revisi atas Konsep dan Cakupan: Adopsi *Work-in Progress* (WIP) pada *cultivated biological resources*

Penghitungan output pertanian pada seri 2000 hanya mencakup output saat panen. Menurut SNA 1993 dan 2008 cakupan outputnya meliputi semua pertumbuhan aset alami yang merupakan hasil budidaya manusia tidak hanya output saat panen namun juga pertumbuhan hewan dan tumbuhan mulai dari bibit sampai siap dipanen.

Pertumbuhan alami budidaya hewan dan tumbuhan yang menghasilkan output hanya sekali dicatat sebagai *work-in-progress* (WIP). Perlakuan untuk pertumbuhan alami budidaya hewan dan tumbuhan yang menghasilkan output lebih dari sekali sebagai berikut:

- i. Pertumbuhan alami aset yang dibudidaya pada neraca sendiri diperlakukan sebagai pembentukan modal tetap bruto (PMTB).
- ii. Lainnya diperlakukan sebagai *WIP*.
Estimasi WIP dilakukan dengan pendekatan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara hewan/ tanaman tersebut.

Implikasi atas adopsi revisi SNA ini akan berdampak pada penambahan output pertanian di sisi penyediaan sedangkan di sisi penggunaan akan berdampak pada peningkatan pada komponen inventori/ PMTB.

b. Revisi Metodologi: Adopsi perubahan metode estimasi output bank

Penghitungan output bank dilakukan menggunakan metode tidak langsung. Pada seri 2000 metode yang digunakan disebut *Imputed Output of Bank Services* (IBSC) yaitu sebagai perbedaan antara *property income* yang diterima dan bunga yang dibayarkan. Berdasarkan SNA 2008 output bank dihitung menggunakan metode *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM) yaitu selisih *loans* (VL) dan *deposits* (Vd) menggunakan suatu *reference rate* (r).

c. Pengembangan dan revisi sumber data: Data *Tax on products*

Penilaian output dalam SNA2008 tidak hanya harga pembeli dan produsen saja namun juga mencakup harga dasar. Harga dasar adalah harga yang belum di tambahkan komponen pajak dan biaya transport serta margin perdagangan. Oleh sebab itu diperlukan data pajak dari Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan. Implikasi atas pengembangan sumber data ini akan merubah level dan formula penghitungan PDB/PDRB untuk total ekonomi yang sebelumnya: $PDB/PDRB = \sum NTB$ berubah menjadi: $PDB/PDRB = \sum NTB + Taxes\ on\ products\ less\ subsidies$.

d. Perubahan terminologi atau istilah

Dalam penyusunan neraca-neraca sesuai dengan SNA2008, ada beberapa istilah yang mengalami perubahan untuk memperjelas maksud yang terkandung didalamnya. Perubahan-perubahan tersebut antara lain: Pajak tak langsung menjadi pajak lainnya atas produksi, Upah dan Gaji menjadi kompensasi tenaga kerja, penyusutan menjadi konsumsi barang modal tetap, *Casualty Insurance* menjadi *Non Life Insurance*, dan lain-lain. Implikasi dari perubahan terminologi atau istilah tersebut tidak berdampak pada besaran PDB/PDRB.

e. Updating klasifikasi

Dalam rangka harmonisasi klasifikasi yang berlaku secara internasional, klasifikasi yang digunakan dalam penyusunan TPP yang merupakan dasar penyusunan PDB tahunan berdimensi 81 lapangan usaha pada kolom dan 246 komoditi pada baris.

Klasifikasi tersebut berkorespondensi dengan:

- a) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 atau *International Standards of Industrial Classifications (ISIC) rev.4*
- b) Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2010 atau *Central Product Classification (CPC) ver.2*,
- c) *Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP)* untuk konsumsi rumah tangga,
- d) *Classification of Purposes of Non Profit Institutions Serving Households (COPNI)* untuk klasifikasi lembaga non Profit yang melayani rumah tangga (LNPRT),
- e) *Classification of Functional of Governments (COFOG)* untuk klasifikasi Konsumsi Pemerintah, dan
- f) *Harmonized System (HS)* untuk klasifikasi ekspor dan impor.

Perubahan klasifikasi PDB/PDRB tahun dasar 2010 dilakukan menurut Lapangan usaha dan komponen pengeluaran. PDB/PDRB menurut lapangan usaha menggunakan KBLI 2009 yang dikelompokkan dalam 17 kategori, dari sebelumnya menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) tahun 1990 yang dikelompokkan dalam 9 sektor ekonomi. Implikasi penggunaan klasifikasi baru dalam penyusunan PDB/PDRB menurut lapangan usaha menyebabkan perubahan tampilan dalam klasifikasi publikasi PDB/PDRB seperti tertuang pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Perbandingan Klasifikasi PDB/PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDB/PDRB Tahun Dasar 2000	PDB/PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan
2. Pertambangan & Penggalian	B. Pertambangan & Penggalian
3. Industri Pengolahan	C. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas & Air Bersih	D. Pengadaan Listrik, Gas
	E. Pengadaan Air
5. Konstruksi	F. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	G. Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor
	H. Transportasi & Pergudangan
7. Pengangkutan & Komunikasi	I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum
8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan	J. Informasi & Komunikasi

9. Jasa-jasa	K. Jasa Keuangan L. Real Estat M,N. Jasa Perusahaan O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib P. Jasa Pendidikan Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa Lainnya
--------------	---

Klasifikasi PDB menurut pengeluaran mengalami penambahan satu komponen baru yaitu pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah tangga (LNPR), yang sebelumnya tergabung di dalam komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. Gambaran klasifikasi PDB/PDRB menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Perbandingan Klasifikasi PDB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDB tahun dasar 2000	PDB/PDRB tahun dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4. Perubahan Inventori 5. Ekspor 6. Impor	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPR 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor 7. Impor

Gambaran revisi di atas hanya sebagian dari rekomendasi SNA lainnya yang akan diimplementasikan dalam penyusunan neraca nasional Indonesia. Beberapa rekomendasi lainnya yang akan diimplementasikan dalam penyusunan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain perlakuan kegiatan eksplorasi mineral baik yang berhasil maupun gagal, *Original and copies, Software and database, Military weapon* sebagai PMTB, perubahan metode penghitungan output asuransi, dan lain-lain. Sedangkan perubahan perlakuan pengeluaran R&D dari biaya antara menjadi PMTB dalam SNA2008 belum diadopsi pada perubahan PDB/PDRB tahun dasar 2010 ini.

D. Indikator Penyajian PDRB

Data PDRB yang digunakan dalam buku Analisis PDRB Provinsi DIY ini terdiri dari PDRB menurut sektor/ lapangan usaha dan menurut penggunaan, yang disajikan atas dasar

harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000. Nilai PDRB juga disajikan dalam bentuk angka indeks yaitu distribusi persentase (kontribusi/peran), PDRB per kapita, indeks perkembangan, indeks berantai, dan indeks harga implisit.

1. Distribusi Persentase

Distribusi persentase diperoleh dengan membagi nilai tambah sektor/penggunaan dengan total PDRB. Distribusi persentase mengindikasikan struktur PDRB menurut sektor atau menurut penggunaan.

$$Share(\%) = \frac{ntb \text{ sektor / penggunaan}}{PDRB_t} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.1)$$

2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita diperoleh dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu. PDRB per kapita mengindikasikan rata-rata nilai tambah ekonomi suatu daerah yang diterima oleh setiap penduduknya. PDRB per kapita sering digunakan sebagai pendekatan pendapatan per kapita penduduk karena ukuran pendapatan per kapita sulit diperoleh.

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_t}{\sum \text{penduduk}_t} \quad \dots\dots\dots(3.2)$$

3. Indeks Perkembangan

Indeks perkembangan diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun dasar 2000 dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari suatu tahun terhadap tahun dasarnya. Formulasi Indeks Perkembangan, sebagai berikut:

$$IP_t = \frac{PDRB_t - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.3)$$

4. Indeks Berantai (Angka Laju Pertumbuhan)

Indeks berantai diperoleh dengan membagi nilai tambah pada tahun tertentu dengan nilai tambah pada tahun sebelumnya dikalikan 100. Apabila indeks berantai dikurangi dengan 100, maka diperoleh **angka laju pertumbuhan**.

$$IB_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.4)$$

5. Indeks Harga Implisit

Indeks harga implisit diperoleh dengan membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku dengan nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 pada tahun yang sama dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga di level produsen.

$$\Pi_t = \frac{PDRB_{adhb}_t}{PDRB_{adhk}_t} \times 100\% \dots\dots\dots(3.5)$$

6. Indeks Berantai dari Indeks Harga Implisit (Laju Inflasi)

Selanjutnya, apabila dari indeks harga implisit ini dibuatkan indeks berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga suatu tahun terhadap tahun sebelumnya (laju inflasi).

$$IIB_t = \frac{\Pi_t - \Pi_{t-1}}{\Pi_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.6)$$

E. Indikator Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi

Model pertumbuhan ekonomi mengacu pada fungsi produksi yang diperkenalkan oleh **Cobb-Douglass** (Mankiw, 2004), yaitu:

$$Y_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta \dots\dots\dots(3.7)$$

di mana:

- Y_t = tingkat produksi (output) pada periode t
- T_t = tingkat teknologi pada periode t
- K_t = jumlah stok modal pada periode t
- L_t = jumlah tenaga kerja pada periode t
- α = produktivitas modal
- β = produktivitas tenaga kerja

Formula di atas dapat dituliskan dalam bentuk persamaan fungsi berikut:

$$Y = f(T, K, L)$$

Dari rumusan fungsi produksi Cobb-Douglas tampak bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap teknologi, kapital, dan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi karena peningkatan teknologi, kapital atau tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja yang semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi semakin berkurang.

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Istilah “proses” berarti mengandung unsur dinamis, perubahan atau

perkembangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen atau diformulasikan sebagai berikut:

$$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{(t-1)}}{PDRB_{(t-1)}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.8)$$

di mana :

LPE = Laju pertumbuhan ekonomi

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke t

$PDRB_{(t-1)}$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke (t-1)

Jika pertumbuhan ekonomi diamati dalam suatu periode waktu beberapa tahun, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dihitung dengan formula:

$$r = \left(\sqrt[n-1]{\left(\frac{PDRB_{t_n}}{PDRB_{t_0}} \right)} - 1 \right) \times 100 \quad \dots\dots\dots(3.9)$$

di mana :

r = Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun

n = Jumlah tahun periode (dihitung mulai dari 1 sampai dengan n)

t_n = Tahun terakhir periode

t_0 = Tahun awal periode

Andil terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat baik dari sisi lapangan usaha, wilayah (kabupaten/kota), maupun penggunaan. Ukuran andil terhadap pertumbuhan ekonomi dihitung dengan formula berikut:

$$Andil_{it} = \frac{(LPE_{it} \times DP_{i(t-1)})}{100} \quad \dots\dots\dots(3.10)$$

$Andil_i$ = Andil sektor/ wilayah/ komponen ke-i terhadap pertumbuhan ekonomi

LPE_i = Laju pertumbuhan ekonomi sektor/ wilayah/ komponen ke-i

$DP_{i(t-1)}$ = Distribusi persentase sektor/ wilayah/ komponen ke-i terhadap total PDRB pada tahun sebelumnya

i = 1, 2, ..., 9

t = tahun observasi

Laju pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan PDRB per kapita suatu wilayah, dapat digunakan untuk membandingkan secara relatif posisi wilayah tersebut terhadap

wilayah lainnya. Perbandingan absolut antar kabupaten/kota atau menurut Sjafrizal (1997) disebut sebagai **Tipologi Klassen** disajikan pada Gambar 2.1 dalam bentuk “**diagram empat kuadran**”, di mana sumbu vertikal menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, sedangkan sumbu horisontal menggambarkan rata-rata PDRB per kapita. Pada tengah masing-masing sumbu (vertikal dan horisontal) digambarkan garis tegak lurus pada masing-masing sumbu. Garis-garis ini menggambarkan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi (tegak lurus dengan garis vertikal) dan rata-rata PDRB per kapita (tegak lurus dengan garis horisontal). Garis-garis tersebut membagi bidang grafik menjadi 4 (empat) kuadran. Selanjutnya searah putaran jarum jam, empat kuadran tersebut disebut dengan kuadran I (terletak di sudut kiri atas), kuadran II (terletak di sudut kanan atas), kuadran III (terletak di sudut kanan bawah), dan kuadran IV (di sudut kiri bawah).

Apabila suatu kabupaten/kota menempati kuadran I, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita di bawah rata-rata DIY, namun mempunyai tingkat pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan DIY. Sedangkan apabila terletak di kuadran II, berarti kabupaten/kota tersebut mempunyai PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhan di atas rata-rata DIY. Suatu titik di kuadran III menggambarkan PDRB per kapita di atas rata-rata PDRB per kapita DIY, namun tingkat pertumbuhannya di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan DIY. Selanjutnya dengan mudah dapat diinterpretasikan bahwa suatu titik di kuadran IV menggambarkan PDRB per kapita di bawah rata-rata PDRB per kapita DIY, dan juga tingkat pertumbuhannya di bawah tingkat pertumbuhan DIY.

Kabupaten/kota di kuadran I disebut “daerah berkembang cepat”, menunjukkan bahwa PDRB per kapitanya relatif masih rendah, sehingga Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian khusus untuk mengembangkannya. Namun demikian, karena tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi, kabupaten/kota tersebut masih berpeluang dipacu untuk mengejar daerah lain. Kabupaten/ kota yang terletak di kuadran II disebut “daerah maju dan cepat tumbuh” yang secara relatif menunjukkan daerah-daerah sudah maju perekonomiannya, dan akan lebih cepat maju karena mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang relatif tinggi dibanding dengan rata-rata DIY. Kabupaten/kota yang terletak di kuadran III merupakan “daerah maju tapi tertekan”, secara absolut sudah mencapai tingkat perekonomian yang tinggi namun tingkat pertumbuhannya relatif lebih rendah dibanding dengan rata-rata DIY. Sementara kabupaten/kota yang digambarkan di kuadran IV disebut “daerah tertinggal”, sangat perlu mendapat perhatian khusus karena dibanding daerah-daerah lainnya relatif lebih rendah baik dari segi besaran PDRB per kapita maupun tingkat pertumbuhannya.

Gambar 3.2
Diagram Perbandingan Laju Pertumbuhan dan PDRB Per Kapita



2. Indikator Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penduduk merupakan sumber daya yang penting dalam pembangunan. Keberadaan mereka dapat menjadi faktor yang mendukung atau menghambat pembangunan, tergantung kualitasnya. Kualitas penduduk dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain:

a. Pendidikan Penduduk

Pendidikan mencerminkan kualitas pengetahuan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk maka kualitas pengetahuan dan ketrampilannya diasumsikan semakin baik. Pendidikan tertinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk.

b. Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha merupakan mata pencaharian penduduk untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Kategori lapangan usaha mengacu pada lapangan usaha 9 (sembilan) sektor seperti yang digunakan dalam uraian PDRB tahun dasar 2000.

c. Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)

Angka beban tanggungan menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk yang dianggap tidak produktif (usia kurang dari 15 tahun atau 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15 tahun sampai 64 tahun). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$DR = \frac{Jml\ Penduduk_{0-14} + Jml\ Penduduk_{65+}}{Jml\ Penduduk_{15-64}} \dots\dots\dots(3.11)$$

Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Angka beban tanggungan masih merupakan indikator yang sangat sederhana karena produktivitas penduduk hanya dilihat dari usia, bukan dari kegiatan produktifnya (angkatan kerja).

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kesempatan memperoleh pekerjaan telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD'45) pasal 27 ayat 2. Setiap penduduk yang mampu dan mau bekerja diharapkan akan memperoleh pekerjaan yang sesuai disertai dengan jaminan perlindungan kerja yang manusiawi, termasuk di dalamnya memperoleh upah yang cukup untuk hidup layak. Namun harapan tersebut masih jauh dari kenyataan yang terjadi.

Dalam konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS atas saran dari *the International Labor Organization (ILO)*, penduduk dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih, yang digolongkan lagi menjadi 2 (dua) yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. **Angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). **Bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari pekerjaan atau penduduk usia kerja dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya, seperti cacat mental atau sebab lain sehingga tidak produktif.

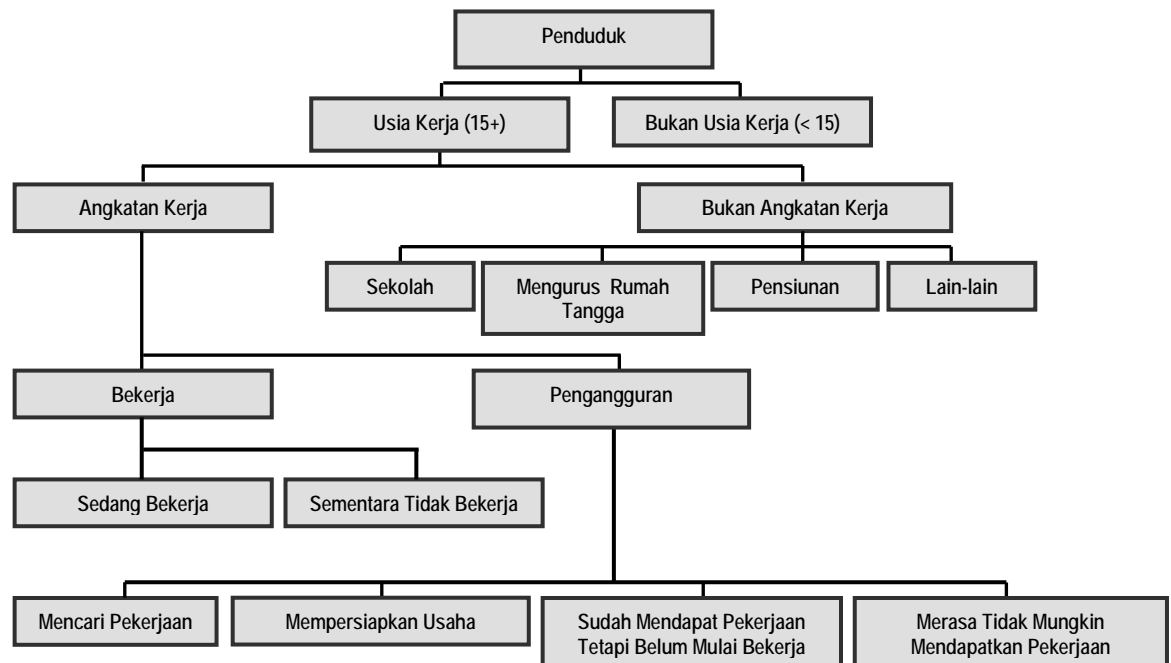
Penduduk **bekerja** adalah penduduk yang memiliki kegiatan ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan, paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu; termasuk kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi. **Penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah mereka yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya. **Pengangguran terbuka** adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari

pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Konsep tersebut digambarkan dalam Gambar 2.2.

Beberapa konsep pokok ketenagakerjaan adalah:

- **Mencari pekerjaan** adalah kegiatan dari mereka yang berusaha mendapat pekerjaan. Kegiatan mencari pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu di mana seminggu yang lalu masih dalam status menunggu jawaban lamaran. Jadi dalam kategori mencari pekerjaan juga dimasukkan mereka yang sedang memasukkan lamaran.
- **Penghasilan** mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan, bonus dan hasil usaha berupa sewa, bunga dan keuntungan, baik berupa uang atau natura/barang.
- **Hari kerja** adalah hari di mana seseorang melakukan kegiatan bekerja paling sedikit 1 jam terus menerus.
- **Jam kerja** adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja.

Gambar 3.3
Bagan Konsep Penduduk dan Tenaga Kerja



Sumber: BPS

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) dengan jumlah penduduk usia kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.12)$$

TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu daerah atau wilayah. Selain itu, TPAK juga digunakan untuk menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

e. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Menurut Simanjutak (2001), kesempatan kerja adalah penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor. Tingkat Kesempatan Kerja diukur dengan menggunakan rasio jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja minimal 1 jam secara berturut-turut ataupun mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja di periode pencacahan terhadap total angkatan kerja.

$$TKK = \frac{\text{Jumlah penduduk bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.13)$$

TKK digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu daerah atau wilayah.

Untuk keperluan analisis lebih lanjut, dapat dihitung **laju pertumbuhan kesempatan kerja (r_{KK})**, yaitu perbandingan antara selisih jumlah kesempatan kerja dalam 2 (dua) periode waktu terhadap jumlah kesempatan kerja pada periode waktu awal, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk menyajikan laju pertumbuhan penduduk yang bekerja.

$$r_{KK} = \frac{B_t - B_{t-1}}{B_{t-1}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.14)$$

di mana:

B_t = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t

B_{t-1} = Jumlah penduduk yang bekerja tahun t-1

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran merupakan salah satu target prioritas pembangunan yang perlu diturunkan. Tingkat pengangguran diindikasikan dengan beberapa ukuran. Dalam analisis ini indikator pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Kegunaannya adalah memberi indikasi tentang persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran di suatu daerah atau wilayah.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pencari kerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.15)$$

g. Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)

Dalam neraca ketenagakerjaan biasanya dilihat jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Jika angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja, maka akan terjadi pengangguran. Dengan kata lain, laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan peningkatan laju pertumbuhan pengangguran, demikian pula berlaku sebaliknya.

Secara makro, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Menurut Simanjutak (2001), Elastisitas kesempatan kerja adalah perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi/ produk domestik bruto (regional bruto (PDB/PDRB). Dengan demikian elastisitas kesempatan kerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$E_{KK} = \frac{r_{KK}}{r_{PDRB}} \dots\dots\dots(3.16)$$

di mana:

- E_{KK} = Elastisitas kesempatan kerja
- r_{KK} = Laju pertumbuhan kesempatan kerja
- r_{PDRB} = Laju pertumbuhan ekonomi

Semakin tinggi elastisitas kesempatan kerja berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

h. Produktivitas Tenaga Kerja (PTK)

Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator kemampuan tenaga kerja dalam penciptaan nilai tambah. Pada kajian ini, produktivitas tenaga kerja diukur dengan membandingkan nilai tambah (PDRB) terhadap jumlah tenaga kerja yang terlibat pada setiap sektor. Oleh karena itu, produktivitas tenaga kerja yang dimaksud di sini merupakan produktivitas selama satu tahun.

$$PTK_i = \frac{PDRB_i}{TK_i} \dots\dots\dots(3.17)$$

di mana:

- PTK_i = Produktivitas tenaga kerja sektor ke-i
- $PDRB_i$ = PDRB sektor ke-i
- TK_i = Jumlah tenaga kerja sektor ke-i

Laju pertumbuhan produktivitas menunjukkan perkembangan produktivitas pada kurun waktu tertentu.

3. Indikator Kemiskinan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi lebih berarti jika diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kegiatan perekonomian yang bermuara pada orientasi pemerataan akan mengurangi masalah kemiskinan.

Ukuran kemiskinan secara umum dibedakan atas kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai *"inability of the individual to meet basic needs"* (Tjondronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Konsep tersebut sejalan dengan Amartya Sen (Meier, 1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah *"the failure to have certain minimum capabilities"*. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu mencukupi kebutuhan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin.

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan **nilai standar kebutuhan minimum**, baik untuk makanan dan non makanan, yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai **garis pembatas** untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. Uppal (1985) menyebutkan garis pembatas tersebut sebagai **garis kemiskinan (poverty line)** atau **batas kemiskinan (poverty threshold)**.

Garis kemiskinan sesungguhnya merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara **2.100 kilo kalori per kapita per hari** dan kebutuhan minimum non-makanan yang mendasar, seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang dan jasa lainnya. **Biaya** untuk membayar 2.100 kilo kalori per kapita per hari disebut sebagai **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** dan biaya untuk membayar kebutuhan minimum non makanan mendasar disebut sebagai **Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)**. Individu dengan pengeluaran lebih rendah dari Garis Kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau penduduk miskin. **Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan** merupakan **indikator kemiskinan** yang sering digunakan dan biasa disebut **Head Count Index (HCI)**.

Kajian tentang kemiskinan tidak cukup hanya mempelajari jumlah dan persentase penduduk miskin saja yang diukur dari metode HCI. Salah satu kelemahan metode HCI adalah tidak memperhitungkan kedalaman kemiskinan serta ketimpangan sebaran pada kelompok miskin (*distribution among the poor*). Dua indikator berikut ini merupakan masalah yang menarik untuk dikaji dalam melihat perubahan tingkat hidup penduduk

miskin. Indikator tersebut adalah **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty gap index* atau P_1)** dan **Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index* atau P_2)**.

Penurunan angka pada P_1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman dari insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan dari P_2 mengidentifikasi berkurangnya (membaiknya) ketimpangan di antara penduduk miskin.

Pada tahun 1994 **Foster, Greer, dan Thorbecke (FGT)** memperkenalkan suatu rumusan yang mengandung tiga jenis indikator kemiskinan. Rumusan FGT inilah yang kemudian digunakan sebagai indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan, dengan formula sebagai berikut :

$$P_{\alpha} = (I / N) \sum_{j=1}^Q \left(\frac{Z - Y_j}{Z} \right)^{\alpha} \dots\dots\dots(3.18)$$

di mana: P_{α} = Indeks kemiskinan ($\alpha = 0,1,2$)

N = Jumlah penduduk

Z = Garis kemiskinan

Y_j = Pengeluaran perkapita penduduk di bawah garis kemiskinan Z

Q = Banyaknya penduduk miskin

Pengeluaran penduduk miskin perkapita dapat langsung dihitung dari hasil SUSENAS yang menggambarkan perbedaan antara pengeluaran si miskin (*proxy* pendapatan) dengan garis kemiskinan. Perbedaan tersebut dinyatakan dengan :

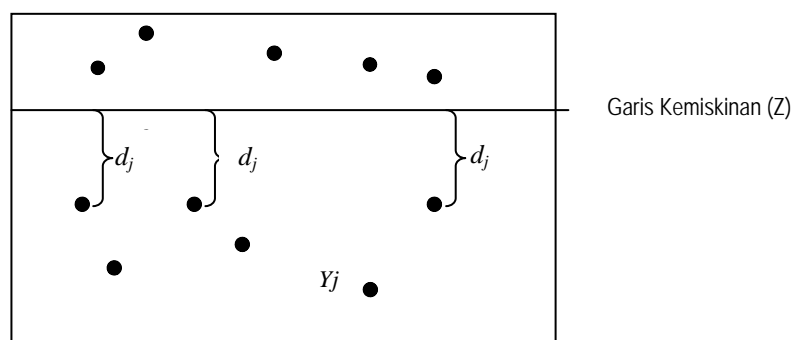
$$d_j = Z - Y_j \dots\dots\dots(3.19)$$

bila persamaan ini dimasukkan ke dalam rumus FGT di atas, maka akan diperoleh :

$$P_{\alpha} = (I / N) \sum_{j=1}^Q \left(\frac{d_j}{Z} \right)^{\alpha} \dots\dots\dots(3.20)$$

dimana d_j/Z disebut **rasio kesenjangan kemiskinan (*poverty gap ratio*)**.

Gambar 3.4
Plot Pengeluaran Per kapita dan Garis Kemiskinan



Gambar 3.4 adalah *plotting* pengeluaran per kapita (Y_j) dengan garis kemiskinan (Z). Jarak antara pengeluaran perkapita penduduk miskin terhadap batas kemiskinan ditunjukkan oleh setiap titik d_j yang terdistribusikan di bawah garis kemiskinan. **Golongan penduduk sekitar garis miskin** relatif lebih mudah ditanggulangi, tetapi **rentan terhadap perubahan harga**. Jika harga naik menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke atas, maka mereka yang berada di atas garis kemiskinan akan mudah jatuh ke dalam kategori penduduk miskin. Sebaliknya, jika terjadi penurunan harga menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke bawah, maka mereka akan masuk ke dalam kategori penduduk tidak miskin. Golongan penduduk seperti inilah yang dikenal sebagai ***the near non-poor*** yang sensitif terhadap perubahan harga.

Dari rumusan FGT diperoleh tiga macam indeks, yaitu :

- i. Jika $\alpha = 0$ maka $P_0 = Q/N$ rasio ini tidak lain adalah **Head Count Index**, dan bila dikalikan dengan 100 menjadi **persentase penduduk miskin**. Jika 20 persen dari total penduduk diklasifikasikan sebagai miskin, maka $P_0 = 0,2$.
- ii. Jika $\alpha = 1$ maka P_1 menunjukkan ukuran **Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty gap index*)**. P_1 merupakan persentase rata-rata kesenjangan antar pengeluaran penduduk miskin di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah seluruh penduduk (baik yang di bawah atau di atas garis kemiskinan). Misal $P_1 = 0,15$ ini berarti bahwa kesenjangan antara total pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, jika dirata-ratakan terhadap seluruh rumah tangga (baik rumah tangga miskin atau tidak miskin) adalah sebesar 15 persen. Karena nilai P_1 belum menggambarkan kesenjangan riil yang dihadapi oleh penduduk miskin, maka nilai P_1 harus dikoreksi dengan jumlah penduduk yang berada di atas GK dengan rumus:

$$\frac{P_1}{P_2} = \sum_{j=1}^Q \left(\frac{(Z - Y_j)}{Q} \right) \dots\dots\dots(3.21)$$

Rasio P_1/P_2 merupakan persentase rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain rasio tersebut merupakan rata-rata kesenjangan taraf hidup yang diukur dengan pengeluaran.

- iii. Jika $\alpha = 2$ maka P_2 menunjukkan ukuran **Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index* atau *distribution sensitive index*)** yang menggambarkan ketimpangan antar penduduk miskin. Tidak seperti dua ukuran terdahulu, ukuran ini sensitif terhadap penyebaran pengeluaran (*proxy* pendapatan) yang terjadi di antara penduduk miskin, dan juga dapat dipakai untuk mengetahui intensitas kemiskinan (*severity*). Ukuran ini dianggap yang paling memenuhi aksioma-aksioma untuk ukuran kemiskinan yang diinginkan oleh berbagai literatur, termasuk *Amartya Sen* (1976) dengan '*transfer axiom*'-nya, yaitu jika terjadi transfer

pengeluaran dari penduduk miskin kepada penduduk yang lebih miskin berarti secara rata-rata telah terjadi suatu penurunan kemiskinan (BPS, 1992).

4. Indikator Ketimpangan (Disparitas)

a. Ketimpangan Pendapatan

Para pengamat ekonomi banyak yang menaruh perhatian pada permasalahan distribusi pendapatan atau pembagian pendapatan seperti diawali oleh *Sundrum* (1973) serta *King* dan *Weldon* (1975). Dalam waktu relatif singkat bermunculan para ahli ekonomi yang melakukan penelitian seperti *Hendra Esmara* (1974 dan 1978), kemudian *Parera* (1977) atau *Sam F. Poli* (1978). Tetapi sebagian besar hanya bertujuan mengetahui gambaran ketimpangan/ kesenjangan/ *gap* dalam pembagian pendapatan, yang biasanya dinyatakan dalam ukuran **Gini Ratio**. Sedangkan pengukuran jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan di antara mereka masih jarang dilakukan.

Selama ini, pemerintah di banyak negara berkembang dalam kebijakan politik dan ekonominya lebih menekankan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dalam upaya terciptanya kemakmuran bagi penduduknya. Terdapat dua pilihan antara: memperbesar 'kue' terlebih dahulu, baru kemudian dibagi merata, atau dilakukan pembagian secara merata terlebih dahulu berapapun besar 'kue' yang diperoleh. Namun terlepas dari polemik dikhotomi tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih berarti jika terjadi pemerataan yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat luas.

a.1. Rasio Gini (*Gini Ratio*)

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Ide dasar perhitungan Rasio Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (selanjutnya disebut **Kurva Lorenz**) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Secara ilustrasi, luas kurva Lorenz merupakan luas daerah di bawah garis diagonal yang dibatasi dengan kurva pada suatu persegi empat. Perbandingan antara luas daerah Kurva Lorenz dengan luas daerah di bawah garis diagonal dapat diperoleh nilai Rasio Gini. Secara matematis, untuk menghitung Rasio Gini dapat menggunakan persamaan berikut :

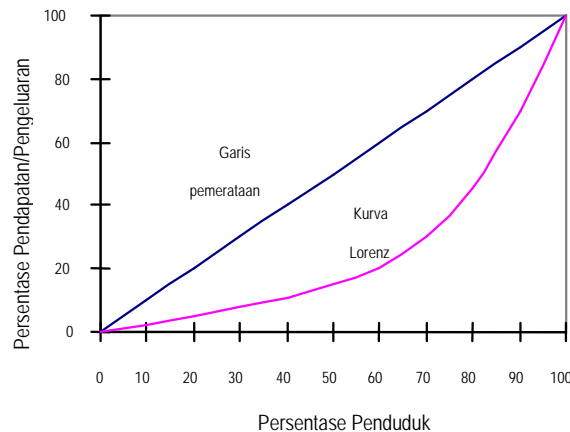
$$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000} \dots\dots\dots(3.22)$$

di mana : P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i
 Q_i = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran pada kelas pengeluaran ke-i
 k = Jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk.

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin **mendekati 1** maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati **ketimpangan sempurna**. Sebaliknya, semakin **mendekati 0** distribusi pendapatan penduduk semakin

merata, atau mendekati **pemerataan sempurna**. Menurut **Harry T. Oshima**, nilai Rasio Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Rasio Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “**rendah**”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “**moderat**”; dan jika nilainya **lebih besar dari 0,5** dikatakan berada dalam ketimpangan “**tinggi**”.

Gambar 3.5. Kurva Lorenz



a.2. Ketimpangan Kriteria Bank Dunia (KBD)

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Ukuran ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok pendapatan, yakni kelompok 40 persen berpendapatan terendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi.

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dengan batasan sebagai berikut :

- Tingkat ketimpangan **rendah**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan.
- Tingkat ketimpangan **moderat**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 12 sampai dengan 17 persen jumlah pendapatan.
- Tingkat ketimpangan **tinggi**, jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima **kurang dari 12** persen jumlah pendapatan.

b. Ketimpangan Sektoral Antar Kabupaten/Kota

Selain tingkat ketimpangan pendapatan, disparitas ekonomi juga dapat digambarkan dengan disparitas sektoral antar wilayah. Indikator disparitas antar wilayah merupakan ukuran yang menunjukkan ada atau tidaknya kesenjangan antar wilayah dalam hal potensi ekonomi, keberhasilan pembangunan, atau kombinasi antara berbagai aspek secara sektoral.

• **Indeks Ketimpangan Regional**

Indeks Williamson adalah salah satu ukuran ketimpangan antar wilayah (region). Pengukuran ini didasarkan pada variasi hasil-hasil pembangunan ekonomi antar region (yang berupa besaran PDRB). Kriteria pengukuran adalah: semakin besar nilai indeks, semakin besar pula tingkat perbedaan ekonomi masing-masing region dengan rata-ratanya; sebaliknya, **semakin kecil nilai indeks menunjukkan tingkat pemerataan antar region yang semakin baik.**

Indeks Williamson dirumuskan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}} \dots\dots\dots(3.23)$$

di mana:

- IW : Indeks Williamson
- y : Rata-rata pendapatan (PDRB) di Provinsi DIY
- y_i : Rata-rata pendapatan (PDRB) di region ke-i
- f_i/n : Proporsi jumlah penduduk region ke-i terhadap jumlah penduduk Provinsi DIY
- i : 1,2, ..., 5 (Kabupaten/ kota di Provinsi DIY).

• **Analisis Pergeseran (*Shift Share Analysis*)**

Analisis Shift-Share (SS) merupakan salah satu metode analisis penting yang umum digunakan dalam studi-studi ekonomi regional. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan regional, menelusuri jejak kecondongan dan sebab-sebab perubahan dalam lapangan kerja, serta menentukan besar dan arah perubahan industri regional. Disamping itu analisis SS juga digunakan sebagai alat dalam analisis deskriptif untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi regional dan sebagai alat analisis dalam riset pembangunan pedesaan.

Analisis Shift-Share (SS) merupakan teknik yang relatif sederhana untuk mengevaluasi posisi relatif dan perubahan struktur suatu perekonomian lokal (misalnya kabupaten atau propinsi) dalam hubungannya dengan perekonomian acuan (nasional). Metode analisis ini bertitik tolak pada anggapan dasar bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yakni:

- i. **Pertumbuhan nasional (*national growth component*)**, perubahan output atau pendapatan (atau indikator ekonomi lainnya seperti jumlah kesempatan kerja) suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahan nasional secara umum, perubahan kebijaksanaan ekonomi nasional, atau perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian seluruh wilayah dan sektor secara seragam.

- ii. **Pertumbuhan sektoral (*industrial mix component*)**, timbul karena perbedaan permintaan output akhir, ketersediaan bahan baku, kebijaksanaan sektoral, serta perilaku dan kinerja struktur pasar setiap sektor nasional.
- iii. **Pertumbuhan daya saing wilayah (*competitive effect component*)**, terjadi karena peningkatan atau penurunan output atau pendapatan suatu wilayah yang lebih cepat atau lambat dari wilayah lainnya.

Perubahan nilai tambah bruto (NTB) atau PDRB suatu sektor *i* di suatu wilayah *j* dalam 2 periode, yaitu periode *o* dan periode *t* dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta Q_{ij}^t = Q_{ij}^t - Q_{ij}^o$$

$$\Delta Q_{ij}^t = Q_{ij}^o (Y_t/Y_o - 1) + Q_{ij}^o (Q_i^t/Q_i^o - Y_t/Y_o) + Q_{ij}^o (Q_{ij}^t/Q_{ij}^o - Q_i^t/Q_i^o) \quad \dots\dots\dots (3.24)$$

Dari persamaan diatas dapat kita asumsikan bahwa pertumbuhan suatu sektor pada suatu wilayah disebabkan oleh 3 komponen pertumbuhan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu:

Keterangan:

- PR_{ij} = Pangsa Regional sektor *i* pada wilayah *j*
- PS_{ij} = Proportional Shift (pergeseran proporsional) sektor ke-*i* pada wilayah *j*
- DS_{ij} = Different Shift (pergeseran yang berbeda) sektor ke-*i* pada wilayah *j*
- Y_o dan Y_t = Total PDRB Wilayah pada tahun 0 dan pada tahun *t*
- Q_{ij}^o dan Q_{ij}^t = PDRB sektor *i* propinsi *j* pada tahun 0 dan pada tahun *t*
- Q_i^o dan Q_i^t = Total PDRB Wilayah sektor *i* pada tahun 0 dan pada tahun *t*

$$PR_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Y_t}{Y_o} - 1 \right\} \quad \dots\dots\dots (3.25)$$

$$PS_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Q_i^t}{Q_i^o} - \frac{Y_t}{Y_o} \right\} \quad \dots\dots\dots (3.26)$$

$$DS_{ij} = Q_{ij}^o \left\{ \frac{Q_{ij}^t}{Q_{ij}^o} - \frac{Q_i^t}{Q_i^o} \right\} \quad \dots\dots\dots (3.27)$$

Analisis SS dapat dibagi ke dalam 2 bagian:

1) Analisis Pangsa Regional (*Share Analysis*)

Untuk melihat struktur atau posisi relatif provinsi-provinsi atau kabupaten-kabupaten dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Indonesia atau di tingkat propinsi. Sebagai indikator bisa dipergunakan nilai output, nilai tambah, atau jumlah tenaga kerja yang bekerja. Share analysis akan mengukur proporsi dari, misalnya,

PDRB kabupaten terhadap PDRB propinsi. Oleh sebab itu bila nantinya ditemukan satu atau beberapa kabupaten di suatu propinsi memiliki pangsa yang tinggi maka kabupaten tersebut dikatakan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB propinsi. Disamping itu analisis ini juga digunakan untuk melihat peranan/kontribusi sektor yang signifikan di suatu wilayah.

2) Analisis Pergeseran (*Shift Analysis*)

Dalam analisis pertumbuhan regional komponen pergeseran lebih penting daripada komponen PR. Total pergeseran (total shift) terdiri dari:

- ∞ Perubahan secara proporsional atau Proportionality Shift (PS) mengukur sejauh mana laju pertumbuhan pada suatu sektor di suatu wilayah berbeda dengan pertumbuhan sektor yang sama di tingkat wilayah. Jadi PS memperlihatkan struktur ekonomi dan perubahannya di suatu wilayah.
- ∞ Perubahan yang berbeda atau Different Shift (DS) terjadi apabila laju pertumbuhan pada suatu sektor di suatu wilayah lebih tinggi daripada laju pertumbuhan pada sektor yang sama di wilayah lain. Perbedaan ini mencerminkan posisi keuntungan lokasi (*locational advantage position*) suatu wilayah yang mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan satu atau beberapa sektor tertentu di wilayah tersebut.

Berdasarkan besaran PS dan DS beberapa wilayah dalam suatu daerah dapat di kelompokkan ke dalam 4 kategori sebagai berikut:

Kategori I (PS positif dan DS positif) adalah wilayah dengan pertumbuhan sangat pesat (*rapid growth region*),

Kategori II (PS negatif dan DS positif) adalah wilayah yang pertumbuhannya tertekan tapi berkembang (*depressed region* yang berkembang),

Kategori III (PS positif dan DS negatif) adalah wilayah yang tertekan namun cenderung berpotensi (*depressed region* yang berpotensi)

Kategori IV (PS dan DS negatif) adalah wilayah *depressed region* dengan daya saing lemah dan juga peranan terhadap wilayah rendah.

Keunggulan analisis *shift share* antara lain:

1. Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau analisis *shift share* tergolong sederhana.
2. Memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat.
3. Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

Kelemahan Analisis *Shift-Share*, yaitu:

1. Hanya dapat digunakan untuk analisis *ex-post*.
2. Masalah *benchmark* berkenaan dengan *homothetic change*, apakah t atau $(t+1)$ tidak dapat dijelaskan dengan baik.
3. Ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak terungkap.
4. Analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan, mengingat bahwa *regional shift* tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya.
5. Tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antarsektor.
6. Tidak ada keterkaitan antardaerah.

BAB 4

PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

- A. Hasil Penghitungan PDRB Tahun Dasar 2010 Daerah Istimewa Yogyakarta
- B. Struktur Perekonomian PDRB seri 2010
- C. Pertumbuhan Ekonomi
- D. PDRB Per Kapita
- E. Inflasi IHK dan Inflasi PDRB
- F. Indeks Perkembangan Kategori
- G. Perbandingan Nilai PDRB Antar Kabupaten/Kota
- H. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi

BAB IV

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) MENURUT LAPANGAN USAHA

A. Hasil Penghitungan PDRB Tahun Dasar 2010 Daerah Istimewa Yogyakarta

Penghitungan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan tahun dasar 2010 yang telah mengadopsi SNA 2008 dan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 meningkat cukup signifikan yaitu dari Rp. 45.625,6 miliar menjadi Rp. 64.679,0 miliar atau meningkat sebesar 42 persen. Peningkatan yang cukup tinggi ini disebabkan perubahan *coverage*, perubahan metodologi yang disebabkan penggunaan SNA 2008, maupun perubahan volume dan harga karena perapihan data yang tersedia.

Dilihat dari sektor-sektor yang membentuk PDRB itu sendiri peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada sektor angkutan dan komunikasi terutama pada subsektor komunikasi akibat membanjirnya penemuan-penemuan baru pada teknologi komunikasi. Sektor berikutnya yang juga mengalami peningkatan cukup besar adalah jasa-jasa terutama terjadi pada jasa pendidikan.

Sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan yang menurut SNA 2008 dipisah menjadi tiga kategori yaitu pertama jasa keuangan yang didalamnya terdapat bank, asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan lainnya dan jasa ketiga adalah **jasa perusahaan juga naik cukup signifikan akibat penyesuaian dan penunjang keuangan**, kategori kedua adalah real estate dan kategori metode penghitungan dan perbaikan cakupan data. Penggunaan metode penghitungan ***Financial Intermediary Services Indirectly Measured*** (FISIM) pada subsektor bank ***dari Imputed Bank Services Charge*** (IBSC) menjadi penyebab perbedaan angka ini. Satu-satunya sektor yang mengalami penurunan nilai akibat penyesuaian tahun dasar ini adalah sektor listrik gas dan air yang disebabkan penggunaan metode penghitungan dengan ***basic price*** atau harga dasar yang artinya harga keekonomian barang sebelum adanya intervensi pemerintah.

Secara rinci perubahan yang terjadi pada PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Perbandingan angka PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut kategori Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB 2010 seri 2000		
Lapangan Usaha	Seri 2000	
	(Miliar Rp)	(%)
1 Pertanian	6.644,70	14,56
2 Pertambangan dan Penggalian	304,7	0,67
3 Industri Pengolahan	6.396,60	14,02
4 Listrik, Gas, dan Air	607,1	1,33
5 Konstruksi	4.833,40	10,59
6 Perdagangan, Hotel, dan Restoran	9.008,20	19,74
7 Pengangkutan dan Komunikasi	4.120,00	9,03
8 Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan	4.552,70	9,98
9 Jasa-jasa	9.158,30	20,07
PDRB	45.625,60	100

Perbedaan (Triliun Rp)	19.053,38
Perbedaan (Persen)	41,76

PDRB 2010 seri 2010		
Lapangan Usaha	Seri 2010	
	(Miliar Rp)	(%)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.252,6	11,21
2 Pertambangan dan Penggalian	406,7	0,63
3 Industri Pengolahan	9.215,5	14,25
4 Pengadaan Listrik, Gas	94,7	0,15
5 Pengadaan Air	76,1	0,12
6 Konstruksi	6.183,4	9,56
7 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.146,5	7,96
8 Transportasi dan Pergudangan	3.651,7	5,65
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.740,1	8,88
10 Informasi dan Komunikasi	6.184,5	9,56
11 Jasa Keuangan	2.037,4	3,15
12 Real Estate	4.498,3	6,96
13 Jasa Perusahaan	722,5	1,12
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.777,7	7,39
15 Jasa Pendidikan	5.428,1	8,39
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.540,1	2,38
17 Jasa Lainnya	1.723,1	2,66
PDRB	64.679,0	100

Sektor pertanian tidak mengalami perubahan pengelompokan namun perubahan cakupan data relatif signifikan yaitu akibat mengadopsi *Cultivated Biological Resources* (CBR), namun untuk kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas perkebunan yang sangat terbatas konsep ini tidak terlalu berpengaruh terhadap angka PDRB. Sektor pertambangan dan penggalian yang juga secara konsep ada pengembangan dengan memasukkan eksplorasi mineral menjadi kegiatan ekonomi juga tidak berpengaruh terhadap angka PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta, karena kegiatan pertambangan yang relatif tidak ada.

Menurut sisi pengeluaran, nomenklatur dan tampilan PDRB tidak mengalami perubahan namun untuk PDB terjadi pemisahan komponen konsumsi rumahtangga menjadi konsumsi lembaga non profit rumahtangga dan komponen konsumsi rumahtangga. Beberapa komponen mengalami peningkatan nilai yang signifikan seperti konsumsi rumahtangga akibat perapian data dengan memasukkan pengeluaran rumahtangga yang sebelumnya masih under coverage seperti biaya konsumsi rumahtangga untuk penyelenggaraan haji, umrah dan lain-lain. Disamping itu SNA 2008 juga menggindikasikan untuk memasukkan pengeluaran-pengeluaran yang digunakan sendiri tapi mempunyai nilai ekonomi, sehingga harus dilakukan imputasi.

Komponen yang mengalami perubahan akibat adopsi SNA ini adalah PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto). Beberapa perubahan yang harus dilakukan adalah memasukkan CBR sebagai PMTB, begitu juga dengan biaya eksplorasi mineral dan biaya Human and Research Development.

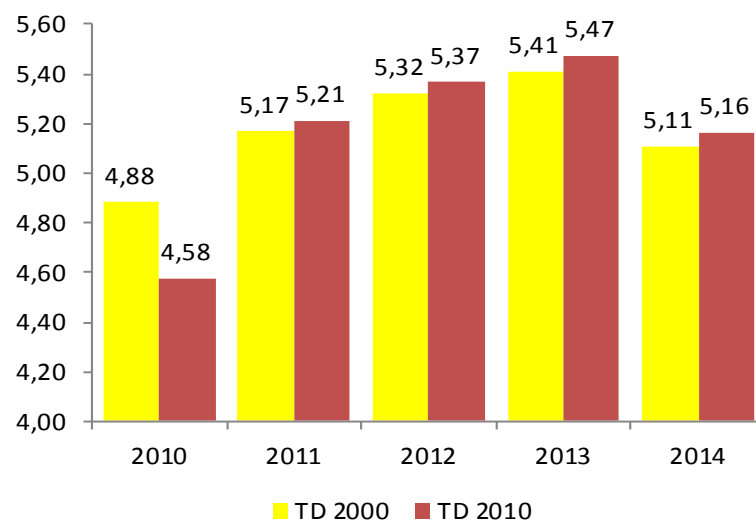
Tabel 4.2. Perbandingan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB 2010 seri 2000			PDRB 2010 seri 2010		
Rincian	Seri 2000		Rincian	Seri 2010	
	(Miliar Rp)	(%)		(Miliar Rp)	(%)
1 Konsumsi Rumah tangga	23.198,96	50,85	1 Konsumsi Rumah tangga	38.763,25	50,85
2 Konsumsi LNPRT	1.437,47	3,15	2 Konsumsi LNPRT	1.529,99	3,15
3 Konsumsi Pemerintah	11.717,42	25,68	3 Konsumsi Pemerintah	9873,89	25,68
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	15.027,84	32,94	4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	17.434,82	32,94
5 Perubahan Inventori	1.458,39	3,20	5 Perubahan Inventori	567,13	3,20
6 Ekspor Barang dan Jasa	17.873,36	39,17	6 Ekspor	28.217,12	39,17
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	25.087,86	54,99	7 Impor	31.707,24	54,99
PDRB	45.625,59	100	PDRB	64.678,97	100

Perbedaan (Triliun Rp)	19.053,38
Perbedaan (Persen)	41,76

Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan tahun dasar 2010 tidak mengalami perubahan yang berarti. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 hingga tahun 2014 terjelaskan pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1. Perbandingan Pertumbuhan PDRB DI Yogyakarta Tahun Dasar 2000 dan 2010

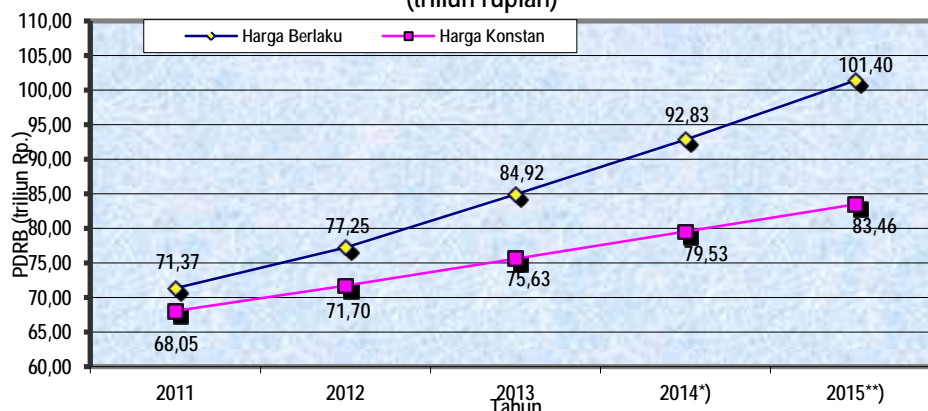


Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi DI.Yogyakarta lebih rendah jika dihitung menggunakan tahun dasar 2010. Namun pada tahun 2011 hingga 2014 pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan tahun dasar 2010 lebih tinggi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya perbedaan tersebut utamanya disebabkan oleh meluasnya cakupan kegiatan ekonomi pada penghitungan dengan menggunakan tahun dasar 2010.

B. Struktur Perekonomian PDRB

Kinerja perekonomian DIY masa mendatang tampaknya memberikan harapan yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan daerah. Hal ini terlihat dari kecenderungan peningkatan perekonomian DIY selama kurun waktu 2011-2015 (Gambar 4.2). Berdasarkan penghitungan tahun dasar 2010, secara nominal PDRB DIY atas dasar harga berlaku tahun 2015 telah meningkat sekitar 30 triliun rupiah dibanding tahun 2011. Sementara nilai PDRB tahun 2015 atas dasar harga konstan juga naik sekitar 15,4 triliun rupiah.

Gambar 4.2. Produk Domestik Regional Bruto D.I Yogyakarta,
2011-2015
(triliun rupiah)



Struktur perekonomian DIY tahun 2015 yang diukur dari distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku memberikan gambaran bahwa perekonomian DIY tidak didominasi oleh satu atau beberapa lapangan usaha tertentu. Kontribusi terbesar masing-masing lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB DIY tahun 2015 tidak lebih dari 14 persen. Tiga lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah industri pengolahan (13,05 persen); pertanian, kehutanan dan perikanan (10,70 persen); dan penyediaan akomodasi dan makan minum (10,24 persen). Sementara, tiga lapangan usaha yang memiliki kontribusi terendah adalah pengadaan listrik dan gas (0,09 persen), pengadaan air (0,11 persen); serta pertambangan dan penggalan (0,57 persen).

Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan yang besar terutama berasal dari kontribusi golongan pokok industri pengolahan makanan dan minuman. Dilihat secara

mikro, industri skala besar seperti PT. Srihusada dan PT. Madukismo cukup nyata memberikan sumbangan ekonomi daerah. Di samping itu aneka jenis industri kecil dan rumah tangga merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk D.I. Yogyakarta selain pertanian. Sementara itu golongan pokok pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian merupakan penyumbang terbesar kategori pertanian dalam kontribusinya terhadap PDRB.

Tabel 4.3 Distribusi Persentase PDRB D.I. Yogyakarta menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2011 – 2015 (persen)

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian	10,94	11,19	11,13	10,52	10,70
2	Pertambangan dan Penggalian	0,64	0,60	0,58	0,58	0,57
3	Industri Pengolahan	14,40	13,26	13,62	13,59	13,05
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,13	0,12	0,10	0,10	0,09
5	Pengadaan Air	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
6	Konstruksi	9,51	9,52	9,49	9,40	9,37
7	Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	8,14	8,30	8,17	8,27	8,23
8	Pengangkutan dan Pergudangan	5,50	5,51	5,63	5,72	5,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,05	9,32	9,75	10,04	10,24
10	Informasi dan Komunikasi	9,39	9,49	8,92	8,51	8,13
11	Jasa Keuangan	3,38	3,49	3,73	3,88	3,97
12	Real Estat	6,85	7,03	6,85	7,00	7,05
13	Jasa Perusahaan	1,10	1,08	1,01	1,03	1,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	7,32	7,68	7,89	8,07	8,23
15	Jasa Pendidikan	8,48	8,24	8,03	8,19	8,48
16	Jasa Kesehatan	2,45	2,50	2,47	2,45	2,52
17	Jasa-jasa Lainnya	2,62	2,57	2,53	2,53	2,55
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

Kategori atau lapangan usaha penyediaan akomodasi makanan dan minuman merupakan lapangan usaha yang favorit. Pada saat musim liburan, Yogyakarta yang merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia aktivitas usaha-usaha yang tercakup dalam lapangan usaha ini sangat padat. Golongan pokok usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi penyumbang utama lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB DIY. Sementara itu golongan pokok usaha penyediaan akomodasi memberikan sumbangan sekitar seperlima dari kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB DIY.

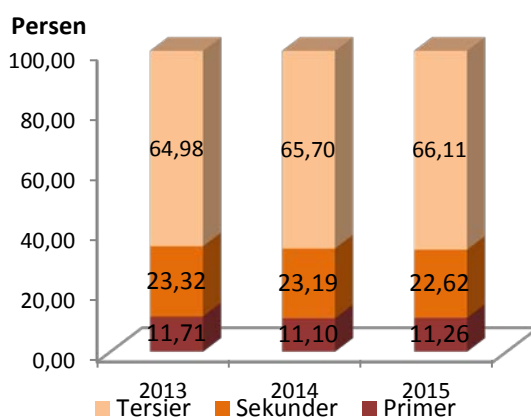
Enam kategori usaha ekonomi menjadi pelapis kedua dalam struktur ekonomi DIY, yaitu konstruksi, jasa pendidikan, jasa administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, perdagangan dan reparasi mobil dan motor, informasi dan komunikasi, dan real estat. Kontribusi masing-masing kategori terhadap total PDRB berkisar antara 7 sampai dengan 9 persen.

Melihat tiga kategori usaha sebagai penyumbang utama dan enam kategori pada kelompok pelapis kedua tersebut memperlihatkan bahwa struktur perekonomian DIY menunjukkan ciri khas yang berbeda dengan daerah lain. Kondisi ini juga selaras dengan Visi DIY dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu **“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”**. Demikian pula dikaitkan kondisi ekonomi DIY tersebut juga mempunyai keterpaduan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 yaitu **“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”**.

Berdasarkan sifat output barang yang dihasilkan, 17 kategori lapangan usaha PDRB dapat diagregasi dalam tiga kelompok besar, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Disebut sektor primer bila outputnya masih tergantung pada sumber daya alam. Yang termasuk sektor primer adalah lapangan usaha pertanian dan pertambangan. Lapangan usaha yang input utamanya berasal dari sektor primer disebut sektor sekunder. Yang termasuk sektor sekunder ini adalah lapangan usaha industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air; dan konstruksi. Sementara lapangan usaha lainnya, yaitu perdagangan dan reparasi mobil dan motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; real estat; jasa perusahaan; jasa pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan; dan jasa lainnya dikelompokkan ke dalam sektor tersier.

Selama tiga tahun terakhir, komposisi kelompok sektor penyusun PDRB relatif sama. Proporsi sektor primer dan sektor sekunder terhadap total PDRB cenderung semakin berkurang, sebaliknya sektor tersier semakin besar proporsinya karena mengambil alih pengurangan peran sektor primer dan sekunder tersebut. Pada tahun 2015 sektor tersier memegang peran hampir dua pertiga dari total PDRB.

Gambar 4.3. Distribusi Persentase PDRB D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kelompok Sektor, 2013- 2015 (persen)



Pergeseran perubahan struktur ekonomi terjadi secara pelan namun pasti. Dulunya lapangan usaha pertanian menjadi andalan namun semakin tergeser. Demikian pula peran lapangan usaha pertambangan dan penggalian juga semakin berkurang, apalagi ada Peraturan Daerah (Perda) yang melarang penggalian pasir tanpa ijin di Sungai Progo semakin menambah terdesaknya mata pencaharian usaha penggalian.

Kecenderungan menurunnya peran kategori (lapangan usaha) di kelompok sektor primer juga terjadi di kelompok sektor sekunder. Keseluruhan lapangan usaha yang tergabung dalam kelompok sektor sekunder (empat lapangan usaha) kontribusinya cenderung semakin menurun.

Penurunan kontribusi yang terjadi pada sektor primer dan sektor sekunder menyebabkan meningkatnya kontribusi sektor tersier. Kecenderungan meningkatnya peran sektor tersier terutama terjadi tujuh lapangan usaha dari sebelas lapangan usaha di sektor tersier. Penguatan peran paling konsisten terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum dan bila dilihat golongan pokoknya bersumber pada golongan usaha penyediaan makan minum, seperti restoran, warung makan, kedai makan dan minum, dan sejenisnya.

C. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan

Laju pertumbuhan ekonomi (*rate of economic growth*) menunjukkan tingkat keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam meningkatkan output ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi dari suatu waktu ke waktu yang lain. Jika laju pertumbuhan ekonomi dihitung dari besarnya PDRB atas dasar harga berlaku, maka laju pertumbuhan ekonomi tersebut dianggap kurang pas untuk ditampilkan karena perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah dari satu tahun ke tahun juga dipengaruhi oleh perubahan perubahan harga-harga. Oleh karena itu agar PDRB dapat mengukur laju pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya (*the real economic growth*), maka pengaruh perubahan harga-harga dalam PDRB perlu dihilangkan, dan kondisi ini dapat tercapai dengan melakukan penghitungan laju pertumbuhan ekonomi dari PDRB atas dasar harga konstan. Oleh karena itu seperti dijelaskan dalam metodologi, laju pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dengan membandingkan besarnya PDRB atas dasar harga konstan suatu tahun dengan tahun yang lain untuk menghilangkan faktor kenaikan harga dalam penghitungan laju pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi menjelaskan capaian keberhasilan pembangunan secara makro dan digunakan sebagai tolok ukur dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan serta intervensi kebijakan. Laju dan andil pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari indikator ekonomi yang dapat diamati menurut kategori maupun dari sisi penggunaan nilai tambah serta secara spasial antarwilayah kabupaten/kota.

1. Pertumbuhan menurut Kategori

PDRB dengan seri penghitungan 2010 sudah mengaplikasikan SNA2008. Salah satu implikasinya adalah adanya perubahan nomenklatur penggolongan maupun penggunaan istilah dari sektor menjadi industri atau kategori atau masih bisa juga menggunakan istilah lapangan usaha.

Pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2015 sebesar 4,9 persen, sedikit melambat dibanding pertumbuhan tahun 2014 yang sebesar 5,2 persen. Kecenderungan melambatnya pertumbuhan ekonomi sudah dirasakan sejak dua tahun terakhir. Melambatnya pertumbuhan di tahun 2015 diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan hampir semua lapangan usaha kecuali pertanian dan jasa keuangan.

Tabel 4.4. Pertumbuhan Ekonomi menurut Kategori di DI Yogyakarta 2011–2015, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2011-2015, dan Andil Pertumbuhan Tahun 2015 (persen)

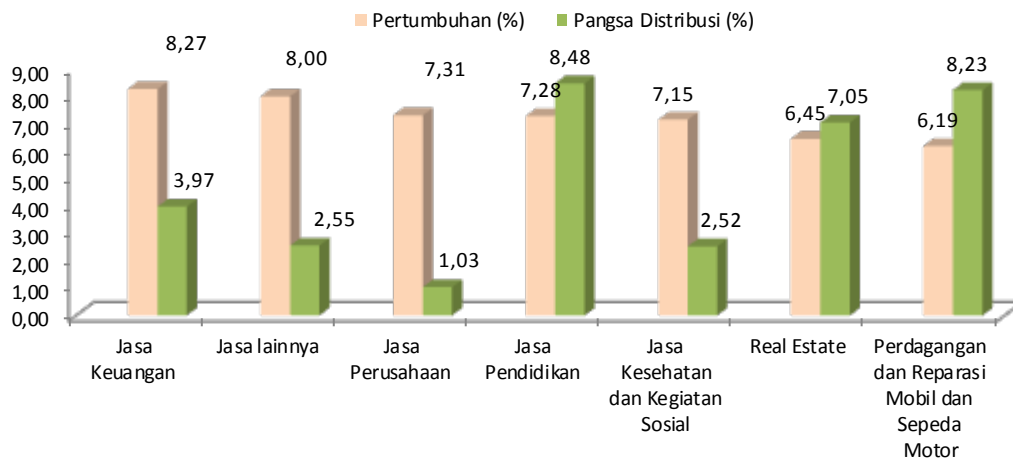
Kategori/Industri/Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014 ^{*)}	2015 ^{*)}	Rata-rata 2011-2015	Andil Pertumbuhan 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	-1,63	5,13	2,26	-2,10	2,60	1,94	0,25
2. Pertambangan & Penggalian	7,28	1,67	3,92	2,11	0,13	1,95	0,00
3. Industri Pengolahan	5,39	-2,84	6,87	3,82	1,75	2,34	0,23
4. Pengadaan Listrik, Gas	5,63	10,20	6,08	3,67	-1,32	4,57	0,00
5. Pengadaan Air	0,31	3,46	0,95	3,91	2,90	2,80	0,00
6. Konstruksi	4,85	4,46	4,94	5,65	4,24	4,82	0,40
7. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor	5,12	8,66	5,26	5,69	6,19	6,44	0,51
8. Pengangkutan & Pergudangan	3,94	4,73	6,10	3,80	3,73	4,59	0,21
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,69	6,82	7,13	6,79	5,77	6,63	0,54
10. Informasi dan Komunikasi	9,55	10,74	6,22	6,13	5,11	7,03	0,54
11. Jasa Keuangan	11,33	3,23	11,50	8,27	8,27	7,78	0,29
12. Real Estat	4,47	8,88	4,01	7,77	6,45	6,76	0,46
13. Jasa Perusahaan	6,57	7,99	3,27	7,61	7,31	6,53	0,08
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,64	7,49	4,94	5,90	5,18	5,87	0,39
15. Jasa Pendidikan	7,62	5,26	4,58	7,91	7,28	6,25	0,64
16. Jasa Kesehatan	6,52	9,18	7,00	7,65	7,15	7,74	0,19
17. Jasa Lainnya	6,83	4,28	4,86	5,29	8,00	5,60	0,21
PDRB	5,21	5,37	5,47	5,16	4,94	5,24	4,94

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

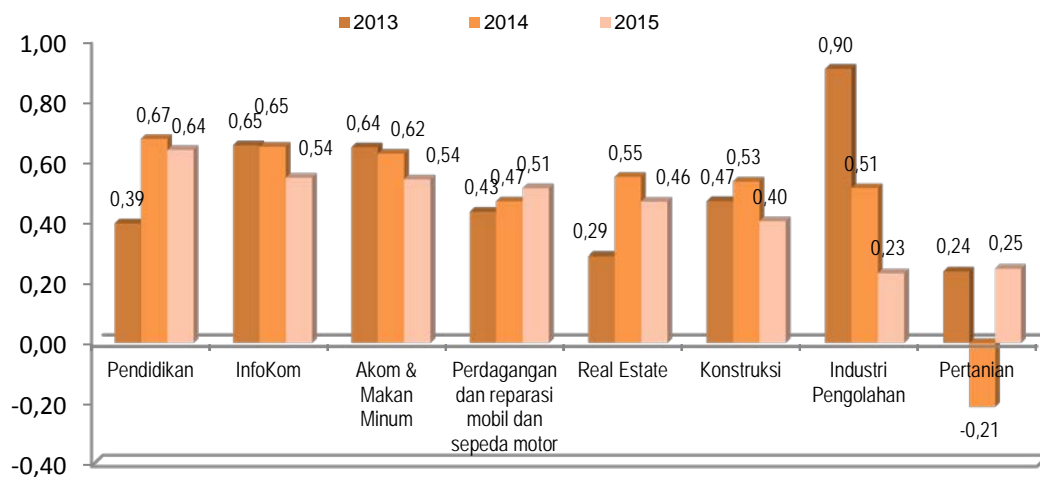
Ket: *) angka sementara; **) angka sangat sementara

Pada tahun 2015, kategori di kelompok sektor tersier menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih cepat terutama yang tergolong kategori jasa-jasa. Tiga kategori dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah jasa keuangan, jasa lainnya, dan jasa perusahaan. Selain itu jasa pendidikan dan jasa kesehatan juga tumbuh di atas 7 persen. Di jasa keuangan penggerak utama pertumbuhan masih dari aktivitas perbankan, di samping jasa keuangan lainnya yang sedang dalam tren pertumbuhan meningkat.

Grafik 4.4. Pertumbuhan dan Pangsa Distribusi Beberapa Lapangan Usaha 2015



Grafik 4.5. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha, 2013-2015



Potensi kategori ekonomi daerah dapat juga dilihat dari pangsa distribusi yang dikaitkan dengan pertumbuhannya. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.3 bahwa kategori jasa pendidikan mempunyai potensi paling kuat karena disamping mempunyai kontribusi yang cukup besar tampak bahwa pertumbuhannya juga termasuk tinggi. Kategori yang mempunyai level potensi yang hampir sama adalah perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor, kemudian diikuti kategori real estat.

Diamati lebih lanjut peran masing-masing kategori terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro dapat dilihat dari andil pertumbuhannya. Masing-masing lapangan usaha memberikan andil yang bervariasi terhadap pertumbuhan ekonomi DIY 2015. Searah dengan potensi kategorinya, lapangan usaha jasa pendidikan memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY 2015 yang sebesar 4,94 persen, andilnya sebesar 0,64 persen. Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum

serta lapangan usaha informasi dan komunikasi dengan andil masing-masing sebesar 0,54 persen. Sementara lapangan usaha perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor mempunyai andil sebesar 0,51 persen. Selain empat kategori atau lapangan usaha yang memberikan andil terbesar tersebut, andil pertumbuhan lapangan usaha real estat, jasa administrasi pemerintahan, dan konstruksi berada pada berikutnya melampaui besaran andil pertumbuhan lapangan usaha pertanian yang menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk DIY.

2. Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota

Wilayah DIY yang secara administrasi terdiri dari empat kabupaten dan satu kota menunjukkan bahwa DIY dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia luasnya relatif kecil. Meskipun nilai PDRB mempunyai besaran nilai yang berbeda-beda, namun pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di DIY pada tahun 2015 berada pada kisaran 4,64-5,31 persen. Dibanding tahun sebelumnya, kesenjangan pertumbuhan antar kabupaten/kota semakin menyempit. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai Kabupaten Sleman, yakni sebesar 5,31 persen, kemudian diikuti Kota Yogyakarta yang tumbuh 5,16 persen. Kabupaten Bantul berada pada urutan ketiga dengan pertumbuhan sebesar 5 persen. Tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Gunungkidul masih lebih cepat dibanding Kulon Progo. Kabupaten Bantul dan Sleman serta Kota Yogyakarta mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun 2014, sedangkan Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul tumbuh lebih cepat.

Dilihat dari sisi kemampuan wilayah, perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta ditunjang dengan teknologi yang tersedia. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah mencapai 46,63 persen dari luas wilayah DIY, nilai total PDRB yang dihasilkan di tahun 2015 sebesar 13,8 triliun rupiah atau 13,61 persen dari total PDRB DIY. Kulon Progo yang luas wilayahnya sebesar 18,40 persen dari luas wilayah DIY hanya mampu menggali total PDRB hanya sebesar 7,6 triliun rupiah, dan persentase terhadap total PDRB DIY merupakan terendah yaitu 7,54 persen. Kabupaten Sleman yang luasnya 18,04 persen dari luas wilayah DIY menghasilkan total PDRB sebesar 33,76 triliun rupiah atau sekitar 33,22 persen dari total PDRB DIY. Sementara itu Kota Yogyakarta dengan luas wilayah hanya 1,02 persen dari luas wilayah DIY, namun karena merupakan pusat kegiatan ekonomi selain kategori pertanian dan penggalian maka nilai total PDRB yang dihasilkan mencapai 26,89 triliun rupiah atau sekitar 26,46 persen terhadap total PDRB DIY.

Pertumbuhan ekonomi DIY 2015 yang sebesar 4,94 persen, pertumbuhan ekonomi di Sleman memberikan andil pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,72 persen. Selanjutnya diikuti sumbangan dari Kota Yogyakarta sebesar 1,33 persen, dan Bantul sebesar 0,93 persen. Daya tumbuh aktivitas ekonomi yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten

Kulon Progo dan Gunungkidul belum banyak memberikan peran terhadap pertumbuhan ekonomi DIY.

Tabel 4.5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di DI Y 2011–2015, Rata-rata Pertumbuhan Per Tahun 2011-2015 dan Andil Pertumbuhan 2015 (persen)

Kabupaten/ Kota/ Provinsi	2011	2012	2013	2014*	2015**	Rata-rata 2011-2015	Andil Pertumbuhan 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Kulonprogo	4,23	4,37	4,87	4,55	4,64	4,61	0,34
2. Bantul	5,07	5,33	5,46	5,15	5,00	5,23	0,93
3. Gunungkidul	4,52	4,84	4,97	4,54	4,81	4,79	0,62
4. Sleman	5,42	5,79	5,89	5,41	5,31	5,60	1,72
5. Yogyakarta	5,84	5,40	5,47	5,30	5,16	5,33	1,33
Jumlah	5,21	5,37	5,47	5,16	4,94	5,24	4,94

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: * angka sementara; ** angka sangat sementara

D. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Data penduduk yang digunakan adalah hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2020.

Nilai PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku tahun 2015 mengandung arti bahwa bila total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk maka rata-rata setiap penduduk mendapatkan bagian sebesar 27,56 juta rupiah setahun (Tabel 4.2). Sementara bila dihitung berdasarkan harga konstan, maka rata-rata setiap penduduk memperoleh bagian sebesar 22,68 juta rupiah setahun yang biasa disebut sebagai PDRB per kapita riil. Nilai PDRB per kapita riil juga bermakna bahwa PDRB DIY tahun 2015 atas dasar harga konstan 2010 sebesar 83,46 triliun rupiah jika dibagi rata untuk setiap penduduk maka setiap bulannya setiap penduduk memperoleh bagian sekitar 1,89 juta rupiah. Namun demikian dalam konteks kehidupan sosial ekonomi distribusi pendapatan tidaklah terbagi merata seperti dalam hitungan matematis. Oleh karena itu perlu peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan agar kesenjangan distribusi pendapatan tidak semakin menganga.

Tabel 4.6. Perkembangan PDRB Per Kapita D.I. Yogyakarta, 2011 – 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB adh. berlaku (juta rupiah)	71.369.958	77.247.861	84.924.543	92.829.330	101.396.117
PDRB adh. konstan 2010 (juta rupiah)	68.049.874	71.702.449	75.627.450	79.532.277	83.461.574
Penduduk pertengahan tahun (orang)*	3.509.997	3.552.462	3.594.854	3.637.116	3.679.176
PDRB per kapita adh. Berlaku:(rupiah)	20.333.339	21.744.880	23.623.920	25.522.785	27.559.464
PDRB per kapita adh. konstan 2010 (rupiah)	19.387.445	20.183.875	21.037.697	21.866.852	22.684.855
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. berlaku (%)	9,01	6,94	8,64	8,04	7,98
Pertumbuhan PDRB per kapita adh. konstan (%)	3,94	4,11	4,23	3,94	3,74

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

Ket : *) Hasil Backcasting dan Proyeksi SP 2010

E. Inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) dan Inflasi PDRB (Indeks Harga Implisit)

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kebijakan ekonomi makro yang berdampak luas terhadap aktivitas berbagai sektor ekonomi yang melingkupinya. Indeks harga secara sederhana adalah perbandingan antara harga dari suatu paket komoditas dalam suatu kelompok barang atau jasa (*market basket*) pada suatu periode waktu terhadap harganya pada periode waktu yang telah ditentukan. Persentase perubahan IHK yang diamati dari periode ke periode inilah yang dikenal sebagai inflasi. Inflasi ini merupakan gambaran perkembangan harga yang dibeli di tingkat konsumen.

Satu jenis inflasi yang lain adalah inflasi yang diturunkan dari indeks harga implisit PDRB (selanjutnya disebut inflasi PDRB), yaitu ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai rasio PDRB nominal terhadap PDRB riil dikali dengan 100. Inflasi PDRB ini dapat dipandang sebagai gambaran perkembangan harga di tingkat produsen.

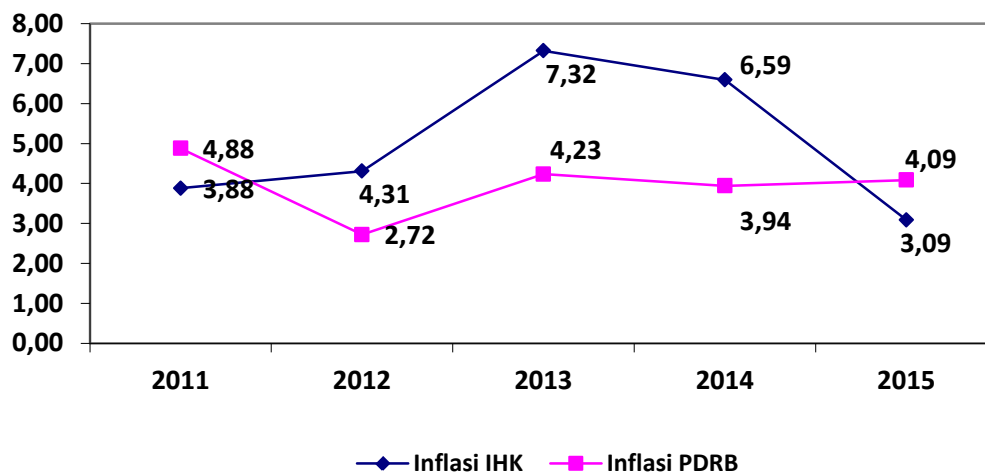
Meskipun kedua inflasi mencerminkan perkembangan harga, namun antara inflasi IHK dan inflasi PDRB ada beberapa perbedaan yang mendasar, terutama dalam hal metode penghitungannya. Perbedaan pertama adalah inflasi PDRB mencerminkan harga semua barang dan jasa **yang diproduksi di wilayah domestik**, sedangkan inflasi IHK menghitung harga berbagai barang dan jasa baik produk domestik maupun impor **yang dibeli** oleh konsumen.

Inflasi IHK dihitung dari perubahan harga sekeranjang belanjaan barang dan jasa (398 komoditas) yang **tetap** di wilayah perkotaan (Yogyakarta) pada suatu periode/tahun

dengan harga di tahun dasar (2012). Barang dan jasa tersebut masing-masing mempunyai bobot yang telah ditentukan melalui survei biaya hidup (SBH) mengenai komposisi komoditas yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Survei terakhir yang dilaksanakan BPS pada tahun 2012 sehingga harga pada tahun tersebut ditetapkan sebagai tahun dasar penghitungan. Inflasi PDRB membandingkan harga berbagai barang dan jasa yang **diproduksi saat ini** di wilayah perkotaan dan pedesaan dengan harga barang dan jasa yang sama pada tahun dasar 2010. Dengan demikian, jumlah barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung inflasi PDRB dapat berubah atau menyesuaikan diri secara otomatis dari waktu ke waktu.

Inflasi IHK tahun kalender 2015 merupakan tingkat perubahan IHK Umum pada posisi bulan Desember tahun 2015 dibandingkan dengan IHK Umum bulan Desember tahun 2014. Inflasi PDRB tahun 2015 merupakan perubahan harga rata-rata di tingkat produsen pada tahun 2015 dibandingkan dengan rata-rata harga produsen pada tahun 2014. Analogi ini digunakan untuk penghitungan periode-periode yang lain.

Gambar 4.6. Inflasi IHK dan Inflasi PDRB D.I.Yogyakarta, 2011-2015 (persen)



Berdasar Gambar 4.5 terlihat bahwa perkembangan kedua jenis angka inflasi dari tahun ke tahun menunjukkan pola yang berbeda. Gejolak harga konsumen lebih mudah berfluktuasi karena gejolak harga di tingkat konsumen langsung dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Fluktuasi yang terjadi pada angka inflasi IHK biasanya dipengaruhi oleh kondisi stok barang dan jasa serta proses distribusinya. Stok barang dan jasa kebutuhan masyarakat juga dipengaruhi oleh penyediaan dan kelancaran distribusi dari produsen pada musim panen. Pada musim panen raya barang-barang kebutuhan pangan stok barang mungkin melimpah sehingga mengakibatkan harga barang di tingkat produsen dan konsumen akan turun. Kondisi sebaliknya bisa terjadi yaitu bila tidak ada pasokan dari produsen maka stok barang menipis sementara permintaan tidak berkurang atau bahkan bertambah sehingga mengakibatkan naiknya harga barang-barang atau jasa. Faktor lain bisa terjadi bila muncul gangguan pada jalur distribusi barang dan jasa, maka secara

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi naik turunnya harga barang dan jasa terutama kebutuhan pokok pangan, seperti: beras, minyak goreng, dan sayur-sayuran sehingga dampaknya berpengaruh pada meningkatnya angka inflasi. Di samping itu potensi naik turunnya inflasi IHK juga sangat dipengaruhi suplai barang dan jasa pokok nonpangan lainnya, seperti: bahan bakar minyak, gas, dan juga nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Di sisi lain, inflasi PDRB cenderung lebih stabil tingkat fluktuasinya. Hal ini memberi indikasi bahwa gejolak harga barang dan jasa di tingkat konsumen kurang kuat mempengaruhi perubahan harga di tingkat produsen. Lebih jauh fenomena tersebut menjelaskan bahwa bila terjadi kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen ternyata tidak cukup kuat mendorong kenaikan harga barang dan jasa di tingkat produsen. Hal ini berarti produsen tidak bisa menikmati imbas kenaikan harga barang atau jasa di pasar. Oleh karena nilai produksi atau output dari kegiatan usaha tidak mengalami kenaikan yang berarti maka pendapatan produsen tidak mengalami kenaikan secara signifikan.

F. Indeks Perkembangan Sektoral

Indeks perkembangan merupakan gambaran perkembangan nilai tambah tahun berjalan dibandingkan dengan tahun dasar. Indeks perkembangan sektoral dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui sektor-sektor mana yang berkembang cepat, lambat atau bahkan menurun sejak tahun dasar (2010). Selanjutnya, dengan menelusuri besaran indeks ini akan dapat diketahui sektor yang prospektif pada masa yang akan datang.

Sampai dengan tahun 2015 kategori jasa keuangan di DIY memiliki indeks perkembangan atas dasar harga berlaku terbesar, yaitu 197,72. Indeks ini menunjukkan bahwa lapangan usaha jasa keuangan mampu berkembang hampir dua kali lipat dibanding dalam waktu lima tahun terakhir. Indeks perkembangan ini belum terbebas dari pengaruh kenaikan harga. Sementara jika dilihat indeks perkembangan atas dasar harga konstan yang telah terbebas dari pengaruh inflasi, maka indeks perkembangan kategori jasa keuangan juga merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 150,23 (Tabel 4.3).

Dalam periode lima tahun terakhir, 2011-2015, kategori informasi dan komunikasi berkembang cukup cepat mengikuti kategori jasa keuangan. Berdasarkan harga konstan kategori informasi dan komunikasi mampu berkembang 43,76 persen lebih besar dibanding tahun 2010. Sementara itu kategori penyediaan akomodasi dan makan minum berdasarkan harga berlaku berkembang cepat, yaitu 180,89 persen, tetapi berdasar harga konstan hanya sebesar 136,62 persen. Level perkembangan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum secara riil (atas dasar harga konstan) di bawah kategori-kategori berikut: informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, jasa perusahaan, dan jasa pendidikan. Dengan kata lain, laju perkembangan riil nilai tambah barang dan jasa kategori-kategori ini melampaui kategori penyediaan akomodasi dan makan minum.

Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dan juga kategori pertambangan dan penggalian mempunyai ciri perkembangan cepat pada kondisi harga berlaku, namun termasuk lambat untuk laju perkembangan riil nilai tambah barang dan jasanya.

Tabel 4.7. Indeks Perkembangan PDRB D.I.Yogyakarta menurut Kategori, 2011-2015 (2010=100)

Lapangan Usaha	PDRB Berlaku					PDRB Konstan				
	2011	2012	2013	2014*)	2015**)	2011	2012	2013	2014*)	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian	107,62	119,14	130,28	134,70	149,58	98,37	103,42	105,76	103,54	106,22
Pertambangan dan Penggalian	112,12	114,86	121,72	132,18	140,92	107,28	109,08	113,35	115,74	115,89
Industri Pengolahan	111,55	111,14	125,48	136,89	143,63	105,39	102,39	109,43	113,61	115,59
Pengadaan Listrik, Gas	96,06	96,05	91,20	94,66	97,76	105,63	116,40	123,48	128,01	126,32
Pengadaan Air	104,96	109,22	117,78	134,90	144,13	100,31	103,79	104,77	108,86	112,02
Konstruksi	109,74	118,88	130,36	141,07	153,63	104,85	109,53	114,93	121,43	126,58
Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	112,95	124,62	134,82	149,25	162,10	105,12	114,22	120,24	127,08	134,95
Pengangkutan & Pergudangan	107,42	116,57	130,98	145,50	157,62	103,94	108,86	115,49	119,89	124,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	112,49	125,49	144,32	162,42	180,89	105,69	112,90	120,95	129,16	136,62
Informasi dan Komunikasi	108,34	118,55	122,44	127,70	133,30	109,55	121,32	128,87	136,77	143,76
Jasa Keuangan	118,39	132,33	155,64	176,82	197,72	111,33	114,93	128,15	138,75	150,23
Real Estat	108,74	120,70	129,28	144,44	158,81	104,47	113,75	118,31	127,50	135,72
Jasa Perusahaan	108,40	115,72	118,40	132,37	145,10	106,57	115,09	118,86	127,90	137,24
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	109,33	124,15	140,29	156,82	174,73	104,64	112,48	118,04	125,00	131,48
Jasa Pendidikan	111,47	117,25	125,57	140,03	158,41	107,62	113,28	118,47	127,83	137,14
Jasa Kesehatan	113,58	125,22	136,01	147,81	165,80	106,52	116,30	124,43	133,95	143,52
Jasa Lainnya	108,49	115,02	124,60	136,50	150,26	106,83	111,41	116,82	123,00	132,84
PDRB	110,34	119,43	131,30	143,52	156,77	105,21	110,86	116,93	122,96	129,04

Keterangan: *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

G. Perbandingan Nilai PDRB Antar Kabupaten/Kota

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memiliki luas wilayah sekitar 3.185,8 km² terbagi ke dalam 5 (lima) wilayah administratif kabupaten/kota, yaitu:

1. Kabupaten Kulonprogo
2. Kabupaten Bantul
3. Kabupaten Gunungkidul
4. Kabupaten Sleman
5. Kota Yogyakarta.

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, masing-masing kabupaten/kota mempunyai hak dalam hal mengatur kebijakan fiskal dan menentukan arah pembangunan. Hal ini menyebabkan perkembangan kinerja perekonomian daerah/wilayah sangat tergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh pembuat kebijakan (*decision maker*) di tingkat kabupaten/kota.

Dalam menganalisis perekonomian makro suatu daerah dapat mengacu pada analisis perekonomian nasional. Meskipun demikian perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan prinsip yang menyebabkan analisis perekonomian nasional tidak dapat diterapkan secara mutlak di tingkat regional. Satu hal yang secara nyata membedakan *region* dengan *nation* adalah bahwa *region* tidak mempunyai kedaulatan sebagaimana *nation*. Hal ini menyebabkan adanya **keterbukaan hubungan antar-region**, sehingga arus barang dan jasa antardaerah sangat bebas, tidak seperti *nation* di mana arus barang dan jasa dari dan ke luar negeri harus melalui pihak bea dan cukai. Keterbukaan antar-region ini menyebabkan teori ekonomi tertutup sangat muskil diterapkan pada tingkat regional. Di satu sisi, adanya keterbukaan antar-region memungkinkan hubungan spasial yang sangat kuat antar *region*. Adanya hubungan spasial menyebabkan perkembangan perekonomian suatu daerah sangat mungkin dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah di sekitarnya baik positif maupun negatif.

Tabel 4.8. Nilai dan Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2011 – 2015 (juta rupiah) / (persen)

Kabupaten/Kota/	2011	2012	2013	2014 ^{*)}	2015 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	5.033.074 (7,72)	5.500.251 (7,66)	5.916.574 (7,64)	6.489.594 (7,57)	7.034.256 (7,54)
Bantul	12.114.059 (18,64)	13.290.667 (18,79)	14.510.832 (18,99)	16.138.755 (19,16)	17.801.742 (19,17)
Gunungkidul	8.848.038 (13,66)	9.739.094 (13,65)	10.545.355 (13,57)	11.530.341 (13,53)	12.564.331 (13,61)
Sleman	21.481.644 (33,33)	23.764.366 (33,31)	25.732.249 (33,29)	28.295.363 (33,17)	30.812.984 (33,22)
Kota Yogyakarta	17.202.154 (26,65)	18.997.186 (26,59)	20.536.855 (26,52)	22.537.792 (26,57)	24.676.862 (26,46)
DIY	71.369.958 (100,00)	77.247.861 (100,00)	84.924.543 (100,00)	92.829.330 (100,00)	101.396.117 (100,00)

Keterangan: *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Angka () di bawah nilai absolut merupakan distribusi terhadap total PDRB DIY

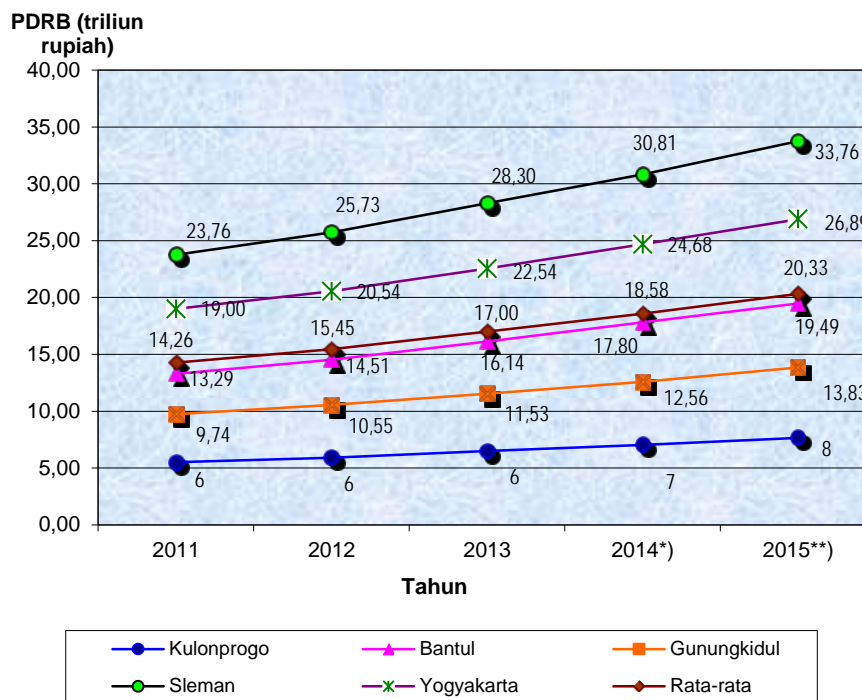
Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Untuk menganalisis kinerja perekonomian kelima kabupaten/kota di DIY memang tidak dapat dipisahkan dari **analisis spasial (tata ruang/geografis)**, karena kelima wilayah tersebut kemungkinan besar mempunyai keterkaitan erat secara sosial demografis. Namun, untuk sekedar membandingkan perkembangan perekonomian makro secara relatif

antardaerah, maka dapat dilakukan dengan melihat besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten/kota sebagai indikator makro.

Tabel 4.8 di atas memperlihatkan perbandingan nilai nominal PDRB antarwaktu dan antardaerah. Sebagai daerah penyanggah utama perkembangan Kota Yogyakarta, ternyata Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar "secara relatif" dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, porsi distribusinya mencapai sepertiga dari total PDRB DIY. Sleman masih memiliki potensi terus berkembang lebih cepat. Sementara itu Kota Yogyakarta perkembangannya sudah mengarah ke titik jenuh, angsa distribusinya di bawah Sleman yaitu sekitar 26 persen. Bantul sebagai penyanggah lapis kedua perkembangan perkotaan pangsa distribusinya bergerak lebih meningkat dibanding kabupaten/kota lain meskipun masih di bawah 20 persen. Sementara dua kabupaten lainnya, Kulon Progo dan Gunungkidul yang mencakup 65 persen dari luas wilayah DIY, pangsa distribusi ekonomi dua wilayah ini terhadap DIY hanya sekitar 21 persen. Letak geografis kedua kabupaten ini terpisah dari pusat Kota Yogyakarta, sehingga perkembangan ekonominya tidak dapat langsung mengandalkan rembesan mekarnya perkotaan. Dua kabupaten ini perlu terobosan investasi besar untuk mengembangkan potensi ekonominya.

Gambar 4.7. Nilai PDRB menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2011 - 2015 (triliun rupiah)



Dari Gambar 4.6 terlihat bahwa selama periode tahun 2011-2015, kinerja perekonomian Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas rata-rata DIY. Sementara untuk Kabupaten Bantul pada level dekat dengan nilai rata-rata DIY. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan penopang utama perekonomian di DIY. Sementara kinerja ekonomi Kabupaten

Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo masih di bawah rata-rata DIY dan jarak dengan rata-rata DIY juga masih relatif besar.

Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2015 nilai PDRB-nya masih menempati urutan keempat. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Gunungkidul masih bertumpu pada lapangan usaha pertanian. Sementara lapangan usaha pertanian yang diusahakan di lahan pertanian pegunungan berbatu relatif lebih sulit untuk memacu produktivitas komoditas pertaniannya, perlakuannya tidak seperti di lahan pertanian subur. Kota Yogyakarta dengan luas wilayah dan juga jumlah penduduk terkecil mampu mencapai nilai PDRB yang lebih besar (urutan kedua). Sebagai ibu kota DIY, Kota Yogyakarta merupakan pusat pemerintahan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih maju, sehingga semua aktivitas ekonomi tersedia, kecuali pertanian dan penggalian.

Tabel 4.9. Nilai PDRB Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku, 2015^{*)} (juta rupiah)

Lapangan Usaha	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	1.579.969	2.843.403	3.535.657	2.855.879	45.039
Pertambangan dan Penggalian	109.892	125.530	188.772	147.413	1.041
Industri Pengolahan	918.052	2.896.661	1.284.019	4.539.798	3.658.132
Pengadaan Listrik, Gas	4.474	17.322	8.245	25.326	37.974
Pengadaan Air	10.522	16.193	23.521	17.198	42.035
Konstruksi	651.776	1.873.228	1.328.853	3.631.129	2.174.134
Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	993.190	1.634.013	1.216.310	2.507.164	1.931.299
Pengangkutan & Pergudangan	636.391	935.531	707.695	2.379.991	1.095.535
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	296.721	2.279.275	813.608	3.458.076	3.550.966
Informasi dan Komunikasi	382.517	1.411.574	963.598	2.731.067	2.799.356
Jasa Keuangan	255.816	549.349	322.775	1.115.223	1.787.494
Real Estat	256.044	1.262.118	474.734	2.629.348	2.519.071
Jasa Perusahaan	22.112	94.902	60.222	578.397	296.115
Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	684.127	1.432.619	1.299.112	2.251.057	2.680.897
Jasa Pendidikan	461.611	1.372.466	876.367	3.346.592	2.535.454
Jasa Kesehatan	112.613	354.915	277.851	791.284	1.016.645
Jasa Lainnya	286.475	387.740	452.889	751.294	717.935
PDRB	7.662.301	19.486.839	13.834.228	33.756.236	26.889.124

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

Komposisi struktur ekonomi masing-masing daerah menurut kategori menarik untuk dicermati karena dapat mencerminkan kemampuan daya saing ekonomi

antarkabupaten/kota. Struktur dan kontribusi kategori PDRB menurut lapangan usaha kabupaten/kota dapat dilihat di Tabel 4.6 -4.8. Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul masih mengandalkan sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonominya. Produk komoditas-komoditas pertanian unggulan DIY berasal dari dua kabupaten ini, seperti: padi, pisang, cabai, bawang merah, kelapa, kakao, dan lain-lain. Sementara di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta penggerak utama perekonomian adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sleman dan Yogyakarta memang merupakan pusat bisnis dari supermarket, *hipermart*, rumah pertokoan, hotel, dan bisnis hiburan. Sektor industri pengolahan termasuk sebagai penggerak perekonomian di Bantul dan Sleman. Hal ini dipengaruhi oleh sebagian besar industri besar-sedang yang jumlahnya lebih dari 300 perusahaan lokasinya berada di kedua kabupaten ini.

Tabel 4.10. Kontribusi Sektor-sektor Dominan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta, 2011, 2013, 2015 (persen)

Kabupaten/kota	Sektor Dominan	Kontribusi		
		2011	2013	2015 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulonprogo	1. Pertanian	20,64	21,17	20,62
	2. Perdagangan	12,78	13,00	12,96
	3. Industri Pengolahan	12,88	12,03	11,98
Bantul	1. Industri Pengolahan	16,44	15,44	14,86
	2. Pertanian	14,99	15,34	14,59
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,99	10,97	11,70
Gunungkidul	1. Pertanian	26,21	26,43	25,56
	2. Konstruksi	9,32	9,62	9,61
	3. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,43	9,10	9,39
Sleman	1. Industri Pengolahan	14,84	14,21	13,45
	2. Konstruksi	11,25	10,99	10,76
	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,49	9,88	10,24
Yogyakarta	1. Industri Pengolahan	13,76	14,03	13,80
	2. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,51	12,61	13,21
	3. Informasi dan Komunikasi	12,60	11,80	10,41

Keterangan: **) Angka sangat sementara

Sumber: BPS D.I.Yogyakarta

Pencapaian PDRB yang tinggi idealnya disertai pemerataan distribusi pendapatan penduduk. Bila tidak maka akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Walaupun indikator pemerataan pendapatan yang akurat sangat sulit diperoleh, namun indeks gini dan PDRB per kapita dapat digunakan untuk melihat pendekatan seberapa besar tingkat pemerataan distribusi pendapatan daerah kepada penduduknya. Konsep dan makna angka PDRB per kapita telah dijelaskan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan indeks gini akan dibahas lebih jauh di Bab 6.

Berdasarkan hitungan nilai PDRB per kapita riil kabupaten/kota di DIY diperoleh gambaran kesenjangan angka PDRB per kapita antardaerah. Sampai dengan tahun 2015

Kota Yogyakarta masih menjadi daerah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi, yaitu 54,31 juta rupiah (Tabel 4.11). Tingginya angka PDRB per Kapita Kota Yogyakarta disebabkan karena nilai total PDRB-nya relatif tinggi sedangkan jumlah penduduknya lebih sedikit. Sementara itu Sleman yang mempunyai nilai total PDRB tertinggi, PDRB per kapita Sleman jauh di bawah Kota Yogyakarta karena jumlah penduduk Sleman cukup padat yaitu hampir tiga kali lipat penduduk Kota Yogyakarta. Nilai PDRB per kapita Kota Yogyakarta mencapai lebih dari 3,5 kali lipat PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo. Di regional DIY PDRB per kapita Kota Yogyakarta memang fantastis tinggi sehingga bila dibandingkan dengan Sleman yang mempunyai PDRB per kapita paling tinggi di antara tiga kabupaten lain, maka PDRB per kapita Kota Yogyakarta sebesar 2,25 kali lipatnya.

Tabel 4.11. Nilai PDRB Per Kapita menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2011 - 2015 (rupiah)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014 ^{*)}	2015 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulonprogo	13.308.338	13.733.466	14.240.971	14.723.215	15.239.197
Bantul	13.803.938	14.344.062	14.928.875	15.495.843	16.068.284
Gunungkidul	13.500.687	13.999.818	14.535.223	15.031.868	15.590.617
Sleman	20.288.637	21.220.835	22.218.342	23.161.987	24.120.028
Yogyakarta	46.384.233	48.262.989	50.262.263	52.278.315	54.305.690
DIY	19.387.445	20.183.875	21.037.697	21.866.852	22.684.855

Keterangan: **) Angka sangat sementara

Sumber : BPS D.I.Yogyakarta

H. Perbandingan Nilai PDRB Antarprovinsi

Peran ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Jawa terhadap ekonomi nasional cukup besar. Hal ini terlihat dari kontribusi PDRB Pulau Jawa yang mencapai 58,29 persen (Tabel 4.12). Demikian pula provinsi-provinsi yang menduduki peringkat 4 besar adalah provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa, yaitu DKI Jakarta (17,02 persen), Jawa Timur (14,50 persen), Jawa Barat (13,09 persen), dan Jawa Tengah (8,70 persen). Nilai PDRB Jawa Timur tersebut lebih besar dengan jumlah PDRB provinsi di Kalimantan, dan juga Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, dan Maluku plus Papua. Kondisi ini mencerminkan bahwa kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

DKI Jakarta sebagai pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan dan jasa menjadi magnet yang sangat kuat bagi pelaku usaha, pengembang, maupun pencari kerja. Bahkan, menurut ahli ekonomi 70 persen perputaran uang nasional ada di DKI Jakarta. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah lebih banyak didominasi oleh aktivitas industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Selanjutnya, sebagai pemegang kontribusi ekonomi terbesar ke 5 diduduki oleh Provinsi Riau (5,60 persen). Beberapa provinsi

kontribusi ekonominya bergerak melaju di bawah Riau, yaitu Sumatera Utara dan Kalimantan Timur.

Tabel 4.12. Ringkasan PDRB Provinsi–Provinsi di Indonesia, 2015

PROPINSI	2015				
	ADHB (Juta Rp)	ADHK (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)	
				Thd Pulau	Thd 33 Prov
Sumatera	2.587.734.117,02	1.960.872.638,00	3,54	100,00	22,21
01. Aceh	129.200.559,72	112.672.440,90	-0,72	4,99	1,11
02. Sumatra Utara	571.722.008,76	440.955.852,47	5,10	22,09	4,91
03. Sumatra Barat	178.810.456,68	140.529.151,11	5,41	6,91	1,53
04. Riau	652.386.422,52	448.936.595,38	0,22	25,21	5,60
05. Jambi	155.110.347,65	125.038.712,63	4,21	5,99	1,33
06. Sumatra Selatan	332.726.575,53	254.022.862,43	4,50	12,86	2,86
07. Bengkulu	50.341.717,69	38.067.501,98	5,14	1,95	0,43
08. Lampung	253.162.538,32	199.525.419,79	5,13	9,78	2,17
09. Kep. Bangka Belitung	60.992.088,32	45.961.462,46	4,08	2,36	0,52
10. Kepulauan Riau	203.281.401,84	155.162.638,85	6,02	7,86	1,74
Jawa	6.791.858.932,12	5.250.551.649,84	5,45	100,00	58,29
11. DKI Jakarta	1.983.420.526,26	1.454.102.107,17	5,88	29,20	17,02
12. Jawa Barat	1.525.149.162,72	1.207.001.487,11	5,03	22,46	13,09
13. Jawa Tengah	1.014.074.206,45	806.609.023,50	5,44	14,93	8,70
14. DI Yogyakarta	101.396.117,27	83.461.574,49	4,94	1,49	0,87
15. Jawa Timur	1.689.882.400,67	1.331.418.241,92	5,44	24,88	14,50
16. Banten	477.936.518,75	367.959.215,65	5,37	7,04	4,10
Bali dan Nusa Tenggara	356.397.048,16	274.824.756,90	10,29	100,00	3,06
17. Bali	177.173.015,67	129.137.912,34	6,04	49,71	1,52
18. Nusa Tenggara Barat	102.791.555,14	88.866.746,56	21,24	28,84	0,88
19. Nusa Tenggara Timur	76.432.477,35	56.820.098,00	5,02	21,45	0,66
Kalimantan	949.238.837,63	790.946.656,03	1,31	100,00	8,15
20. Kalimantan Barat	146.885.970,63	112.261.168,31	4,81	15,47	1,26
21. Kalimantan Tengah	100.148.195,33	78.889.998,35	7,01	10,55	0,86
22. Kalimantan Selatan	137.518.033,24	110.890.731,42	3,84	14,49	1,18
23. Kalimantan Timur	564.686.638,43	488.904.757,95	-0,85	59,49	4,85
Sulawesi	689.912.300,10	525.019.726,09	8,18	100,00	5,92
24. Sulawesi Utara	91.275.262,44	70.418.811,20	6,12	13,23	0,78
25. Sulawesi Tengah	107.596.437,68	82.829.231,00	15,56	15,60	0,92
26. Sulawesi Selatan	341.745.270,34	250.729.557,17	7,15	49,53	2,93
27. Sulawesi Tenggara	87.740.818,55	72.988.298,96	6,88	12,72	0,75
28. Gorontalo	28.538.479,86	22.070.445,91	6,23	4,14	0,24
29. Sulawesi Barat	33.016.031,22	25.983.381,85	7,37	4,79	0,28
Maluku dan Papua	275.984.347,73	228.839.421,33	6,62	100,00	2,37
30. Maluku	34.344.586,61	24.843.650,18	5,44	12,44	0,29
31. Maluku Utara	26.631.781,78	20.377.474,21	6,10	9,65	0,23
32. Papua Barat	62.882.024,41	52.347.420,68	4,10	22,78	0,54
33. Papua	152.125.954,94	131.270.876,27	7,97	55,12	1,31

Komposisi peringkat lima besar kontribusi PDRB terhadap PDB tidak ada perubahan dibanding tahun 2014. Namun besaran kontribusi dari lima provinsi tersebut terlihat ada sedikit pergeseran. Persentase sumbangan DKI naik 0,14 poin, Jawa Timur turun 0,7 poin,

Jawa Barat turun 1,15 poin, dan Jawa Tengah bertambah 0,46 poin. Sementara besaran kontribusi persentase Riau turun 1,15 poin. Kontribusi Sumatera Utara turun 0,39 poin, demikian pula Kalimantan Timur juga turun 0,37 poin. Kecenderungan menurunnya kontribusi beberapa provinsi tersebut diakibatkan meningkatnya aktivitas ekonomi di beberapa provinsi lain sebagai pertanda adanya pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai provinsi di Indonesia.

Kontribusi PDRB D.I. Yogyakarta terhadap PDB nasional maupun terhadap PDRB Pulau Jawa mengalami sedikit peningkatan. Kontribusi DIY 2015 di Pulau Jawa naik 0,07 poin yaitu menjadi 1,49 persen, namun peringkatnya masih terendah di antara enam provinsi di Pulau Jawa. Kontribusi terhadap jumlah 33 provinsi lainnya sebesar 0,87 persen, atau naik 0,04 poin. Peningkatan kontribusi D.I. Yogyakarta tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi D.I. Yogyakarta meskipun melambat tetapi masih lebih baik dibanding rata-rata sejumlah 33 provinsi di Indonesia.

Di tingkat regional Kawasan Jawa, Bali dan Nusa tenggara (JABALNUSRA), posisi PDRB D.I. Yogyakarta berada di atas NTT, tetapi di bawah NTB atau berada pada peringkat ke-8 di antara sejumlah 9 provinsi di kawasan Jabalnusra. Dibanding tahun 2014 posisi DIY tergeser oleh NTB.

BAB 5

PDRB MENURUT PENGELUARAN

A. Struktur PDRB Pengeluaran

B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran

BAB V

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai PDRB menurut kategori atau dari sisi lapangan usaha atau produksi. Pada bab berikut ini akan dibahas mengenai PDRB dari sisi pengeluaran (*expenditure*). PDRB menurut pengeluaran menjelaskan alokasi penggunaan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor produksi dari masing-masing pelaku ekonomi dalam bentuk barang konsumsi akhir (*final goods*). Komponen yang dihitung dalam PDRB menurut pengeluaran meliputi pengeluaran untuk konsumsi, pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB), ekspor dan impor, serta perubahan inventori.

Untuk mengkaji sisi pengeluaran PDRB, akan dibahas terlebih dahulu mengenai konsep dan peranan pelaku ekonomi dalam menjalankan roda perekonomian. Dalam sistem perekonomian sebagai satu kesatuan, pelaku ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok/institusi (Nellis dan Parker, 2003), yaitu:

1. Rumah tangga (termasuk lembaga nirlaba);
2. Pemerintah (*government*);
3. Korporasi (*firm*);
4. Jasa keuangan (*financial services*);
5. Kelompok luar daerah/luar negeri (*rest of the world/ROW*).

Masing-masing institusi tersebut berperan sebagai pelaku ekonomi yang dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan perilakunya dalam sistem perekonomian.

Pada tingkat paling dasar, rumah tangga menyediakan sumber daya yang merupakan faktor produksi yang dibutuhkan oleh korporasi. Faktor produksi tersebut berupa tenaga kerja, tanah, modal, dan kewiraswastaan (*entrepreneurship*) yang akan dipergunakan oleh korporasi untuk memproduksi barang dan jasa. Sebagai imbalan atas penyediaan faktor produksi, rumah tangga akan menerima pembayaran dari korporasi berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan (*profit* dan *dividen*).

Selanjutnya, korporasi berperan untuk memproduksi barang dan jasa dengan memanfaatkan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Barang dan jasa tersebut akan dikonsumsi lagi oleh rumah tangga, pemerintah, dan korporasi lain. Selain itu, produk dari korporasi tersebut juga dapat dipasarkan ke luar daerah maupun luar negeri. Pendapatan yang diperoleh korporasi tersebut kemudian akan dikembalikan lagi kepada rumah tangga dalam bentuk balas jasa atas faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga. Disamping mempekerjakan dan memberi balas jasa atas faktor produksi, korporasi juga memainkan peran vital dalam pembentukan investasi berupa pengadaan mesin dan peralatan, tanah dan bangunan, serta kapasitas produksi lainnya.

Pelaku ekonomi selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah berperan dalam menyediakan menyediakan jasa pelayanan umum untuk masyarakat yang secara ekonomis sulit dinilai, seperti: melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah, menjaga kestabilan dan keamanan negara, meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat, mengatur kebijakan perekonomian negara, dan lainnya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya. Meskipun demikian, pemerintah juga memberikan balas jasa berupa upah dan gaji kepada pegawainya yang merupakan bagian dari kelompok rumah tangga. Sementara itu untuk memenuhi kebutuhannya, pemerintah juga akan memanfaatkan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Selain peran-peran tersebut pemerintah juga akan melakukan pembentukan modal dengan cara membangun infrastruktur jalan baru, jembatan, bangunan untuk sarana umum seperti: rumah sakit, sekolah, dan lainnya. Pada akhirnya, pemerintah memungut pajak dari individu dan perusahaan untuk mendanai konsumsi pemerintah, termasuk pembayaran transfer kepada penduduk yang memerlukan berupa subsidi baik langsung maupun tidak langsung.

Meskipun jasa keuangan juga merupakan pelaku ekonomi namun kegiatan institusi ini biasanya dikelompokkan terpisah dari korporasi. Hal ini karena jasa keuangan tidak memproduksi output secara fisik tetapi berperan dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Peranan kelompok ini adalah menyediakan layanan untuk menjembatani kepentingan antara penyedia dana/penabung (kreditor) dan peminjam (debitor). Penyedia dana tersebut bisa berasal dari rumah tangga, korporasi, pihak asing, dan badan-badan lainnya yang melayani publik. Sebagai pihak penyelenggara dan penyedia dana, institusi jasa keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan di bidang lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun kelompok luar daerah/luar negeri memberikan sumbangan langsung dalam hal kegiatan transaksi ekspor dan impor, baik untuk transaksi dengan daerah lain maupun dengan pihak luar negeri. Meningkatnya ketergantungan antardaerah/negara karena dampak globalisasi (pasar bebas) menyebabkan adanya kecenderungan peningkatan arus investasi yang masuk. Arus modal ini akan sangat berperan dalam menutup kekurangan tabungan domestik yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun untuk mencukupi belanja konsumsi yang diperlukan penduduk.

A. Struktur PDRB Pengeluaran

1. Konsumsi Rumah Tangga

Pada tahun 2014, nilai konsumsi yang dibelanjakan oleh rumah tangga tercatat sebesar Rp37,22 triliun dari total nilai PDRB DIY sebesar Rp70,86 triliun atau mencapai sekitar 52,52 persen. Dengan demikian ada sedikit peningkatan porsi konsumsi rumah

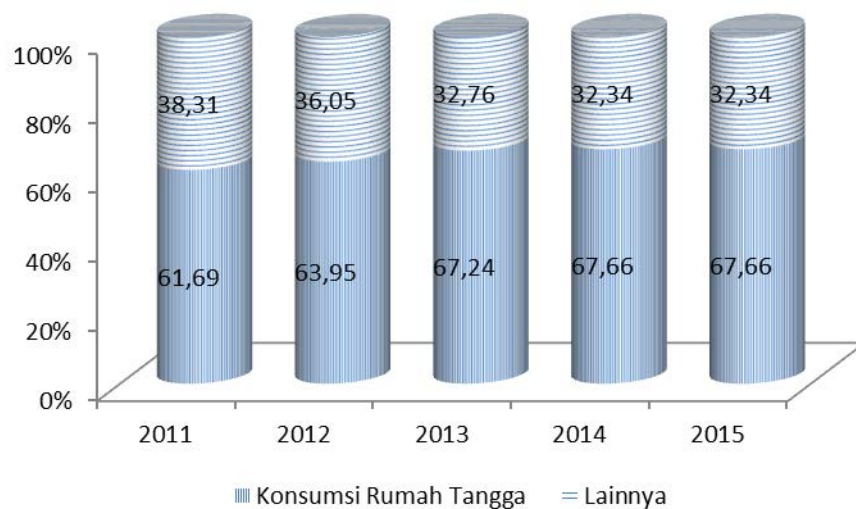
tangga dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai sebesar 52,27 persen. Porsi konsumsi rumah tangga yang relatif tinggi dalam penggunaan PDRB menunjukkan bahwa komponen ini masih berperan besar dalam menggerakkan perekonomian daerah (Tabel 5.1 dan Gambar 5.1).

Tabel 5.1. Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran di DI Yogyakarta, 2011–2015 (juta rupiah)

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	44.029.583	49.403.401	57.101.887	62.805.013	68.608.884
a. Makanan dan Minuman	18.139.490	20.500.299	24.497.671	26.624.260	28.866.190
b. Bukan Makanan	25.890.093	28.903.102	32.604.216	36.180.753	39.742.694
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	1.866.945	2.096.682	2.457.182	2.948.427	3.171.193
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	11.039.650	11.982.950	13.629.834	15.347.428	16.947.017
4. Pembentukan modal tetap bruto	19.325.555	21.148.871	24.250.704	27.744.794	30.935.037
5. Perubahan Inventori	935.146	969.334	967.150	980.197	1.180.158
6. Ekspor Luar Negeri	2.698.673	3.268.160	4.224.512	5.465.423	6.259.714
7. Impor Luar Negeri	1.498.705	1.984.896	2.514.540	4.085.245	5.066.145
8. Net Ekspor Antardaerah	-7.026.888	-9.636.641	-15.192.186	-18.376.708	-20.639.740
P D R B	71.369.958	77.247.861	84.924.543	92.829.330	101.396.117

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta
Ket : * angka sementara; ** angka sangat sementara

Gambar 5.1. Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di DIY, 2011-2015



Berdasarkan jenis barang yang dikonsumsi, selama periode 2011-2015 persentase konsumsi non makanan selalu lebih besar dibandingkan konsumsi makanan. Pada tahun 2015, porsi antara konsumsi makanan dan non makanan mencapai 28,47 persen dan 39,2 persen terhadap total PDRB tahun 2015 (Tabel 5.2). Perkembangan porsi konsumsi selama lima tahun terakhir tampak bahwa konsumsi makanan nonmakanan ada kecenderungan meningkat. Dengan demikian berarti terjadi penurunan porsi konsumsi di komponen pengeluaran yang lain. Dari tabel 5.2 terlihat bahwa semua komponen pengeluaran ternyata cenderung meningkat, kecuali net ekspor antardaerah. Artinya, peningkatan konsumsi DIY dicukupi melalui impor barang dan jasa dari provinsi lain.

Tabel 5.2. Struktur PDRB menurut Pengeluaran di DIY, 2011 – 2015 (persen)

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	61,69	63,95	67,24	67,66	67,66
a. Makanan dan Minuman	25,42	26,54	28,85	28,68	28,47
b. Bukan Makanan	36,28	37,42	38,39	38,98	39,20
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	2,62	2,71	2,89	3,18	3,13
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	15,47	15,51	16,05	16,53	16,71
4. Pembentukan modal tetap bruto	27,08	27,38	28,56	29,89	30,51
5. Perubahan Inventori	1,31	1,25	1,14	1,06	1,16
6. Ekspor Luar Negeri	3,78	4,23	4,97	5,89	6,17
7. Impor Luar Negeri	2,10	2,57	2,96	4,40	5,00
8. Net Ekspor Antardaerah	(9,85)	(12,47)	(17,89)	(19,80)	(20,36)
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: *) angka sementara; **) angka sangat sementara

Kecenderungan meningkatnya impor barang dan jasa dari provinsi lain di satu sisi menjadi peluang bagi lapangan usaha tertentu namun di sisi lain mengurangi pangsa pasar produksi lokal DIY. Oleh karena itu kondisi ini semestinya menjadi cambuk bagi pelaku usaha produksi lokal untuk meningkatnya daya saing produknya. Di samping itu perlu ada upaya untuk membiasakan pemanfaatan atau mengkonsumsi produk lokal supaya ketergantungan akan barang dan jasa dari luar bisa dikurangi, baik barang produk pertanian maupun industri lainnya.

2. Konsumsi Pemerintah

Dalam tatanan kehidupan bernegara, lembaga eksekutif pemerintah bukan hanya sebagai penyusun regulasi atau pembuat kebijakan untuk mengatur kehidupan bernegara namun juga sebagai pelaksana kegiatan ekonomi melalui instrumen belanja pemerintah. Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih sangat dibutuhkan baik sebagai penyelenggara pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun dalam bentuk intervensi program lainnya yang diperuntukkan membantu penduduk yang berpenghasilan rendah. Kegiatan-kegiatan tersebut selain

membutuhkan anggaran yang tertuang dalam RAPBN(D), juga memerlukan biaya operasional yang merupakan pengeluaran untuk konsumsi penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau disingkat Konsumsi Pemerintah.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDRB DIY atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp16,95 triliun pada tahun 2015 atau memberikan andil sebesar 16,71 persen terhadap PDRB. Selama periode 2011-2015, kontribusi konsumsi pemerintah terus meningkat meskipun kecenderungannya relatif datar (Tabel 5.2). Indikasi ini menegaskan bahwa peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian DIY cukup stabil, baik melalui kebijakan perencanaan maupun dalam implementasi tahapan pembangunan tahun demi tahun.

3. Investasi

Penanaman modal atau investasi diperlukan agar kesinambungan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Investasi baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun domestik digunakan untuk membiayai aktivitas kegiatan produksi barang dan jasa pada seluruh sektor ekonomi. Adanya kegiatan investasi baru akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat memberi peluang penambahan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian peningkatan investasi selain dapat memacu pertumbuhan ekonomi juga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peluang kerja yang diciptakan.

Dalam buku *A System of National Account (SNA)* yang diterbitkan oleh PBB (*United Nations*), dijelaskan bahwa realisasi investasi di suatu daerah/wilayah pada tahun tertentu sama dengan penjumlahan nilai pembentukan modal tetap (domestik) bruto (PMTB) dan perubahan inventori. PMTB menggambarkan investasi fisik domestik yang telah direalisasikan pada tahun tertentu secara kumulatif, sedangkan inventori (stok) menggambarkan output suatu sektor yang belum selesai diproses, dapat berbentuk barang setengah jadi, atau bahkan input yang belum digunakan, dan barang jadi yang belum terjual. Untuk selanjutnya, jika disebut investasi fisik maka sudah merupakan gabungan/penjumlahan antara PMTB dan perubahan inventori.

Pada tahun 2015 nilai investasi fisik (PMTB) di DIY mencapai Rp30,94 triliun atau naik sekitar Rp3,2 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp27,74 triliun. Peningkatan tersebut lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang naik sekitar Rp2,7 triliun. Selama lima tahun terakhir, perkembangan investasi fisik di DIY cukup pesat yang didorong oleh tingginya perkembangan lapangan usaha perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, keuangan, industri, informasi dan komunikasi serta jasa-jasa. Pertumbuhan komponen PMTB tahun 2015 yang sebesar 4,34 persen memang tidak terlalu buruk tetapi kenyataannya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 5,78 persen.

Struktur PDRB menurut Pengeluaran tahun 2011 memperlihatkan bahwa sumbangan investasi fisik terhadap PDRB tercatat sebesar 28,39 persen naik menjadi 31,67 persen atau naik sekitar 3,28 poin di tahun 2015 (Tabel 5.3). Salah satu indikator ekonomi untuk melihat tingkat efisiensi penanaman modal di suatu daerah/wilayah, ukuran yang biasa digunakan adalah ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Indikator ini merupakan rasio antara nilai investasi dengan pertambahan output dalam periode tertentu. Dalam tulisan ini, indikator ICOR yang dihitung adalah konsep ICOR dengan *time-lag* 0, artinya bahwa investasi yang ditanam pada tahun tertentu akan menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga. Untuk memudahkan perhitungan karena keterbatasan data yang tersedia, maka sebagai pendekatan ICOR digunakan ICVAR (*Incremental Capital Value Added Ratio*).

Tabel 5.3. Nilai dan Andil Investasi Fisik terhadap PDRB dan ICOR di DIY, 2011–2015

Uraian	2011	2012	2013	2014 ^{*)}	2015 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PMTDB (juta rupiah)	19.325.555	21.148.871	24.250.704	27.744.794	30.935.037
(persen)	27,08	27,38	28,56	29,89	30,51
2. Perubahan Inventori (juta rupiah)	935.146	969.334	967.150	980.197	1.180.158
(persen)	1,31	1,25	1,14	1,06	1,16
3. PMTDB + Perubahan Inventori (juta rp)	20.260.700	22.118.205	25.217.854	28.724.991	32.115.195
(persen)	28,39	28,63	29,69	30,94	31,67
4. ICOR, Investasi = PMTDB (lag 0)	5,41	5,26	5,14	5,47	5,67
5. ICOR, Investasi = PMTDB + Perubahan Inventori (lag 0)	5,66	5,48	5,36	5,71	5,92

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, data diolah

Keterangan : Angka dalam kurung adalah *share* terhadap PDRB

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Dilihat dari angka ICVAR DIY dalam periode tahun 2011–2015, dapat dimaknai bahwa produktivitas dari investasi yang ditanamkan belum menunjukkan kecenderungan membaik. Jika pada tahun 2011 setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen diperlukan pertumbuhan investasi sebesar 5,66 persen, di tahun 2015 pertumbuhan kebutuhan investasi yang diperlukan lebih tinggi yaitu menjadi 5,92 persen. Angka ini dimaknai bahwa untuk setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi satu persen pertumbuhan investasi yang diperlukan menjadi sebesar 5,92 persen. Pembahasan lebih rinci tentang ICOR dapat dilihat pada publikasi Analisis ICOR DIY.

4. Ekspor dan Impor

Salah satu misi pembangunan dalam RPJMD DIY 2012-2017 adalah mewujudkan pendidikan berkualitas dan mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif. Hal ini mendorong peluang tumbuhkembangnya industri kerajinan khas DIY baik industri

makanan/minuman maupun industri barang dan jasa lain. Sebagian produk industri tersebut menjadi komoditas ekspor. Sebaliknya, oleh karena Yogyakarta menjadi destinasi utama kegiatan wisata dan pendidikan, dampak kegiatan ekonomi yang timbul adalah DIY menjadi pusat pemasaran bagi produk-produk dari daerah lain.

Besaran absolut nilai ekspor luar negeri Provinsi DIY tahun 2015 tercatat sebesar 6,3 triliun rupiah. Pada periode 2011-2015 DIY mengalami surplus perdagangan luar negeri dengan nilai tertinggi dicapai pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,71 triliun rupiah. Di tahun 2015 surplus perdagangan luar negeri DIY tercatat sebesar 1,19 triliun rupiah.

Transaksi perdagangan yang terjadi antara wisatawan dan pedagang dapat berpeluang membentuk jaringan pemasaran produk-produk domestik ke daerah-daerah lain. Produk sektor industri merupakan pangsa transaksi komoditas yang cukup dominan dalam kegiatan ekspor antarprovinsi, sedangkan jasa hotel, restoran, jasa angkutan, dan jasa informasi dan komunikasi yang dinikmati oleh wisatawan merupakan bentuk transaksi ekspor jasa.

Selama kurun waktu 2011-2015 nilai komponen net ekspor antarprovinsi DIY bernilai negatif. Artinya, DIY nilai impor barang dan jasa yang dilakukan DIY melebihi nilai ekspor barang dan jasa. Hal ini menunjukkan ketergantungan DIY akan pasokan barang dan jasa dari luar provinsi, baik produk pertanian maupun hasil industri pengolahan lainnya.

B. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran

Kebijakan pertumbuhan ekonomi merupakan aspek terpenting dalam setiap perumusan kebijakan makro yang disusun oleh pemerintah, selain upaya untuk menekan laju inflasi, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, maupun untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang serta defisit neraca pembayaran (Nellis dan Parker, 2003). Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil merupakan target yang ingin dicapai oleh setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan, baik itu pemerintah maupun pihak-pihak lain yang terlibat.

Sebagai bagian dari sisi komponen pengeluaran PDRB konsumsi rumah tangga tahun 2015 mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,08 persen. Menurut jenis pengeluaran, kelompok makanan pada tahun 2015 tumbuh sebesar 3,70 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 2,71 persen. Sementara itu pertumbuhan kelompok nonmakanan sebesar 5,61 persen lebih rendah dibanding tahun 2014 yang tumbuh sebesar 6,62 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini didorong oleh meningkatnya jumlah penduduk dan membaiknya pendapatan rumah tangga. Meskipun peningkatan tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah penduduk menuntut pengeluaran yang lebih besar baik untuk konsumsi makanan maupun

konsumsi nonmakanan. Demikian pula membaiknya pendapatan rumah tangga akan mendorong permintaan yang lebih tinggi untuk barang dan jasa yang lebih berkualitas.

Tabel 5.4. Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran di DIY, 2011–2015 (persen)

Jenis Pengeluaran	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga	6,45	6,44	4,85	5,08	4,87
a. Makanan dan Minuman	4,45	5,31	2,36	2,71	3,70
b. Bukan Makanan	7,87	7,22	6,52	6,62	5,61
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	13,89	8,90	10,42	10,58	2,90
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	4,60	5,91	5,90	4,35	5,32
4. Pembentukan modal tetap bruto	4,44	5,28	5,12	5,78	4,34
5. Perubahan Inventori	-18,37	-1,02	3,44	11,78	4,73
6. Ekspor Luar Negeri	-6,48	15,36	20,71	20,80	3,15
7. Impor Luar Negeri	-0,94	26,27	17,87	44,03	15,46
8. Net Ekspor Antardaerah	4,25	13,92	5,35	2,61	-4,45
P D R B	5,21	5,37	5,47	5,16	4,94

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Ket: *) angka sementara; **) angka sangat sementara

BAB 6

KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI

- A. Tren Pertumbuhan
- B. Penduduk dan Ketenagakerjaan
- C. Kemiskinan dan Ketimpangan
- D. Disparitas Antar Kabupaten/Kota
- E. Capaian Kualitas Pertumbuhan
Ekonomi

BAB VI

KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI

Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ialah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu. Di beberapa negara berkembang tak kecuali di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama pembangunan. Namun persoalannya ialah sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja seperti yang selama ini dilakukan. Melainkan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran (Prasetyo, 2008). Selain itu, pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas ketika semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian (Firmansyah, 2014).

Munculnya gagasan mengenai pertumbuhan berkualitas (*the quality of growth*) dipicu oleh beberapa alasan, diantaranya sebagai berikut: Pertama, pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang dicapai ternyata tidak serta-merta diiringi dengan pemerataan dan perbaikan distribusi pendapatan, angka (koefisien) ketimpangan distribusi pendapatan cenderung tidak bergeser secara signifikan selama beberapa tahun terakhir. Kedua, kenaikan PDB/PDRB dan PDB/PDRB per kapita kurang berhasil mereduksi jumlah dan persentase penduduk miskin. Ketiga, perhatian yang berlebihan untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya investasi modal dan berbagai aspek finansial lainnya ternyata justru menanamkan dan menyuburkan praktek konglomerasi serta menciptakan *enclave* ekonomi yaitu sumberdaya dan asset memusat pada segelintir kecil orang. Keempat, keinginan untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, justru telah mengorbankan aspek lingkungan dan merusak kehidupan ekosistem. Kelima, pembangunan yang terlalu ekonomi-sentris telah menyebabkan rapuhnya nilai sosial (*social values*) dan memudahkan kohesi sosial (*social cohesion*) dalam masyarakat. Akhir-akhir ini, sering dijumpai berbagai kerusuhan sosial, perampasan, kriminalitas, konflik vertikal dan horisontal, dan seterusnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah ukuran yang cukup penting dan menjadi primadona yang selalu ingin diraih oleh banyak negara atau setiap wilayah sampai dengan level kabupaten/kota. Namun kesalahan memandang pertumbuhan PDB/PDRB di masa lalu dan bahkan hingga kini yang telah salah menempatkan manusia yang seharusnya menjadi

subyek maupun obyek dari kemajuan ekonomi justru hanya menjadi penonton dari pembangunan.

Bisa jadi pertumbuhan ekonomi yang dicapai hanya jebakan angka yang cantik tanpa manis dirasakan rakyatnya karena kemajuan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang, sedangkan efek pahitnya pertumbuhan ditanggung seluruh masyarakat. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas akan menjadi beban pemerintah karena pemerintah mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan dalam banyak hal.

A. Tren Pertumbuhan

1. Tren Pertumbuhan Kategori

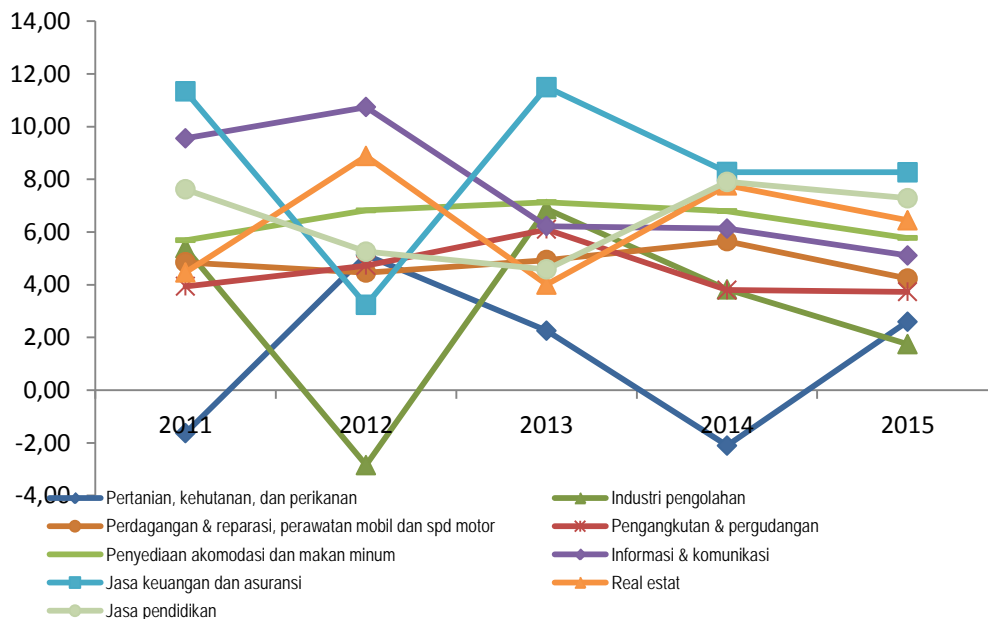
Secara umum selama kurun waktu 2011-2015 pencapaian pertumbuhan ekonomi sedang tidak pada kondisi yang menggembirakan, baik pada di tingkat nasional maupun lingkup DIY. Meskipun secara rata-rata pertumbuhan ekonomi masih mencapai 5,24 persen per tahun, tetapi arah perkembangan pertumbuhan sampai dengan tahun 2015 masih menurun.

Dilihat arah kecenderungan pertumbuhan menurut kategori, fluktuasi pertumbuhan pertanian relatif tinggi bahkan pertanian pernah mengalami kontraksi pada tahun 2011 dan 2014. Kategori pertanian di DIY masih menggantungkan pada golongan pokok usaha pertanian tanaman pangan sehingga naik turunnya produksi usaha pertanian tanaman pangan sangat berpengaruh terhadap pencapaian nilai tambah kategori pertanian.

Kinerja pertumbuhan industri pengolahan juga mengalami situasi serupa dengan pertanian. Pencapaian pertumbuhan terbaik di tahun 2013 yang sebesar 6,87 persen masih sulit dikembalikan arah kecenderungan pertumbuhan yang meningkat. Berbeda dengan kategori konstruksi yang meskipun belum menunjukkan arah pertumbuhan yang naik, pencapaian pertumbuhan di atas 4 persen masih bisa dipertahankan hingga tahun 2015.

Kategori perdagangan dan reparasi mobil dan reparasi sepeda motor mempunyai prestasi pertumbuhan yang lebih baik. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan yang dicapai di atas 5 persen dan pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2012 yaitu sebesar 8,66 persen. Oleh karena itu rata-rata pertumbuhan lapangan usaha ini bisa mencapai 6,4 persen per tahun. Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai pertumbuhan dengan arah perkembangan seperti perdagangan.

Gambar 6.1. Pertumbuhan Beberapa Kategori, 2011-2015 (persen)



Kategori informasi dan komunikasi telah melewati masa emas pertumbuhan pada tahun 2012 karena setelah itu arah pertumbuhan semakin melambat meskipun masih di atas 5 persen. Rata-rata pertumbuhan industri informasi dan komunikasi sebesar 7,03 persen. Sementara itu industri jasa keuangan yang tumbuh secara rata-rata 7,8 persen per tahun prestasi pertumbuhan tertinggi adalah di atas 11 persen yaitu tahun 2011 dan 2013.

2. Tren Pertumbuhan Konsumsi

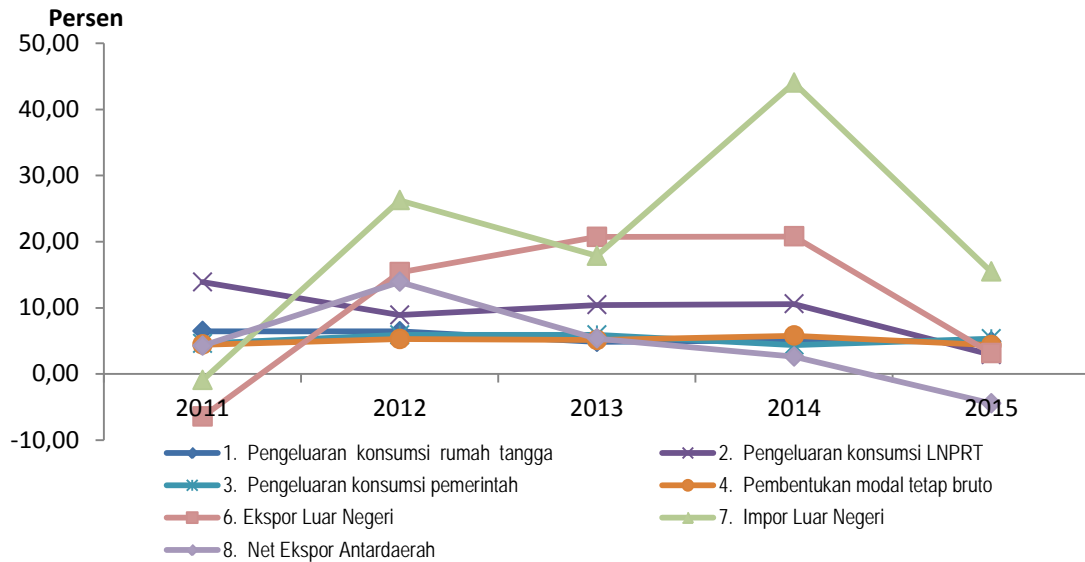
Pada sisi pengeluaran atau konsumsi, tren pertumbuhan komponen-komponen pengeluaran selama periode 2011-2015 terlihat tidak menunjukkan arah perkembangan yang baik. Impor luar negeri mempunyai tren meningkat tetapi karena merupakan faktor pengurang dalam PDRB maka hal ini mencerminkan kondisi yang semakin besar akan ketergantungan konsumsi barang dan jasa dari luar negeri. Ekspor luar negeri bila diamati pertumbuhan *point to point* tampak meningkat, tetapi bila dilihat kecenderungan selama lima tahun terakhir peningkatannya masih bersifat kurva yang menurun.

Laju pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB relatif stabil dan kecenderungan arah pertumbuhannya terlihat datar. Hal yang sama terjadi pada kecenderungan arah pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Meningkatnya kecenderungan impor luar negeri dan menurunnya kecenderungan net ekspor antardaerah semestinya menjadi momentum untuk menggalakkan peningkatan kapasitas dan kualitas produk pertanian dan industri pengolahan yang dapat dikonsumsi sendiri. Masyarakat perlu disadarkan untuk mencintai produk sendiri. Pemerintah daerah

memulai dengan kebijakan atau peraturan agar masyarakat lebih membela produk lokal. Contoh riil adalah slogan yang diaplikasikan di Kulon Progo, yaitu **“Bela-Beli Kulon Progo”**.

Gambar 6.2. Pertumbuhan Komponen Pengeluaran, 2011-2015 (persen)

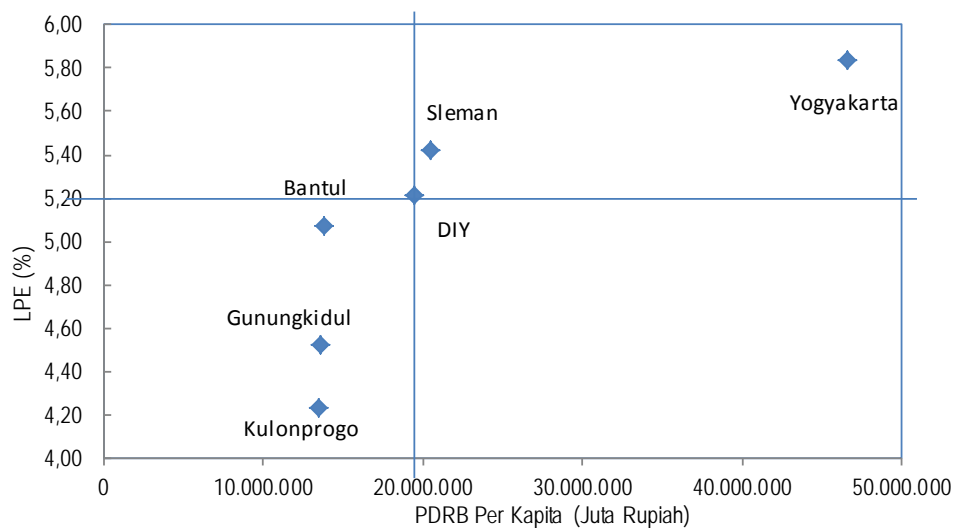


B. Sebaran Pertumbuhan Kabupaten/Kota

Tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah pada periode 2011–2015 dapat dilihat dari posisi masing-masing kabupaten/kota terhadap Pemda DIY pada **bidang pencaran (scattered plot)** diperkenalkan oleh Klassen dengan sebutan **Tipologi Klassen**. Mendasarkan pada metode Tipologi Klassen ini, laju pertumbuhan ekonomi dan nilai PDRB per kapita kabupaten/kota dipetakan dan hasilnya seperti yang terlihat pada Gambar 6.3 dan Gambar 6.4.

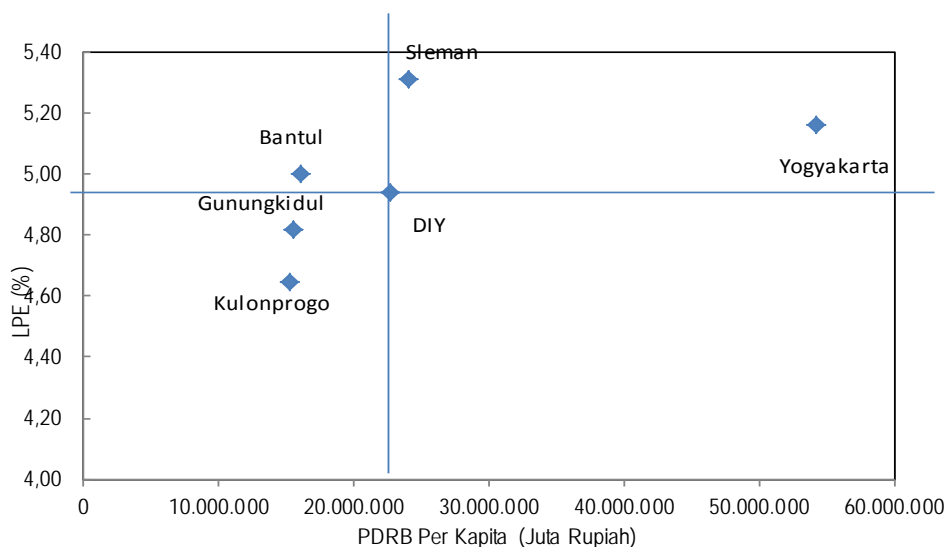
Pada tahun 2011, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menjadi daerah maju dan cepat tumbuh, sementara Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo berada pada kuadran IV yang merupakan daerah tertinggal untuk perbandingan lokal DIY. Tahun 2010, Sleman masuk kuadran II menyusul Kota Yogyakarta sebagai daerah maju dan cepat tumbuh. Namun posisi Sleman masih rentan karena di ambang batas bawah. Sebelum tahun 2011 biasanya Bantul terkategori di kuadran I sebagai daerah berkembang cepat. Posisi Kulon Progo dan Gunungkidul tetap sebagai daerah tertinggal. Masih sulit untuk dua kabupaten ini untuk mengejar pembangunan kabupaten/kota yang lain bila tidak ada mega proyek yang mampu melompati nilai tambah ekonomi (Gambar 6.3).

Gambar 6.3. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2011



Kecenderungan melambatnya pertumbuhan ekonomi ternyata berdampak pada pergeseran posisi kabupaten/kota. Di tahun 2015 Bantul naik masuk pada kuadran I yaitu menjadi daerah yang berkembang cepat karena laju pertumbuhannya melampaui rata-rata provinsi meskipun PDRB per kapitanya masih di bawah rata-rata provinsi. Sementara Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta posisinya. Pergeseran Sleman yang masih di kuadran II disebabkan karena pertumbuhannya menjauhi pertumbuhan rata-rata provinsi, sedangkan Kota Yogyakarta pertumbuhannya yang melambat sehingga mendekati pertumbuhan rata-rata provinsi. Gunungkidul dan Kulon Progo juga stagnan pada kategori daerah tertinggal namun levelnya bergerak ke atas mendekati daerah berkembang cepat (Gambar 6.4).

Gambar 6.4. Plot PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2015



Skema Tipologi Klassen menurut kabupaten/kota wilayah DIY di atas menunjukkan bahwa kesenjangan antarwilayah di DIY masih menjadi kendala dalam pembangunan daerah. Terkait dengan permasalahan tersebut perlu dirumuskan perencanaan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antarkabupaten/kota yaitu dengan sasaran memacu peningkatan PDRB per kapita untuk Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo melalui eskalasi aktivitas ekonomi di beberapa lapangan usaha yang prospektif.

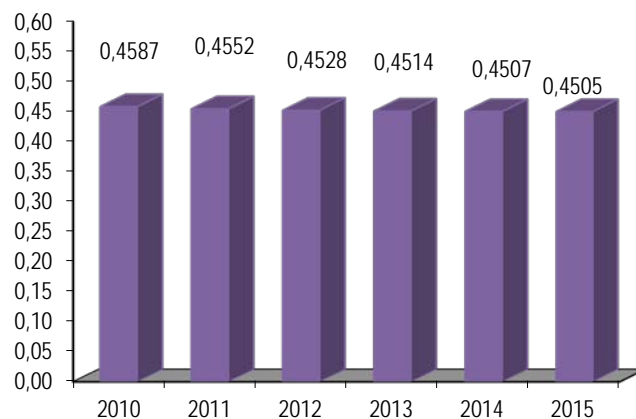
C. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar pembangunan suatu wilayah. Eksistensi SDM yang berkualitas merupakan kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM dapat dilihat dari beberapa indikator kependudukan dan ketenagakerjaan, antara lain: angka beban tanggungan (*dependency ratio*), tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, serta tingkat pengangguran terbuka. Di DIY antara lain

1. Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio/DR*)

Makna dari DR adalah pada setiap 100 orang penduduk DIY yang produktif secara ekonomis (umur 15-64 tahun) harus menanggung sejumlah penduduk nonproduktif yaitu kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas. Selama periode lima tahun terakhir, yaitu 2011 sampai dengan 2015, angka beban tanggungan penduduk DIY belum mengalami perubahan yang nyata. Pada tahun 2015 angka DR sebesar 45,0 sedikit lebih rendah dibanding angka DR tahun 2011 yang sebesar 45,5. Penurunan angka DR yang hanya sekitar 0,5 poin tersebut mengindikasikan bahwa selama lima tahun terakhir beban tanggungan penduduk usia produktif secara jumlah hanya berkurang sedikit. Kondisi ini dalam sudut pandang ekonomi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk karena bila rata-rata pendapatan penduduk usia produktif tidak naik atau

Gambar 6.5. Angka Beban Tanggungan Penduduk DIY, 2010-2015



kenaikannya hanya menyesuaikan inflasi harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari maka bisa dikatakan tidak ada peningkatan kesejahteraan bagi penduduk DIY.

Angka ketergantungan DIY masuk dalam kelompok tinggi, karena lebih dari 41. Rasio beban tanggungan penduduk DIY yang cukup tinggi merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan ekonomi daerah, karena sebagian pendapatan yang diperoleh oleh golongan yang produktif harus dibagikan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang belum/tidak produktif. Pada tahun 2014 angka DR sebesar 45,07 turun menjadi 45,05 di tahun 2015, atau dalam setahun penurunan angka DR sekitar 0,02 poin. Meskipun penurunan angka DR tersebut relatif kecil namun bila dikalkulasi secara ekonomi anggaran pembangunan yang bisa lebih dioptimalkan cukup besar. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, usia produktif DIY tahun 2015 sebanyak 2.536.556 orang. Dengan demikian sejumlah penduduk usia produktif tersebut beban tanggungannya berkurang sebanyak 507 orang. Data rata-rata pengeluaran per kapita setahun penduduk DIY berdasarkan hasil Susenas Maret 2015 adalah sebesar Rp11.143.226, sehingga anggaran yang bisa dialihkan oleh karena berkurangnya angka DR tersebut sekitar 5,7 miliar rupiah. Suatu nilai yang cukup besar untuk dialokasikan baik untuk program pembangunan ekonomi maupun pembangunan sumber daya manusia. Namun realita permasalahannya memang tidak sesederhana itu saja karena jika dikaitkan dengan ketenagakerjaan tidak semua angkatan kerja mempunyai kesempatan kerja atau tertampung di suatu lapangan pekerjaan.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Dalam ranah perekonomian tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan produksi yang berarti pula memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tenaga kerja yang berkualitas adalah tenaga kerja yang dilengkapi dengan pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan, pelatihan, dan juga dari pengalaman. Tenaga kerja seperti inilah merupakan modal manusia (*human capital*) yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dalam upaya meningkatkan produktivitas, yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

TPAK mencerminkan ketersediaan angkatan kerja di antara penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Ketersediaan angkatan kerja menunjukkan kemampuan penduduk dalam beraktivitas secara ekonomi, karena mencakup jumlah penduduk yang bekerja dan penduduk yang berupaya untuk memperoleh pekerjaan. Sebagai pembanding adalah penduduk usia kerja atau berumur 15 tahun ke atas.

Pada tahun 2011 angka TPAK antara perkotaan dan perdesaan disparitasnya kecil sekali yaitu keduanya sekitar 69 persen. Namun di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2014 terjadi kesenjangan yang melebar antara daerah perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya setelah itu selama setahun terakhir taraf kesenjangan TPAK mereda. Dilihat pada klasifikasi daerah perkotaan dan perdesaan, TPAK daerah perdesaan jauh lebih tinggi

dibanding di daerah perkotaan. Namun demikian level TPAK di tahun 2015 ternyata menurun, artinya proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja berkurang.

Gambar 6.6. Perkembangan TPAK Penduduk DIY menurut Daerah, 2011-2015



TPAK DIY tahun 2015 tercatat sebesar 68,38 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 71,05 persen, yang berarti terjadi penurunan porsi penduduk yang terserap pada lapangan kerja dan yang siap masuk ke bursa kerja. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja meskipun sebagian dari mereka masih sebagai angkatan kerja yang menganggur.

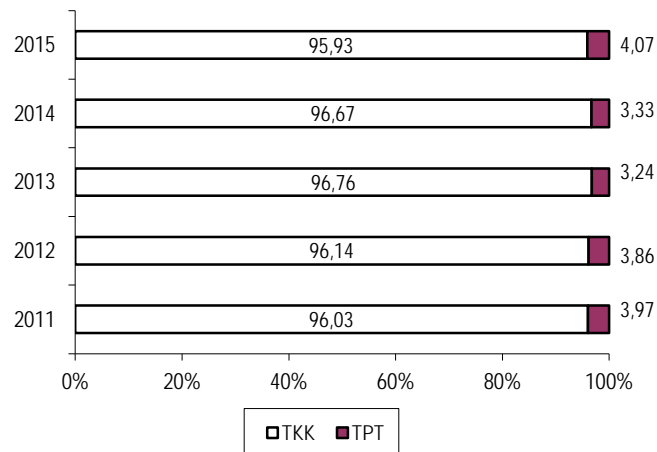
TPAK daerah perdesaan lebih tinggi dibanding dengan TPAK daerah perkotaan dan kesenjangannya semakin melebar sejak 2012. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena kondisi komposisi kependudukan di daerah perkotaan yaitu besarnya jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas tetapi sebagian besar masuk dalam golongan bukan angkatan kerja karena sekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan yang merasa sudah cukup dan tidak perlu melakukan kegiatan ekonomi, serta lain-lain yang tidak melakukan kegiatan apapun yang bernilai ekonomi. Sementara keadaan di desa oleh karena keadaan yang menuntut harus mencukupi kebutuhan hidup dengan mengerjakan lahan pertanian yang umumnya dibantu oleh anggota keluarga atau famili lain sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Pekerja keluarga yang dari anggota rumah tangga dalam konsep ketenagakerjaan kegiatan utama berdasarkan waktu terbanyak yang digunakan biasanya sebagai ibu rumah tangga, atau anak-anak yang sudah dewasa tetapi masih sekolah. Komposisi kependudukan di perdesaan juga mempengaruhi angka TPAK karena penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah menamatkan pendidikannya cenderung lebih banyak merantau ke kota sehingga proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas di perdesaan lebih rendah.

3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator ketenagakerjaan lebih spesifik bisa dilihat dari angka Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). TKK bermakna menjelaskan tentang keterlibatan penduduk dalam kegiatan perekonomian karena TKK merupakan bagian angkatan kerja yang benar-benar bekerja untuk memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan. Oleh karena itu TKK tersebut juga dapat dilihat menurut lapangan usahanya.

Sekelompok penduduk lain yang merupakan bagian dari angkatan kerja adalah tenaga kerja yang tidak bekerja. Kategori mereka yang tidak bekerja adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, atau mereka yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Keempat kategori yang masih bagian dari angkatan kerja disebut sebagai penganggur dan indikator pengukurannya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Gambar 6.7. TKK dan TPT Penduduk DIY, 2011-2015 (persen)



Jumlah penduduk usia bekerja atau usia 15 tahun ke atas di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2015 mencapai 2,883 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 1,24 persen dibanding keadaan pada Agustus 2014 yang sebanyak 2,848 juta orang atau bertambah 35,23 ribu orang. Namun penambahan penduduk usia bekerja tersebut ternyata tidak diikuti oleh peningkatan jumlah angkatan kerja, karena jumlah angkatan kerja di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2015 mengalami penurunan sekitar 52 ribu orang atau sebesar 2,57 persen dibanding angkatan kerja Agustus 2014, yaitu dari 2,023 juta orang menjadi 1,971 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2015 juga mengalami penurunan sebanyak 3,42 persen dibanding keadaan pada Agustus 2014, yaitu dari 1,96 juta orang menjadi 1,89 juta orang atau berkurang sekitar 67 ribu orang.

Profil ketenagakerjaan dapat juga diamati mengenai penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan persentase jumlah penduduk yang bekerja selama Agustus 2014-Agustus 2015 adalah sektor pertambangan/penggalan sebesar 12,53 persen, sektor jasa-jasa sebesar 7,37 persen,

sektor konstruksi sebesar 5,88 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 1,12 persen. Sementara sektor lainnya, yaitu sektor pertanian, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor perdagangan, sektor transportasi dan komunikasi, dan sektor perbankan menurun persentasenya.

Fenomena menurunnya jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2015 tersebut di atas berdampak menyebabkan jumlah penganggur mengalami peningkatan sebesar 19,1 persen, sehingga angka TPT di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2015 meningkat menjadi 4,07 persen, atau mengalami peningkatan 0,74 poin dibanding TPT Agustus 2014 yang sebesar 3,33 persen. Selama kurun waktu 2011-2015 kondisi terbaik ketenagakerjaan dilihat dari sisi elastisnya penawaran dan permintaan kesempatan kerja dialami pada tahun 2013 karena angka TPT mencapai titik terendah yaitu 3,24 persen.

Secara umum, profil tingkat pengangguran di DIY mempunyai ciri bahwa TPT laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Pada kondisi Agustus 2015 TPT laki-laki dan perempuan, masing-masing sebesar 3,72 persen dan 4,54 persen. Kondisi ini bisa dijelaskan bahwa kesempatan kerja perempuan cenderung lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Selain itu, pada momentum-momentum tertentu penduduk laki-laki lebih besar peluangnya untuk memasuki pasar kerja dibandingkan perempuan, sehingga angka pengangguran perempuan lebih tinggi. Demikian pula penyebab lain berasal dari kultur budaya patriarki Jawa yang menempatkan perempuan dalam keluarga sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mengurus anak, dan berdandan (*macak*- Jawa) pada sebagian keluarga masih membatasi perempuan untuk memanfaatkan potensi spiritual dan intelektualnya.

Ciri lain terkait pengangguran di DIY adalah TPT di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Dilihat menurut spasial klasifikasi wilayah perdesaan dan perkotaan, tahun 2015 TPT perdesaan dan perkotaan masing-masing sebesar 3,02 persen dan 4,55 persen. Sementara TPT provinsi bila dilihat menurut agregasi klasifikasi perkotaan dan pedesaan, sebesar 3,13 persen pengangguran ada di perkotaan dan 0,94 persen pengangguran ada di perdesaan. Diduga, di daerah perdesaan karena didominasi oleh lapangan usaha pertanian, penyerapan tenaga kerja relatif tinggi. Penduduk usia kerja dengan mudah dapat bekerja di lapangan usaha pertanian meskipun sebagai pekerja keluarga atau pekerja bebas (buruh tani) karena tidak membutuhkan keahlian atau pendidikan yang tinggi.

Bila dilihat menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, tingkat pengangguran cenderung tinggi untuk mereka yang berpendidikan tinggi (SLTA ke atas), dan cenderung rendah untuk mereka yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah). Pada tahun 2015 TPT untuk kelompok yang berpendidikan SLTA sebesar 2,21 persen, yang berpendidikan sarjana (DI/DII/DIII/Sarjana) sebesar 0,81 persen, yang berpendidikan SLTP sebesar 0,62 persen, dan yang berpendidikan SD sebanyak 0,43 persen (Tabel 6.1).

Tabel 6.1. TPT menurut Pendidikan, Daerah dan Jenis Kelamin, 2015 *)

Pendidikan	Kota	Desa	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. SD, Belum tamat SD, atau Tidak Pernah Sekolah	0,37	0,06	0,31	0,12	0,43
2. SMP	0,37	0,25	0,37	0,25	0,62
3. SMA Umum	0,70	0,14	0,26	0,58	0,84
4. SMK	0,97	0,40	0,88	0,49	1,37
5. D I/II/III	0,04	0,03	0,05	0,02	0,07
6. Universitas	0,68	0,06	0,26	0,47	0,73
Total	3,13	0,94	2,13	1,94	4,07

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta
Ket:erangan: * Kondisi Agustus 2015

4. Elastisitas Kesempatan Kerja

Koefisien Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK) merupakan angka yang menunjukkan besarnya persentase jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau diminta terhadap besarnya persentase perubahan jumlah output atau pertumbuhan pada setiap sektor. Melalui EKK, diperoleh indikasi secara makro bahwa suatu sektor atau lapangan usaha dapat dikategorikan sebagai usaha yang bersifat padat modal atau padat karya.

EKK dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja dan rata-rata pertumbuhan ekonomi dengan mengambil periode kajian tahun 2011-2015. Secara umum, pada periode pengamatan menghasilkan *inelastis* untuk EKK di DIY. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen tingkat kesempatan kerja kurang dari 1 persen (*decreasing return to scale*), yaitu 0,10 persen. EKK yang inelastis ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di DIY dalam kurun waktu tersebut lebih bersifat padat modal (*capital Intensive*) dan kurang bisa menyerap peluang kerja. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi mungkin lebih berbasis pada industri dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih sehingga kesempatan kerja yang tersedia semakin sedikit.

Menurunnya kondisi perekonomian secara makro ternyata telah menyebabkan penurunan elastisitas kesempatan kerja di sebagian besar sektor ekonomi. Sektor pertanian yang kontribusinya terhadap PDRB semakin menurun ternyata mempengaruhi kesempatan kerja sektor pertanian menjadi inelastis. Kondisi serupa terjadi pula pada sektor listrik, gas, dan air bersih. Sementara itu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor jasa-jasa merupakan dua sektor yang mempunyai EKK lebih dari 1 persen, artinya kesempatan kerja bersifat elastis yaitu setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan meningkatkan perubahan kesempatan kerja lebih besar dari 1 persen (*increasing return to scale*), yaitu masing-masing sebesar 3 persen dan 1,8 persen (Tabel 6.2).

Tabel 6.2. Rata-rata Pertumbuhan Kesempatan Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi, Elastisitas Kesempatan Kerja dan Penyerapan Tenaga Kerja menurut Sektor di DIY, 2011-2015 (persen)

Sektor	Rata-rata Pertum- buhan Kesempat- an Kerja	Rata-rata Pertum- buhan Ekonomi	Elasti- sitas Kesem- patan Kerja	Penyerapan Tenaga Kerja (%)	
				2011	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	-2,56	1,94	-1,32	26,17	23,08
2. Pertambangan & Penggalian	5,82	1,95	2,99	0,68	0,83
3. Industri Pengolahan	0,44	2,34	0,19	14,68	14,61
4. Listrik, Gas & Air Bersih	-13,54	3,82	-3,55	0,25	0,13
5. Konstruksi	3,49	4,82	0,72	7,30	8,19
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	0,46	6,54	0,07	25,76	25,67
7. Pengangkutan & Komunikasi	-2,81	6,17	-0,46	3,70	3,23
8. Keuangan, Real Estat, & Jasa Perusahaan	2,83	7,04	0,40	2,74	3,00
9. Jasa-jasa	3,78	2,08	1,82	18,73	21,25
Total	0,55	5,24	0,10	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data SAKERNAS bulan Agustus

Berbeda dengan periode analisis sebelumnya, yang menempatkan EKK tertinggi pada sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan, pada periode 2011-2015 ini, setiap pertumbuhan nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1 persen mampu mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 3 persen dan merupakan elastisitas tertinggi. Namun oleh karena di sektor pertambangan dan penggalian jumlah tenaga kerja pada sektor ini hanya sekitar 0,83 persen dari total tenaga kerja, maka EKK yang tinggi tersebut hanya mampu mendorong penyerapan sekitar 469 orang tenaga kerja jiwa per tahun. Sementara sektor jasa-jasa yang juga bersifat elastis dengan angka EKK sebesar 1,82 persen dan persentase serapan tenaga kerja terhadap jumlah tenaga sebesar 21,25 persen, mampu mendorong peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja sekitar 7.301 orang pada tahun 2015 dan merupakan yang terbesar di antara sektor yang lain. Sektor konstruksi yang meskipun mempunyai EKK hanya 0,72 persen, atau masuk dalam kelompok *inelastis*, dengan serapan tenaga kerja sebesar 8,19 persen terhadap jumlah tenaga kerja mampu mendorong peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.121 orang.

5. Produktivitas Tenaga Kerja

Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) – ASEAN *Economic Community* (AEC) - yaitu sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN. Maksud dari pemberlakuan pasar bebas Asia Tenggara adalah untuk meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi China dan India dalam menarik investasi asing. Dalam pasar besar Asia Tenggara memungkinkan satu negara menjual

barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi tenaga kerja dan produk barang dan jasa semakin ketat. Negara-negara ASEAN harus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang trampil, cerdas, dan kompetitif. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Selain itu negara-negara Asia Tenggara mau tidak mau harus mengutamakan peningkatan kualitas produk barang dan jasa serta juga produktivitas tenaga kerja.

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja menghasilkan produk (Pangestu, 1997:41). Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya keterkaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Menurut J. Ravianto, (1986:3), tingkat produktivitas tenaga kerja diukur menggunakan pendekatan perbandingan antara nilai tambah dengan sumber daya yang terpakai.

Pada sebuah acara dialog di TVRI Yogyakarta Rabu malam 9 Maret 2016 antara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemda DIY, Ir. Gatot Saptadi, MM, dan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dra. Rahayu menarik untuk disimak beberapa poin terkait kesiapan DIY dalam menghadapi momentum MEA 2015. Beberapa catatan penting disebutkan tentang kesiapan masyarakat DIY dalam menghadapi MEA meliputi peningkatan kualitas produk unggulan seperti batik sebagai ciri khas Yogyakarta, peningkatan kualitas SDM, investasi yang sehat berupa perijinan mudah dan sertifikasi, penyiapan infrastruktur berupa transportasi dan sinkronisasi program antara Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY, dan peningkatan kualitas hasil usaha kecil dan mikro (UKM) dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan serta melakukan kemitraan dengan BUMN dari Jakarta.

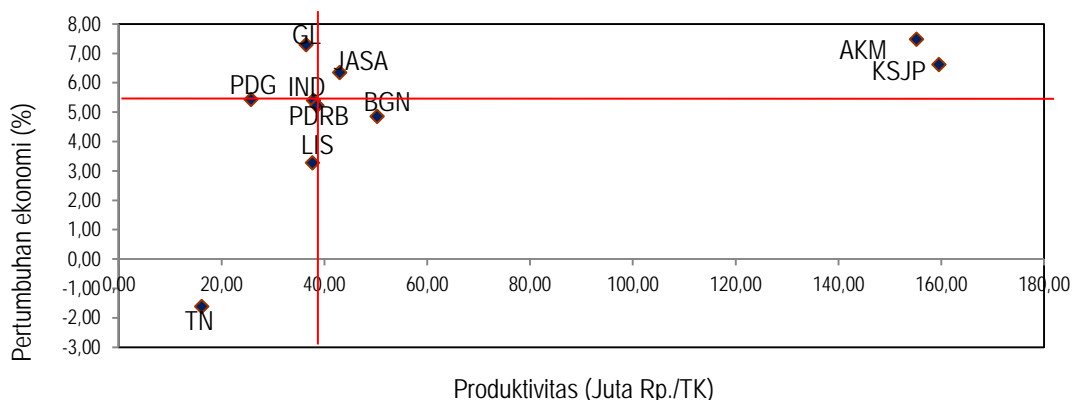
Tabel 6.3. Produktivitas Tenaga Kerja, Rata-rata Pertumbuhan Produksi dan Tenaga Kerja Per Tahun, dan Rata-rata Pertumbuhan PTK Sektoral di DIY, 2011–2015

Sektor	Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rp/ Org./ Th.)		Rata-rata Pertumbuhan 2011 – 2015 (%)		Rata-rata Pertumbuhan Produktivitas TK(%)
	2011	2015	Ekonomi	Kesempatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	16,12	24,85	1,94	-2,56	11,44
2. Pertambangan & Penggalian	36,42	36,50	1,95	5,82	0,06
3. Industri Pengolahan	37,85	47,89	2,34	0,44	6,06
4. Listrik, Gas & Air Bersih	37,65	79,77	3,82	-13,54	20,65
5. Konstruksi	50,23	61,31	4,82	3,49	5,11
6. Perdagangan, Hotel, & Restoran	25,74	38,58	6,54	0,46	10,64
7. Pengangkutan & Komunikasi	155,14	229,19	6,17	-2,81	10,25
8. Keuangan, Real Estat, & Jasa Perusahaan	159,51	215,60	7,04	2,83	7,82
9. Jasa-jasa	42,97	54,96	2,08	3,78	6,34
Total	38,57	53,61	5,24	0,55	8,58

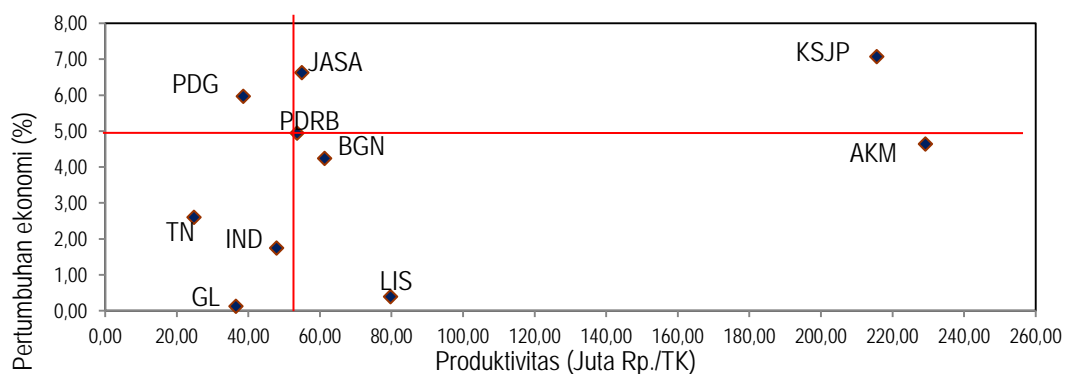
Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Selama periode 2011-2015, rata-rata pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja (PTK) empat sektor ekonomi sangat mengesankan, yaitu tumbuh di atas 10 persen per tahun. Empat sektor tersebut adalah pertanian, listrik, gas, dan air bersih, perdagangan, hotel, dan restoran, dan pengangkutan dan transportasi (Tabel 6.3). Di tengah kondisi pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang sedang lesu dan tren pertumbuhan ekonomi sedang menurun, ternyata rata-rata pertumbuhan PTK di DIY terbilang cukup tinggi, yaitu mencapai 8,6 persen per tahun. Hal ini menjadi salah satu indikator ciri khas kekuatan pondasi ekonomi DIY yang berbasis pada industri ekonomi kreatif dan kerakyatan yang tetap bertahan meskipun kondisi perekonomian secara makro sedang tidak kondusif. Dikaji dari sisi produktivitas, bisa dilihat bahwa di awal periode 2011 produktivitas tenaga kerja sebesar Rp38,6 juta per pekerja setahun, atau sekitar Rp105,7 ribu per orang per hari untuk 7 hari kerja seminggu atau Rp123,6 ribu per orang per hari untuk 6 hari kerja seminggu. Produktivitas tenaga kerja tahun 2015 naik mencapai Rp53,6 juta per pekerja setahun, atau sekitar Rp146,9 ribu per orang per hari untuk 7 hari kerja seminggu atau sekitar Rp171,8 ribu per orang per hari bila dihitung untuk 6 hari kerja seminggu.

Gambar 6.8. Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2011



Gambar 6.9. Plot Produktivitas Tenaga Kerja dan Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Sektor di DIY Tahun 2015



Dilihat secara sektoral, produktivitas tertinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan yang masing-masing memiliki produktivitas di atas dua ratus juta per pekerja setahun. Dua sektor tersebut nilai produktivitasnya jauh di atas sektor-sektor yang lain dan secara konsisten memimpin baik di awal maupun di akhir periode kajian.

Berdasarkan analisis tipologi Klassen di tahun 2011 dan 2015, dalam kurun waktu lima tahun telah terjadi perubahan capaian pertumbuhan dan produktivitas tenaga kerja. Meskipun menurunnya pertumbuhan ekonomi secara makro tidak begitu nyata mempengaruhi kinerja produktivitas tenaga kerja secara umum, namun ternyata mampu mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor. Sektor Perdagangan, hotel, dan restoran, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan mampu bertahan tumbuh di atas rata-rata. Sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor angkutan dan komunikasi merupakan sektor yang pertumbuhannya turun drastis. Sementara sektor-sektor lainnya, yaitu sektor pertanian, listrik, gas, dan air bersih, dan sektor bangunan pencapaian pertumbuhannya belum beranjak yaitu di bawah rata-rata.

Dilihat dari dimensi pencapaian produktivitas, secara rata-rata terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sektor listrik, gas, dan air bersih yang pertumbuhan nilai tambah atau outputnya turun drastis, ternyata produktivitasnya meningkat di atas rata-rata. Peningkatan produktivitas ini lebih dipengaruhi oleh adanya penurunan jumlah tenaga kerja sementara jumlah outputnya meningkat.

Melalui analisis Tipologi Klassen dengan mendasarkan pada indikator produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sektoral, kategori keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dan kategori jasa-jasa secara konsisten di tahun 2011 dan 2015 mantap masuk kategori “sektor yang produktif dan cepat tumbuh” (Gambar 6.8 dan 6.9). Sektor pertanian di periode awal dan akhir penelitian tetap menjadi satu-satunya kategori “sektor tertinggal”. Sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan di tahun 2015 kinerjanya turun pada kategori “sektor tertinggal”. Pada tahun 2015 ada tiga sektor yang masuk kategori “sektor yang produktif tetapi tumbuh tertekan”, yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor konstruksi, dan sektor angkutan dan komunikasi. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran tidak banyak bergeser yaitu berada pada kategori “sektor yang berkembang cepat”.

Berdasar plot tersebut tampak bahwa dari 17 kategori atau lapangan usaha yang dikelompokkan menjadi 9 sektor, 5 sektor dapat disebut sebagai sektor yang dapat diandalkan dengan pengertian bahwa sektor-sektor tersebut pencapaian produktivitas maupun pertumbuhannya berada di sekitar atau bahkan di atas rata-rata. Sektor-sektor tersebut adalah sektor bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa arah penguatan ekonomi DIY ada pada sektor perdagangan dan kelompok sektor tersier. Sementara untuk 4

sektor lainnya masih perlu dipacu kinerja ekonominya melalui campur tangan pemerintah yang lebih intensif dan inovatif baik dari kebijakan program maupun sampai dengan implementasi pembangunan yang tepat sasaran. Tentunya hal ini harus mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait, baik pemerintah pusat, pengembang, maupun pelaku usaha sendiri. Promosi investasi perlu digalakkan untuk mendatangkan pemodal besar sehingga tertarik mengembangkan usahanya di DIY, namun tentunya harus tetap menjaga keselarasan dengan nilai dan norma budaya asli Yogyakarta.

D. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah kompleks di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali DIY, karena menyangkut berbagai aspek lain seperti kesenjangan pendapatan penduduk, sosial, pengangguran, kriminalitas, kebodohan, dan ketimpangan. Meskipun dari sisi perkembangan ekonomi bisa diklaim mengalami banyak kemajuan, namun realitanya berbagai ketimpangan terjadi di tengah masyarakat sebagai pelaku dan juga sebagai obyek pembangunan.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi kegagalan pemenuhan hak-hak dasar bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan sosial. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan pangan, sandang, dan papan, namun kemiskinan juga berarti keterbatasan akses terhadap sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan/pendidikan, kesehatan, informasi, teknologi, dan modal.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi kemiskinan melahirkan kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut, didefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu: pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Dikategorikan kemiskinan relatif, bila seseorang yang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Seseorang atau sekelompok orang disebut hampir miskin, bila sebelumnya berkecukupan menjadi hampir miskin karena kondisi usahanya yang merosot.

Dilihat dari penyebabnya, secara garis besar kemiskinan dapat diungkapkan, sebagai berikut. Pertama, kemiskinan alami adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan alam suatu daerah yang miskin. Kedua, kemiskinan budaya yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sosial, budaya dan perilaku penduduk di daerah itu mendukung kemiskinan. Ketiga, kemiskinan struktur adalah kemiskinan yang disebabkan keadaan

struktur pemerintah, struktur pendistribusian fasilitas yang membuat suatu daerah penduduknya menjadi miskin.

Dalam bahasan ini hanya akan dibahas tentang kemiskinan yang angkanya dirilis oleh BPS dan digunakan secara resmi oleh pemerintah. Secara umum konsep kemiskinan yang digunakan BPS adalah kemiskinan absolut.

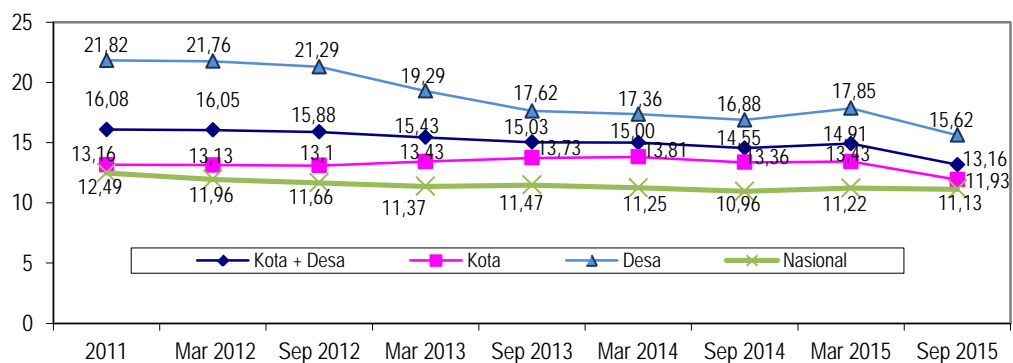
Untuk mendorong terwujudnya program pembangunan nasional yang terangkum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Pemerintah Daerah DIY membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Tim ini secara intensif mempunyai tugas pokok berkoordinasi dalam melakukan penguatan pembangunan yang sinergis, inklusif, dan berkeadilan dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah DIY. Dalam RPJMD DIY 2012-2017 disebutkan tugas tim ini diantaranya melakukan upaya untuk percepatan penurunan angka kemiskinan di DIY yang ditargetkan setiap tahun 2 persen.

Berbagai program penanggulangan kemiskinan di DIY telah diaplikasikan, diantaranya yaitu program pemberdayaan masyarakat UED-SP, BKD, UKM, Desa Priama, UPPKS, PNPM Mandiri Perkotaan, TMMD, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, KPM, PKK, P2WKSS, Kube, BOSDA, PKH, dan Beasiswa Miskin. Di tingkat lokal kabupaten misalnya melalui Program Bedah Rumah, Babonisasi, dan lain-lain.

1. Kemiskinan

Perhitungan kemiskinan yang dilakukan BPS dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), data dasar mengacu pada data Susenas. Pada September 2015 persentase penduduk miskin DIY dibanding September 2014 tercatat mengalami penurunan 1,39 poin, yaitu dari 14,55 persen menjadi 13,16 persen. Jumlah penduduk miskin DIY pada September 2014 sebanyak 432,59 ribu jiwa turun menjadi 485,56 jiwa kondisi September 2015. Rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir adalah 3,54 persen per tahun.

Gambar 6.10. Persentase Penduduk Miskin di DIY dan Nasional, 2011 - 2015



Posisi persentase penduduk miskin DIY masih lebih tinggi dibanding persentase penduduk miskin di tingkat nasional. Namun demikian dilihat kecenderungannya semakin menurun dan mendekati angka nasional. Pada kondisi September 2015 persentase penduduk miskin Indonesia sebanyak 11,13 persen (Gambar 6.10).

Masyarakat perkotaan dan perdesaan mempunyai pola hidup yang berbeda, baik dari mata pencaharian, tingkat konsumsi, maupun dari dimensi kehidupan sosialnya. Umumnya daerah perkotaan merupakan pusat kegiatan ekonomi dan juga pemerintahan sehingga jenis lapangan pekerjaan lebih beragam. Sementara daerah perdesaan biasanya dihuni oleh petani sehingga kesempatan kerja yang tersedia sebagian besar adalah lapangan pekerjaan pertanian sedangkan pilihan jenis pekerjaan lainnya sangat terbatas. Hal ini yang mendasari perlu untuk melihat perbedaan tingkat kemiskinan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Sampai dengan kondisi September 2015, persentase penduduk miskin di pedesaan jauh lebih tinggi dibanding dengan di perkotaan. Namun demikian tren laju penurunan persentase penduduk miskin di pedesaan jauh lebih cepat. Ini bisa menjadi indikasi bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan berhasil memacu pengurangan kemiskinan terutama di pedesaan. Persentase penduduk miskin di pedesaan tahun 2011 sebesar 21,82 persen turun menjadi 15,62 persen pada September 2015. Sementara di perkotaan persentase penduduk miskin turun dari 12,49 persen pada tahun 2011 menjadi 11,93 persen pada September 2015. Lebih jauh dilihat rata-rata penurunan selama lima tahun, di perkotaan turun sebesar 0,98 persen per tahun, sedangkan di pedesaan turun sebesar 6,88 persen per tahun.

Garis kemiskinan (GK) yang digunakan sebagai dasar penghitungan jumlah penduduk miskin seperti yang dijelaskan di atas, menunjukkan peningkatan sebesar 34,82 persen, yaitu dari Rp257.909,- per kapita per bulan pada tahun 2011 menjadi Rp347.721,- per kapita per bulan di tahun 2015. Kenaikan garis kemiskinan antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan harga (inflasi) komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat, pola konsumsi masyarakat, dan perubahan komoditas barang atau jasa yang dikonsumsi.

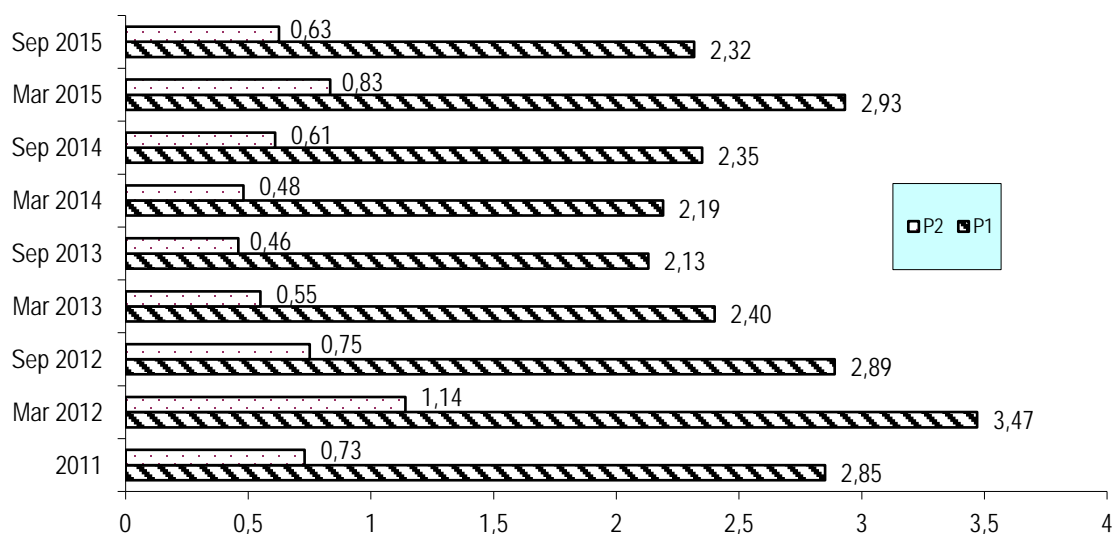
Ukuran kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya jumlah dan persentase penduduk miskin, namun perlu ukuran lain seperti **indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P_1)** dan **indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P_2)**. Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan kesenjangan/jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P_2) adalah kesenjangan/sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Dengan ukuran P_1 dan P_2 dapat diperkirakan seberapa besar kebutuhan dana operasional yang diperlukan untuk mengentaskan penduduk miskin hingga batas garis kemiskinan.

Perkembangan angka Indeks kedalaman (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) selama periode 2011-2015 relatif menunjukkan arah penurunan. Artinya, kesenjangan/

jarak antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan di DIY semakin berkurang. Demikian pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin kecil. Melalui dua ukuran ini (P_1 dan P_2) bisa dilihat keberhasilan dari program-program percepatan pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Pada tahun 2015 rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P_1) terukur sebesar 2,32, lebih baik dibanding kondisi tahun 2011 yang terukur sebesar 2,85. Sementara sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin juga mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik meskipun tidak sebaik kondisi 2013-2014. Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin 2015 berdasarkan indeks keparahan kemiskinan (P_2) sebesar 0,63 lebih rendah 0,1 poin bila dibanding kondisi 2011. Namun bila dilihat perkembangan selama dua tahun terakhir sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin belum menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih mengembirakan.

Gambar 6.11. Indeks Kedalaman (P_1) dan Indeks Keparahannya (P_2) Kemiskinan di DIY, 2011 – 2015



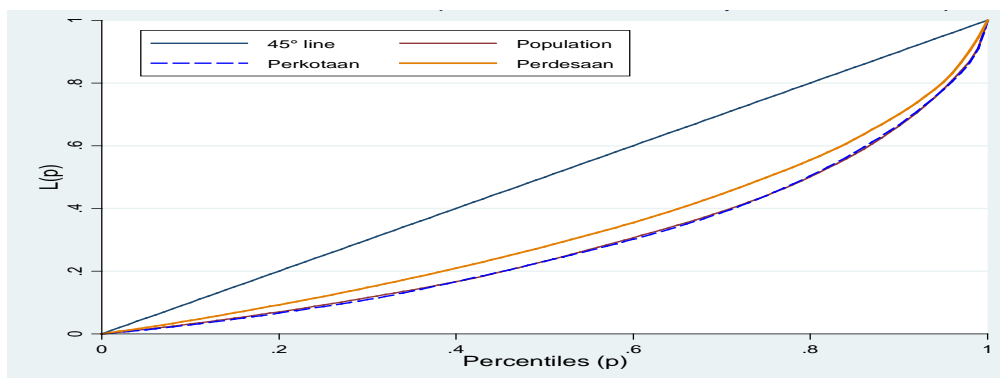
2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan yang disampaikan para pakar, namun pada kajian ini hanya menggunakan Kurva Lorenz, Rasio Gini, dan Kriteria Bank Dunia yang paling lazim digunakan. Ketiga ukuran ini cukup menjelaskan besaran nilai sehingga tingkat perubahan dari tahun ke tahun dapat diamati.

Pada Gambar 6.8 terlihat bahwa dari data Susenas September 2015 Kurva Lorenz masih jauh dari garis diagonal, ini mencerminkan distribusi pendapatan di DIY masih timpang atau belum merata. Demikian pula pada Gambar 6.9 terjelaskan bahwa

pemerataan pendapatan yang diukur dengan Rasio Gini perkembangannya juga masih belum menggembirakan. Selama periode 2011-2015 perkembangan pemerataan pendapatan belum menampakkan kecenderungan yang menggembirakan. Ketimpangan pendapatan yang diterima antarpenduduk meskipun masih dalam kategori moderat tetapi

Gambar 6.12. Kurva Lorenz DIY Hasil Susenas September 2015

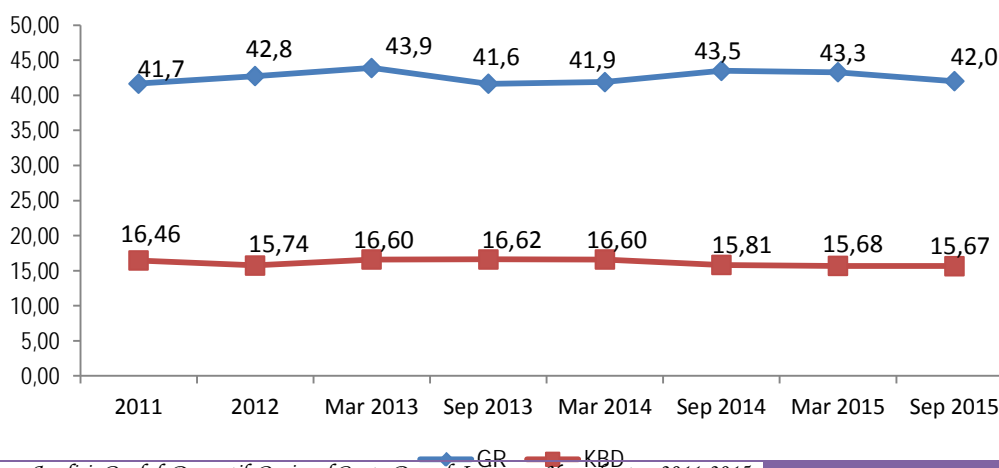


posisinya masih dekat dengan batas kategori timpang (50 persen ke atas).

Indikator lain untuk mendeteksi tingkat distribusi pendapatan adalah ukuran Kriteria Bank Dunia (KBD). Hasil hitungan ukuran ketimpangan KBD menjelaskan kondisi yang serupa. Persentase pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah semakin menurun dari 16,5 persen pada tahun 2011 menjadi 15,7 persen pada tahun 2015. Demikian pula 40 persen penduduk berpendapatan menengah porsi distribusi pendapatannya ditengarai semakin berkurang. Sebaliknya, pada golongan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi nampaknya mendapatkan porsi distribusi pendapatan yang semakin lebih besar dan hingga pada kondisi 2015 porsinya mencapai separoh dari total pendapatan.

Fenomena kenaikan Rasio Gini dan penurunan persentase pendapatan yang

Gambar 6.13. Rasio Gini dan KBD (Persentase Pendapatan yang diterima oleh 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah) di DIY, 2011-2015 (persen)



dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terrendah menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di DIY masih **timpang** , meskipun berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh H.T Oshima, ketimpangan pendapatan penduduk DIY masih dalam skala ketimpangan moderat (pada kisaran 30-50 persen). Berdasarkan skala ukuran kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan penduduk DIY juga masuk di skala moderat (*range* 12-17 persen).

Selama periode 2011–2015, pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terrendah berkurang sebesar 0,37 poin, dan pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan menengah juga berkurang sekitar 0,17 poin. Dibanding besarnya pengurangan persentase pendapatan yang diterima oleh 80 persen penduduk golongan bawah ini pada periode 2010-2014 yang sekitar 4,43 poin memang jauh lebih kecil. Namun hal ini masih menjadi keprihatinan karena 20 persen golongan penduduk kelas atas semakin banyak menikmati porsi persentase pendapatan di DIY (Tabel 6.4).

Tabel 6.4. Indikator Ketimpangan Pendapatan Penduduk DIY, 2011 – 2015

Indikator	2011	2012	Sep 2013	Sep 2014	Mar 2015	Sep 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40% penduduk pendapatan terrendah	16,46	15,74	16,62	15,81	15,67	n.a.
40% penduduk pendapatan menengah	34,22	34,47	33,56	33,75	34,05	n.a.
20% penduduk pendapatan tertinggi	49,32	49,78	49,83	50,44	50,28	n.a.
Rasio Gini (%)	0,4166	0,4275	0,4164	0,435	0,4329	0,42

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, diolah dari data SUSENAS

Keterangan: n.a. : Data belum tersedia

E. Disparitas antar Kabupaten/Kota

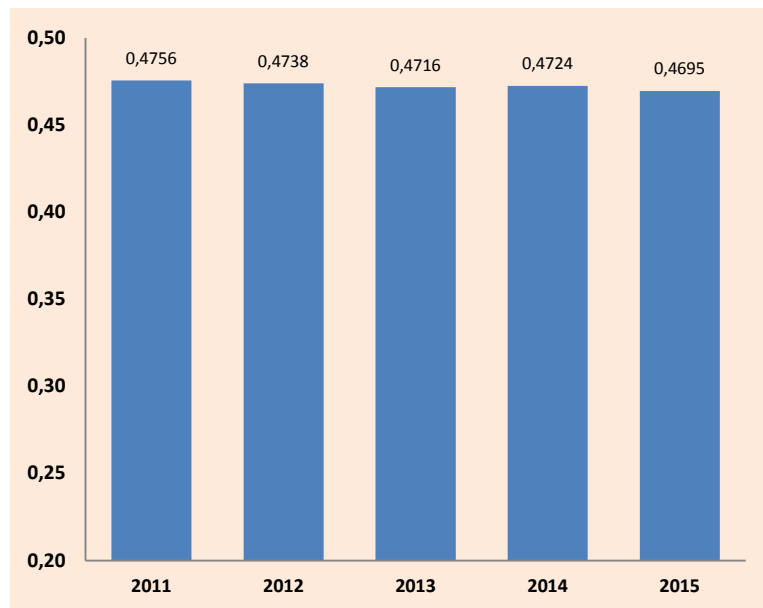
Disparitas pendapatan antarindividu penduduk seperti yang dijelaskan dengan Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia cukup populer digunakan sebagai salah satu indikator kualitas pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Selain indikator disparitas pendapatan antar individu, disparitas antar wilayah juga perlu dicermati, sebagai indikator ketimpangan antar kabupaten/kota.

1. Indeks Ketimpangan Regional

Ketimpangan antar region yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2001-2015 menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 47,56 persen pada tahun 2011 menjadi 46,95 persen pada tahun 2015 (Gambar 6.10). Penurunan ini menunjukkan bahwa antar region (kabupaten/kota) di wilayah DIY meskipun levelnya ketimpangan perekonomiannya moderat yang mendekati batas atas namun arahnya semakin membaik.

Hal ini juga terindikasikan dari analisis Tipologi Klassen yang menunjukkan adanya perbaikan kesenjangan antar kabupaten/kota di DIY.

Gambar 6.14. Indeks Williamson DIY, 2011-2015



2. Disparitas Sektoral (*Shift Share Analysis*)

Perbedaan potensi modal yang berupa sumber daya alam maupun modal sumber daya manusia dan tingkat tabungan antar kabupaten/kota menyebabkan perbedaan kemampuan setiap daerah dalam menggerakkan roda perekonomian. Perbedaan tersebut akan mempengaruhi perbedaan jenis maupun kemampuan unit ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap struktur perekonomian maupun perubahannya dalam rentang waktu tertentu. Dipandang dari kegiatan ekonominya, maka output ekonomi suatu wilayah dikelompokkan dalam lapangan usaha atau disebut juga sektor ekonomi. Berdasarkan sektor ekonomi tersebut suatu daerah mempunyai ciri khas yang unik satu dengan yang lainnya. Besaran kinerja hasil output sektor ekonomi daerah tersebut membuat perbedaan skala ekonomi antardaerah termasuk timbulnya kesenjangan ekonomi. Kesenjangan atas perbedaan terjadi karena pendapatan masing-masing sektor ekonomi, kemudian dinamakan disparitas sektoral yang dikaji dengan analisis pergeseran (*shift share analysis*). Analisis *shift share* juga berguna untuk mengkaji pergeseran serta peranan perekonomian di suatu daerah. Model ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pada pertumbuhan sektor di daerah tertentu dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi. Di samping itu, analisis ini juga dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam hubungannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang lebih tinggi.

Disparitas sektoral dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain dampak pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya, dampak pertumbuhan ekonomi provinsi acuannya dan juga karena kemampuan pelaku ekonomi dalam wilayah itu sendiri. Dalam upaya menarik pertumbuhan ekonomi provinsi, dipengaruhi oleh peran kabupaten/kota terhadap provinsi dan juga hubungan antarsektornya. Suatu kabupaten/kota atau sektor di kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan tinggi, belum tentu memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan provinsi acuannya, karena tergantung pada perannya terhadap provinsi juga.

2.1. Pangsa Regional (PR)

Hasil analisis *shift share* untuk suatu periode yang dipilih memungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan. Dalam buku ini, analisis *shift share* digunakan untuk mengkaji struktur perekonomian beserta perubahannya selama periode 2011-2015. Berdasarkan hasil estimasi perhitungan nilai PR selama periode 2011-2015, Kabupaten Sleman memiliki nilai PR yang tertinggi. Hal ini berarti Kabupaten Sleman menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi DIY selama kurun waktu 2011-2015 atau dengan kata lain Kabupaten Sleman merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di DIY. Kondisi ini masih sama dengan hasil analisis pada periode tahun 2010-2014. Pangsa terbesar berikutnya dicapai oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Tabel 6.5. Pangsa Regional (PR) menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2011–2015

Sektor	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	590.923	1.054.514	1.361.681	1.116.050	20.091
2. Pertambangan & Penggalian	42.978	52.097	79.885	56.934	452
3. Industri Pengolahan	369.859	1.123.990	502.260	1.814.388	1.454.128
4. Pengadaan Listrik, Gas	2.638	10.103	4.570	14.759	22.048
5. Pengadaan Air	4.476	6.479	9.144	6.724	16.657
6. Konstruksi	238.076	668.390	465.430	1.364.786	795.788
7. Perdagangan, Reparasi Mobil & Spd Motor	359.565	544.100	437.599	904.544	694.261
8. Pengangkutan & Pergudangan	272.494	362.639	282.365	729.703	438.943
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	101.603	673.678	263.614	1.142.431	1.097.880
10. Informasi dan Komunikasi	161.358	605.510	380.773	1.121.271	1.264.168
11. Jasa Keuangan	71.689	153.535	85.619	315.700	537.366
12. Real Estat	98.628	435.170	164.972	964.581	906.443
13. Jasa Perusahaan	9.214	36.603	23.173	226.118	117.637
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	223.140	457.765	428.985	739.897	879.595
15. Jasa Pendidikan	170.038	473.810	306.032	1.203.413	947.643
16. Jasa Kesehatan	39.472	119.551	92.904	268.869	359.034
17. Jasa-jasa	119.138	142.577	165.693	281.853	275.104
PDRB	2.875.291	6.920.512	5.054.701	12.272.020	9.827.235

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Dengan mencermati nilai pangsa masing-masing sektor pembentuk PDRB di Kabupaten Sleman maka nilai PR tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan. Nilai PR sektor industri pengolahan di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta juga merupakan yang tertinggi. Di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul nilai PR sektor industri pengolahan berada pada urutan kedua setelah sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri pengolahan di seluruh kabupaten/kota DIY dapat menjadi *leading sector* untuk memacu pertumbuhan ekonomi DIY.

2.2. Analisis Pergeseran (*Shift Analysis*)

Seperti yang dijelaskan dalam metodologi, bahwa untuk meneliti struktur ekonomi dan perubahannya sebagai indikator kegiatan ekonomi dalam periode 2011-2015 bisa dilakukan dengan pendekatan analisis pergeseran (*Shift Analysis*) yang terdiri dari nilai *proportional Shift* (PS) dan *Different Shift* (DS). Berdasarkan hasil estimasi, nilai PS dengan arah positif tertinggi di DIY terjadi pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara, kategori pertanian dan industri pengolahan menjadi dua kategori yang memiliki nilai PS dengan arah negatif terbesar. Setelah kategori penyediaan akomodasi dan makan minum urutan berikutnya adalah kategori jasa keuangan dan kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Secara eksplisit hal ini mengindikasikan bahwa selama periode 2011-2015 struktur ekonomi DIY secara makro bertumpu pada kelompok sektor tersier yang sifat output dari aktivitasnya berupa jasa. Perekonomian DIY bergeser mengarah ke paradigma baru yang tidak lagi bergantung hanya pada lapangan usaha pertanian.

Hasil estimasi nilai PS pada level kabupaten/kota menunjukkan bahwa nilai PS yang tertinggi selama periode 2011-2015 dicapai oleh Kota Yogyakarta, yaitu 329.887. Sementara, keempat kabupaten lain justru memiliki nilai PS dengan arah negatif dan nilai negatif terbesar ada di Kabupaten Gunungkidul. Penyebab nilai PS negatif untuk masing-masing kabupaten berbeda, namun pada dasarnya dipengaruhi oleh besarnya nilai PS pada tiga kategori, yaitu: pertanian, industri pengolahan, informasi dan komunikasi

Pendorong tingginya nilai PS di Kota Yogyakarta adalah kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori jasa keuangan, dan jasa administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Tiga kategori tersebut di keempat kabupaten lain juga bernilai positif, namun tidak mampu mendorong nilai agregat PS. Apabila ketiga kategori tersebut pada tingkat DIY tumbuh pesat, maka akan semakin kuat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, jika tiga kategori tersebut terpuruk maka akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan DIY.

Tabel 6.6 juga menjelaskan bahwa di Kulon Progo dan Bantul kategori industri pengolahan mempunyai nilai negatif terbesar di antara kategori lainnya, sementara di Sleman nilai negatif terbesar adalah kategori informasi dan komunikasi. Di Gunungkidul nilai PS negatif terbesar ada di kategori pertanian.

Tabel 6.6. *Proportional Shift (PS)* menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2011–2015

Sektor	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	-76.432	-136.395	-176.126	-144.355	-2.599
2. Pertambangan & Penggalian	-12.284	-14.890	-22.832	-16.273	-129
3. Industri Pengolahan	-83.143	-252.668	-112.906	-407.866	-326.881
4. Pengadaan Listrik, Gas	-2.706	-10.362	-4.688	-15.138	-22.614
5. Pengadaan Air	-1.042	-1.508	-2.129	-1.565	-3.878
6. Konstruksi	-3.828	-10.746	-7.483	-21.942	-12.794
7. Perdagangan, Reparasi Mobil & Spd Motor	23.902	36.169	29.089	60.129	46.150
8. Pengangkutan & Pergudangan	2.259	3.006	2.340	6.048	3.638
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	42.737	283.369	110.884	480.540	461.801
10. Informasi dan Komunikasi	-65.285	-244.988	-154.060	-453.663	-511.479
11. Jasa Keuangan	51.084	109.406	61.010	224.961	382.916
12. Real Estat	2.810	12.397	4.700	27.479	25.823
13. Jasa Perusahaan	-1.864	-7.404	-4.688	-45.739	-23.796
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	68.737	141.011	132.145	227.919	270.952
15. Jasa Pendidikan	3.482	9.703	6.267	24.643	19.405
16. Jasa Kesehatan	5.984	18.123	14.083	40.757	54.425
17. Jasa-jasa	-13.449	-16.095	-18.704	-31.817	-31.055
PDRB	-59.039	-81.874	-143.095	-45.880	329.887

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Kondisi perkembangan output kategori pertanian dan industri pengolahan secara umum masih sama seperti tahun sebelumnya. Pertumbuhan kategori pertanian terlihat semakin melamban baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, terutama di Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Sleman. Kategori industri pengolahan juga mengalami hal yang sama, meskipun perlambatannya tidak secepat kategori pertanian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melambannya pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di DIY erat kaitannya dengan melambannya pertumbuhan industri pengolahan.

Hasil perhitungan nilai *Different Shift (DS)* menunjukkan ada tiga kabupaten yang memiliki nilai DS dengan arah positif, yakni Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman. Sementara, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta memiliki nilai DS dengan arah negatif. Nilai DS yang tertinggi selama periode 2011-2015 dicapai Kabupaten Bantul. Berikutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Gunungkidul dan Sleman. Nilai DS tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki daya saing regional yang lebih kuat dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Keunggulan daya saing perekonomian regional Bantul terutama ditopang oleh kategori-kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor, dan pertanian. Daya saing regional Gunungkidul terutama ditopang oleh kategori konstruksi

dan informasi dan komunikasi. Sementara itu, daya saing di Kabupaten Sleman ditopang oleh kategori pengangkutan dan pergudangan serta kategori informasi dan komunikasi.

Tabel 6.7. *Different Shift (DS)* menurut Kabupaten/ kota di DIY, 2011–2015

Sektor	Kulon-progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	31.094	79.403	-33.462	-69.413	-7.621
2. Pertambangan & Penggalian	3.967	-2.870	-8.115	7.090	-73
3. Industri Pengolahan	-16.088	57.842	15.480	-42.731	-14.503
4. Pengadaan Listrik, Gas	-76	-103	362	-130	-53
5. Pengadaan Air	-748	-119	499	270	98
6. Konstruksi	785	45.595	56.189	-100.715	-1.854
7. Perdagangan, Reparasi Mobil & Spd Motor	-19.681	101.320	-16.377	-40.875	-24.386
8. Pengangkutan & Pergudangan	-115.351	-64.898	-71.279	366.926	-115.398
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	-25.472	142.984	-22.335	-164.671	69.495
10. Informasi dan Komunikasi	3.993	-8.868	70.357	100.723	-166.204
11. Jasa Keuangan	7.556	17.651	26.274	21.943	-73.423
12. Real Estat	-18.038	52.806	16.285	-51.169	116
13. Jasa Perusahaan	-1.367	1.629	1.173	2.209	-3.644
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	1.652	32.546	-12.937	-11.918	-9.343
15. Jasa Pendidikan	-9.552	59.570	28.372	12.013	-90.402
16. Jasa Kesehatan	-1.937	7.972	8.238	11.014	-25.288
17. Jasa-jasa	-27.760	11.683	15.860	7.887	-7.670
PDRB	-187.025	534.142	74.584	48.452	-470.153

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Nilai pergeseran netto positif (*upward different shift*) terbesar diperoleh Kabupaten Bantul (452.268) yang digerakkan oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum serta kategori perdagangan. Artinya, Kabupaten Bantul merupakan lokasi yang sangat menguntungkan (*locational advantage*) bagi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sebaliknya, Kabupaten Kulon Progo sedang memiliki nilai pergeseran netto negatif (*downward different shift*) yang tertinggi yakni sebesar -246.063. Hal ini terutama disebabkan oleh andil lapangan usaha pengangkutan dan pergudangan serta jasa perorangan lainnya. Kondisi ini bermakna bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki simpul daya saing yang lemah bagi lapangan usaha pengangkutan dan pergudangan dan juga jasa perorangan lainnya dibandingkan kabupaten/kota.

Tabel 6.8. Rekapitulasi Perubahan PDRB dan Nilai Pergeseran Netto di DIY, 2011-2015

Kab/Kota	Perub. PDRB	Pangsa Regional	Nilai Pergeseran		Komponen Pergeseran		
			Netto	%	PS	DS	PS+DS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kulonprogo	2.629.228	2.875.291	-246.063	-9,36	-59.039	-187.025	-246.063
Bantul	7.372.780	6.920.512	452.268	6,13	-81.874	534.142	452.268
Gunungkidul	4.986.190	5.054.701	-68.511	-1,37	-143.095	74.584	-68.511
Sleman	12.274.592	12.272.020	2.572	0,02	-45.880	48.452	2.572
Yogyakarta	9.686.970	9.827.235	-140.266	-1,45	329.887	-470.153	-140.266

Sumber : BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Berdasarkan Tabel 6.8 juga tampak bahwa hanya Kota Yogyakarta memiliki nilai PS positif. Spesialisasi Kota Yogyakarta terletak pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, dan jasa pemerintahan karena sebagai pusat kota di provinsi memiliki pertumbuhan yang tinggi di tingkat DIY. Dapat dikatakan bahwa Kota Yogyakarta mempunyai struktur ekonomi yang menguntungkan (*favourable economic structure*).

Berdasarkan nilai PS dan DS selama periode 2011-2015, kabupaten/kota di DIY dikelompokkan dalam tiga kategori seperti yang disajikan pada Tabel 6.9. Hasil ini sedikit berbeda dengan analisis pada periode sebelumnya yang terdiri dari empat kelompok. Kelompok pertama merepresentasikan daerah yang maju pesat yang ditandai oleh nilai PS dan DS bertanda positif. Pada periode ini tidak ada kabupaten/kota yang masuk dalam kelompok ini. Kelompok kedua mencakup daerah yang memiliki nilai DS bertanda positif dan nilai PS bertanda negatif atau disebut daerah yang sedang berkembang. Kelompok ini terdiri dari tiga kabupaten, yakni Sleman, Bantul dan Gunungkidul. Sementara, kelompok ketiga merepresentasikan daerah yang perekonomiannya cenderung berpotensi yang ditandai oleh nilai PS negatif dan nilai DS positif. Kota Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah yang termasuk dalam kelompok ini, dan kategori ini sama dengan analisis pada periode 2010-2014. Kelompok IV, yang merepresentasikan daya saing lemah dihuni oleh Kulon Progo.

Sleman mengalami perubahan kategori dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu menurun dari kelompok I ke kelompok II. Gunungkidul dalam periode 2009-2013 termasuk dalam kategori daerah tertinggal, namun sudah dua periode analisis ini statusnya meningkat menjadi daerah berkembang.

Menurut Myrdal (1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu mengakibatkan ketidakseimbangan. Sedangkan proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam

yang dimiliki suatu daerah merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, heterogenitas karakteristik suatu wilayah menjadi pemicu ketimpangan antardaerah atau antarsektor di suatu wilayah. Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah merupakan masalah yang cukup sulit diatasi. Ardani (1992) mengemukakan bahwa ketimpangan antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Tabel 6.9. Kategori Pertumbuhan Kabupaten/ Kota di DIY, 2011-2015

Kategori	Komponen Pertumbuhan		
	DS	PS	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab/Kota yang pertumbuhan ekonominya pesat (I):	-	-	-
Kab/Kota sedang berkembang (II):			
1. Kabupaten Sleman	48.452	-45.880	5,60
2. Kabupaten Bantul	534.142	-81.874	5,23
3. Kabupaten Gunungkidul	74.584	-143.095	4,79
Kab/Kota yang cenderung berpotensi (III):			
1. Kota Yogyakarta	-470.153	329.887	5,33
Kab/Kota mempunyai daya saing lemah (IV):			
2. Kulon Progo	-187.025	-59.039	4,61

Sumber : BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

F. Capaian Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

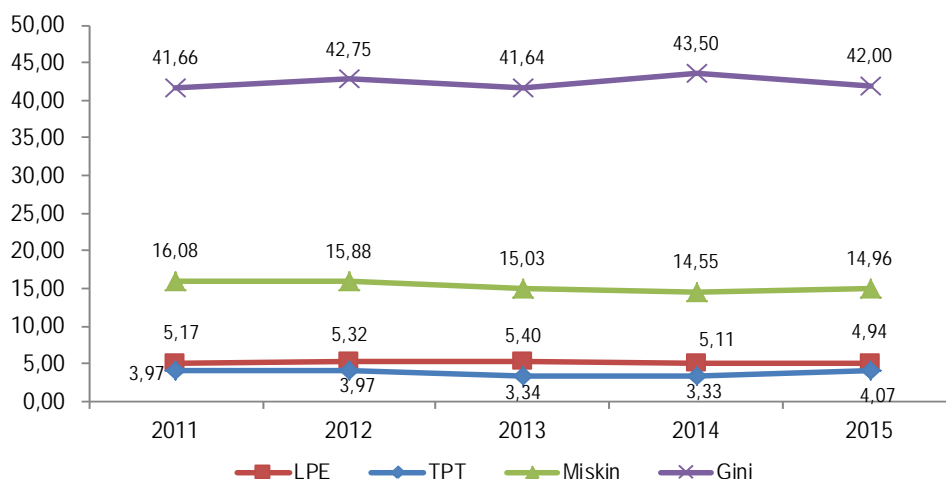
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat memperluas kesempatan kerja. Semakin luasnya kesempatan kerja diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran. Rendahnya angka pengangguran merupakan indikasi semakin membaiknya tingkat pendapatan masyarakat. Perbaikan tingkat pendapatan masyarakat akan semakin menekan angka kemiskinan. Kaitannya dengan membaiknya pendapatan masyarakat, seharusnya peningkatan tersebut secara merata dan proporsional dapat dinikmati oleh masyarakat pada semua golongan.

Secara faktual, capaian pertumbuhan ekonomi DIY yang membanggakan selama lima tahun terakhir nampaknya lebih banyak dinikmati oleh penduduk yang berpendapatan tinggi (kaya). Perekonomian memang terus mengalami pertumbuhan bahkan hingga 5,40 persen pada tahun 2013, namun ternyata belum diikuti secara nyata peningkatan kesejahteraan penduduk yang berpendapatan rendah. Indikator kesenjangan pendapatan seperti Kurva Lorenz, Gini Rasio, dan Kemiskinan kriteria Banka Dunia, telah mencatat bahwa meskipun kemiskinan dan ketimpangan pendapatan DIY skalanya moderat namun melihat kecenderungan perkembangannya rentan terhadap resiko gejolak ekonomi.

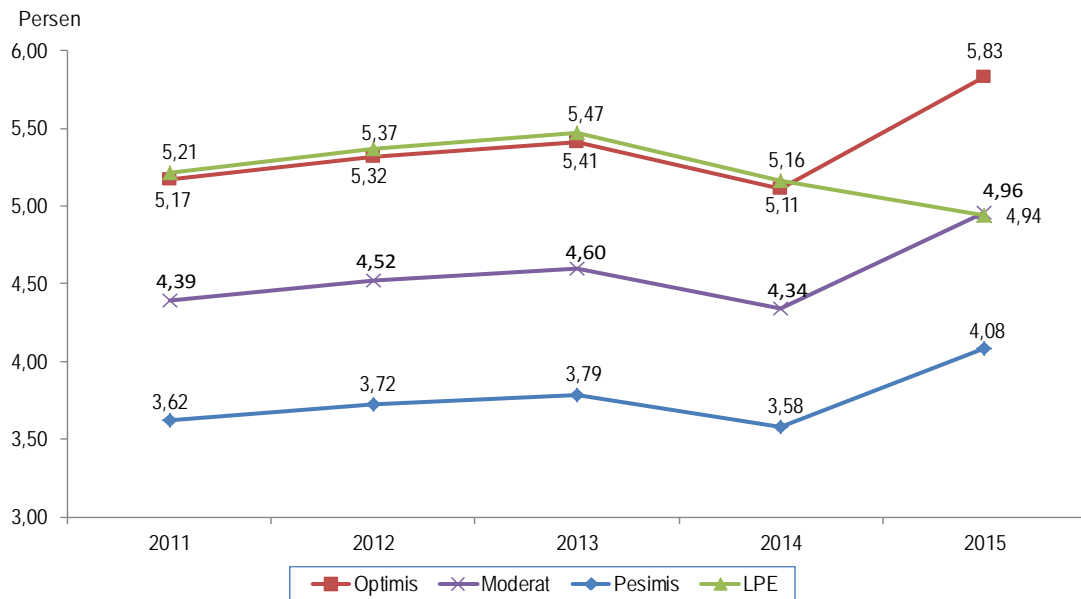
Sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama lebih dari seperempat angkatan kerja dan juga merupakan sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk miskin DIY, sepanjang tahun 2010 hingga 2014 ternyata tidak dapat tumbuh di atas 4 persen, kecuali tahun 2012 sebesar 4,19 persen. Bahkan, tahun 2014 sektor pertanian tumbuh minus. Fenomena ini sudah seharusnya menjadi pijakan bagi pemerintah dengan instansi dan lembaga terkait untuk lebih banyak melahirkan kebijakan dan implikasinya untuk mengangkat sektor pertanian. Tampaknya hasil kajian dari Purnamadewi, Tambunan, Oktviani, dan Daryanto (2010) yang menyimpulkan bahwa prioritas alokasi investasi ke kelompok sektor pertanian dan industri berbasis pertanian yang didukung pembangunan infrastruktur dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicontoh untuk diimplementasikan dengan model yang lebih cocok untuk kondisi DIY. Mereka juga menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur menghasilkan dampak terbesar dalam penurunan IHK [inflasi] dan meningkatkan pendapatan riil karena peningkatan investasi infrastruktur mampu menstimulasi peningkatan produktivitas di berbagai sektor perekonomian bahkan berdampak memacu peningkatan produktivitas di sektor pertanian.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dibahas di atas, tampak adanya keterkaitan yang signifikan antara laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan gini rasio (Gambar 6.14). Ketimpangan distribusi pendapatan yang direpresentasikan dengan gini ratio terlihat mempunyai kecenderungan sedikit menurun. Sementara itu persentase penduduk miskin juga mempunyai kecenderungan berkurang. Tingkat pengangguran terbuka dalam periode 2011-2015 juga menunjukkan arah penurunan meskipun di tahun 2015 sedikit bertambah. Namun demikian perbaikan tiga indikator tersebut ternyata belum mampu mendorong perbaikan ekonomi secara makro karena selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi masih dalam kecenderungan arah yang menurun.

Gambar 6.15. Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, Kemiskinan dan Gini Rasio, 2011-2015



Gambar 6.16. Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Target Pertumbuhan dalam RPJMD DIY 2012-2017, Tahun 2011-2015 (persen)



Tujuan penetapan indikator kinerja adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dalam RPJMD DIY 2012-2017 yang telah di-review antara lain memuat target pertumbuhan ekonomi. Target tersebut dituangkan dalam tiga skema, yaitu target optimis, moderat, dan pesimis. Target optimis diproyeksikan berdasarkan kondisi terbaik yang ingin dicapai. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY dalam melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2013-2017 menggunakan metode *semi average* berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan, realisasi pertumbuhan ekonomi, dan pangsa distribusi sektor terhadap total PDRB. Skema pertumbuhan moderat yang diasumsikan merupakan kondisi normal, dan pertumbuhannya diestimasi sebesar 85 persen dari kondisi optimis. Sementara skema pertumbuhan pesimis diasumsikan bila kondisi ekonomi dalam keadaan buruk dan angka pertumbuhannya diestimasi sebesar 70 persen dari kondisi optimis. Selama periode 2011-2014 capaian pertumbuhan ekonomi DIY mampu melebihi target pertumbuhan optimis. Kondisi ekonomi nasional yang terus mengalami perlambatan sejak tahun 2013 hingga 2015 imbasnya juga dirasakan pada tataran perekonomian di lingkungan regional DIY sehingga pertumbuhan ekonomi DIY 2015 yang sebesar 4,94 persen masih jauh dari target pertumbuhan ekonomi yang optimis sebesar 5,83 persen. Mungkin saja hal ini terjadi karena kondisi sosial ekonomi yang terjadi sudah tidak sejalan dengan asumsi-asumsi *ceteris paribus* ketika penghitungan target pertumbuhan.

BAB 7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pada tahun 2015 nilai PDRB DIY atas dasar harga berlaku mencapai Rp101,4 triliun, dan berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp83,5 triliun.
2. Berdasar SNA 2008 struktur ekonomi DIY terdiri dari 17 kategori (lapangan usaha). Kategori industri pengolahan mempunyai pangsa terbesar pada distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku, dan tahun 2015 kontribusinya sebesar 13,05 persen. Kategori pertanian dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum memberikan porsi distribusi terbesar berikutnya masing-masing 10,7 persen dan 10,24 persen.
3. Kategori perdagangan, kategori angkutan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, dan kategori jasa-jasa lainnya yang dikelompokkan dalam sektor tersier memegang kontribusi sebesar 66,1 persen dari total PDRB. Porsi kontribusi sektor tersier ditengarai semakin meningkat sehingga kontribusi sektor primer dan sekunder semakin menurun.
4. Pertumbuhan ekonomi 2015 mengalami perlambatan dibanding tahun 2013 dan 2014. Perlambatan tersebut disebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan di kelompok sektor primer dan kelompok sektor sekunder. Di kelompok sektor tersier, beberapa kategori besaran pertumbuhannya cenderung berfluktuasi, sementara beberapa kategori lain cenderung menurun. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam periode 2011-2015, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2013 yaitu sebesar 5,37 persen, sedangkan pada tahun 2015 pertumbuhan berada pada titik terendah yaitu 4,94 persen.
5. Pada tahun 2015 andil pertumbuhan ekonomi terbesar adalah kategori jasa pendidikan, diikuti kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, dan kategori informasi dan komunikasi. Industri pengolahan sebagai kategori yang memberikan kontribusi distribusi persentase terbesar, pada tahun 2015 andil pertumbuhannya hanya berada pada urutan kesepuluh.
6. Selama periode 2011-2015 rata-rata pertumbuhan ekonomi masih mencapai 5,24 persen. Kategori yang rata-rata pertumbuhannya tinggi, antara lain: kategori jasa keuangan, kategori jasa kesehatan, dan kategori informasi dan komunikasi. Di samping itu masih ada 7 kategori lainnya yang rata-rata pertumbuhannya di atas rata-rata pertumbuhan total PDRB.

7. Lima kabupaten/kota yang ada di DIY selama periode 2011-2015 rata-rata pertumbuhannya pada kisaran 4,61 persen sampai dengan 5,60 persen, dengan yang terendah adalah Kulon Progo dan yang tertinggi adalah Sleman.
8. PDRB per kapita riil tahun 2015 sebesar Rp22.684.855. Artinya, bila PDRB atas dasar harga konstan yang sebesar Rp83,5 triliun dibagikan secara merata maka setiap penduduk DIY yang berjumlah 3.679.176 jiwa akan memperoleh sekitar Rp1,9 juta per bulan. Namun dalam kehidupan nyata pembagian pendapatan secara merata sempurna tidak akan pernah terjadi. Hal ini yang menimbulkan adanya ketimpangan antarwilayah dan kesenjangan distribusi pendapatan antarpenduduk.
9. Inflasi IHK dan inflasi PDRB tidak mempunyai korelasi yang nyata sehingga kenaikan harga konsumen di pasar tidak memberikan dampak yang nyata pada nilai tambah di tingkat produsen.
10. Berdasarkan indeks perkembangan sektoral dapat dideteksi kategori yang mempunyai potensi berkembang lebih cepat dibanding kategori lain, yaitu kategori jasa keuangan, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa kesehatan, kategori jasa perusahaan, dan kategori jasa pendidikan. Indeks perkembangan atas harga konstan 2010 kategori-kategori tersebut masing-masing mencapai di atas 137.
11. Gabungan luas wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta hanya sebesar 19 persen dari luas wilayah DIY, namun secara ekonomi kedua wilayah tersebut menguasai sekitar 60 persen dari total PDRB DIY. Sementara Gunungkidul dan Kulon Progo yang luas wilayahnya meliputi 65 persen dari wilayah DIY hanya memperoleh bagian sekitar 21,2 persen dari total PDRB DIY.
12. Berdasarkan distribusi persentase PDRB di masing-masing kabupaten/kota, dapat dideteksi kategori yang memberikan pangsa terbesar dalam struktur PDRB. Di Kabupaten Kulon Progo adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Di Kabupaten Bantul yang dominan adalah industri pengolahan, pertanian, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Di Gunungkidul yang dominan adalah pertanian, konstruksi, dan jasa administrasi pemerintahan. Di Sleman yang menjadi *leading sector* adalah industri pengolahan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara di Kota Yogyakarta tiga kategori dengan kontribusi persentase terbesar adalah industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan informasi dan komunikasi.
13. Kesenjangan PDRB per kapita riil Kota Yogyakarta dengan empat kabupaten lainnya terlihat mencolok. Perbandingan PDRB per kapita antara Kota Yogyakarta dengan Kulon Progo yang paling rendah di antara tiga kabupaten lain mencapai lebih dari 3,5 kali lipatnya. Sementara Kota Yogyakarta bila dibandingkan dengan Sleman yang PDRB per kapitanya paling tinggi di antara tiga kabupaten lain sebesar 2,25 kali lipat.

14. Kontribusi PDRB DIY terhadap jumlah PDRB 33 provinsi sangat kecil yaitu hanya 0,87 persen. DIY bersama Bengkulu, Bangka Belitung, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat merupakan provinsi-provinsi yang kontribusi PDRB-nya di bawah 1 persen. Kontribusi PDRB DIY terhadap jumlah PDRB Pulau Jawa juga relatif kecil yaitu 1,49 persen.
15. Struktur PDRB menurut Pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 67,66 persen. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yaitu 30,51 persen dan komponen pengeluaran pemerintah sebesar 16,71 persen.
16. Nilai investasi fisik dalam PDRB DIY tahun yang merupakan penjumlahan komponen PMTB dan komponen perubahan inventori pada tahun 2015 sebesar Rp32,12 triliun atau sekitar 31,67 persen dari total PDRB. Berdasarkan nilai investasi tersebut diperoleh ICOR sebesar 5,92, dan ICOR DIY selama 2011-2015 masih di atas angka 5. Artinya, produktivitas dari investasi belum menunjukkan kecenderungan membaik, karena setiap pertumbuhan ekonomi satu persen masih diperlukan pertumbuhan investasi yang cukup besar yaitu di atas 5 persen.
17. Iklim pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran cukup merata. Hanya saja pada tahun 2015 net ekspor antardaerah mengalami kontraksi sebesar 4,45 persen. Sebagai kota tujuan utama wisata di Indonesia nampaknya mobilitas keluar masuk barang dan jasa sangat tinggi, sehingga suatu waktu pertumbuhan net ekspor antardaerah melejit tinggi seperti yang terjadi di tahun 2013 namun ada kalanya pertumbuhannya rendah seperti yang terjadi di dua tahun terakhir.
18. Melemahnya perekonomian dunia yang diduga berawal dari krisis Tiongkok berdampak langsung pada kondisi perekonomian nasional karena perekonomian Indonesia juga sangat bergantung pada Cina. Melemahnya perekonomian nasional juga dirasakan dalam perekonomian DIY terutama dalam dua tahun terakhir. Oleh karena itu dalam kurun waktu 2011-2015 menjadi masa yang masih sulit untuk menjadi pijakan perencanaan pembangunan daerah baik jangka menengah maupun jangka panjang.
19. Dalam periode 2011-2015 tren pertumbuhan ekonomi DIY masih menurun. Kondisi tersebut juga terpolakan pada pertumbuhan sebagian besar kategori-kategori yang menyusun PDRB. Di sisi lain, berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, tren pertumbuhan komponen-komponen pengeluaran menunjukkan arah yang serupa dengan pola kategorial lapangan usaha. Hanya saja yang perlu menjadi perhatian adalah tren pertumbuhan impor luar negeri pada arah yang terus meningkat.
20. Analisis Tipologi Klassen yang diaplikasikan untuk memetakan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita menghasilkan dua kelompok besar pertumbuhan.

Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masuk dalam kelompok daerah yang maju dan cepat tumbuh (Kuadran II). Sementara tiga kabupaten lainnya Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul berada pada kelompok daerah tertinggal (Kuadran IV), namun pada tahun 2015 Bantul mampu mengentaskan diri dari ketertinggalannya dan bergeser masuk dalam kelompok daerah yang berkembang cepat (Kuadran I).

21. Di bidang ketenagakerjaan, angka beban tanggungan (*dependency ratio* – DR) menunjukkan kecenderungan menurun. Meskipun penurunan angka DR dari waktu ke waktu relatif kecil namun telah memberikan arti pada optimalisasi anggaran pembangunan yang cukup besar. Pada tahun 2015 angka DR turun sebesar 0,02 poin, artinya jumlah tanggungan usia produktif secara total telah berkurang sekitar 507 orang. Bila dikalkulasi berdasarkan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk DIY maka pengurangan beban tanggungan tersebut menghasilkan penghematan nilai ekonomi sekitar 5,7 miliar rupiah.
22. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih berfluktuasi dan tahun 2015 pada tren menurun dibanding tahun sebelumnya. Daerah perdesaan mempunyai angka TPAK yang lebih besar dibanding daerah perkotaan. Artinya, kesempatan kerja lebih besar di perdesaan dibanding perkotaan. Hal ini mungkin terjadi karena penduduk usia kerja di perkotaan lebih besar dibanding di daerah perdesaan dan bisa juga dikarenakan memang kesempatan kerja di perdesaan lebih mudah diperoleh. Kesenjangan TPAK yang cukup lebar antara daerah pedesaan dan perkotaan yang terjadi sejak tahun 2012 mulai mereda di tahun 2015.
23. Seperti halnya TPAK, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2015 meningkat menjadi 4,07 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding pencapaian di tahun 2011 hingga 2014 yang di bawah 4 persen. Tiga ciri tingkat pengangguran DIY, yaitu: TPT perempuan lebih tinggi dari laki-laki, TPT perdesaan lebih rendah dibanding dengan perkotaan, dan TPT pendidikan yang lebih tinggi (SLTA ke atas) lebih tinggi dibanding yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah).
24. Pada periode 2011-2015, pertumbuhan kesempatan kerja tidak elastis/inelastis dengan pertumbuhan ekonomi, karena perhitungan Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK) hanya 0,10 persen per tahun. Secara sektoral, kategori yang elastis, atau angka EKK di atas 1 persen, adalah kategori pertambangan dan penggalian dan kategori jasa-jasa, dan masing-masing mendorong penyerapan jumlah tenaga kerja sebanyak 469 orang dan 7.301 orang. Sementara kategori konstruksi meskipun angka EKK tergolong inelastis, kurang dari 1 persen, namun mampu mendorong penyerapan jumlah tenaga kerja sekitar 1.121 orang.
25. Analisis Tipologi Klassen untuk produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi menempatkan 5 sektor yang dapat diandalkan karena prestasi pencapaian produktivitas dan pertumbuhan ekonominya, yaitu sektor bangunan, sektor

perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa.

26. Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan menghasilkan kinerja yang membanggakan. Hal ini terukur dari tren menurunnya persentase penduduk miskin dan juga menurunnya kesenjangan kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Rata-rata jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir juga menurun 3,54 persen per tahun. Persentase penduduk miskin tahun 2011 sebesar 16,08 persen, di tahun 2015 turun menjadi 13,16 persen. Namun demikian ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi kendala yang agak serius karena posisi angka Gini Rasio (GR) masih di level 0,42. Artinya, GR yang ditargetkan pemerintah di bawah 0,42 di akhir periode RPJMD 2012-2017 nampaknya berat untuk bisa terrealisasi. Ketimpangan juga masih menganga dilihat dari distribusi pendapatan antara yang kaya dan miskin, karena 40 persen penduduk berpendapatan terendah dan 40 penduduk berpendapatan menengah, atau bila digolongkan menjadi 80 persen penduduk berpendapatan menengah ke bawah, hanya memperoleh separoh dari total distribusi pendapatan. Sementara itu, golongan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi memperoleh separoh dari total distribusi pendapatan.
27. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota yang diukur dengan Indeks Williamson kecenderungannya ke arah kondisi yang lebih baik meskipun penurunan angka ketimpangannya relatif kecil. Kategori pertumbuhan berdasarkan analisis *Shift Share* data PDRB kabupaten/kota menyimpulkan tidak ada kabupaten/kota yang pertumbuhannya pesat (kuadran I). Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul masuk kelompok daerah yang sedang berkembang (kuadran II). Kota Yogyakarta hanya menempati daerah yang cenderung berpotensi, dan Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah mempunyai daya saing lemah.
28. Dalam kurun waktu 2011-2015 rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 5,24 persen, namun pertumbuhan tersebut lebih bersifat padat modal tidak mampu membuka secara luas peluang kesempatan kerja. Oleh karenanya tingkat pengangguran selama periode tersebut terlihat tidak konsisten menunjukkan penurunan. Pendapatan masyarakat semakin membaik namun jurang kesenjangan distribusi pendapatan masih lebar, baik dilihat dari klasifikasi perdesaan dan perkotaan, antarwilayah, maupun dari golongan pendapatan penduduk. Sisi menggembirakan dari kualitas pertumbuhan ekonomi DIY, antara lain: jumlah penduduk miskin menurun secara signifikan meskipun persentasenya masih relatif tinggi dibanding provinsi-provinsi lain, produktivitas tenaga kerja masih terjaga baik, secara makro perencanaan dan implikasi pembangunan relatif akurat dan berjalan optimal karena dalam periode 2011-2014 pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah daerah tercapai. Hanya saja kondisi di tahun 2015 menjadi

anomali karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai di bawah dari yang ditargetkan.

B. Rekomendasi

1. Oleh karena DIY sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian di kategori pertanian perlu mengembangkan pertanian berbasis keunggulan komoditas pertanian sesuai potensi wilayahnya sehingga peran lapangan usaha pertanian dan juga sektor primer dalam perekonomian DIY tidak semakin merosot.
2. Pondasi ekonomi masih harus diperkuat lagi dengan mendorong pertumbuhan sektor riil karena perkembangan pertumbuhan ekonomi DIY akhir-akhir ini lebih banyak didorong oleh pertumbuhan sektor moneter.
3. Kesenjangan distribusi pendapatan antarwilayah dan antarpenduduk sudah semakin memprihatinkan. Untuk itu prioritas pembangunan sudah saatnya memperluas sektor penggerak pertumbuhan di daerah tertinggal seperti Kulon Progo, Gunungkidul, dan juga Bantul.
4. Dalam analisis ini potensi sektor di masing-masing kabupaten/kota sudah teridentifikasi. Perlu analisis lebih mendalam untuk melihat lebih jauh potensi komoditas dari sektor-sektor tersebut sehingga pengembangan potensi wilayah lebih terarah dan sesuai kebutuhan.
5. Pemerintah daerah perlu menggali komoditas unggulan ekspor luar negeri maupun ekspor antardaerah, karena pertumbuhan impor luar negeri dan net ekspor antardaerah berada pada tren yang meningkat. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan ekonomi DIY yang lebih kuat menjadi pasar konsumsi barang dan jasa.
6. Kategori industri pengolahan meskipun belum menjadi sektor yang diandalkan dari sisi kemampuan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi namun tetap harus didorong menjadi salah satu pondasi ekonomi daerah karena banyak jenis industri kreatif yang dimiliki DIY. Demikian pula industri pengolahan merupakan yang sektor menyerap tenaga kerja cukup besar.
7. Terkait target pertumbuhan ekonomi yang meleset pada tahun 2015 kiranya pemerintah daerah perlu *me-review* target pertumbuhan ekonomi di dua tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMD DIY 2013-2017.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik RI, 2013, ***"Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha"***, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS Provinsi DIY, 2013, ***"ICOR Sektorial Provinsi D.I. Yogyakarta 2008-2012"***, Kerjasama BPS DIY Bappeda.
- BPS Provinsi DIY, 2013, ***"Analisis PDRB Provinsi D.I. Yogyakarta 2008-2012"***, Kerjasama BPS DIY Bappeda.
- BPS Provinsi DIY, 2014, ***"Keadaan Angkatan Kerja Di Provinsi D.I. Yogyakarta, Agustus 2013"***, Yogyakarta.
- Herrick Bruce dan Kendleberger Charles P, 1988, ***"Economic Development (diterjemahkan oleh Drs. Komarudin, Drs. A. Hasyuri Ali, Drs. G. Kartasapoetra)"***, Bina Aksara, Jakarta.
- Kartasasmitha, Ginandjar, 1996, ***"Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan"***, PT Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Limbong, Bernhard, 2013, ***"Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi"***, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004, ***"Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang"***, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mubyarto, 2003, ***"Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila"*** Seminar Bulanan III, PUSTEP-UGM, Yogyakarta 1 April 2003.
- Nellis, Joseph G. dan David Parker, 2002, ***"The Essence of The Economy"***, Second Edition, Prentice Hall of India, New Delhi.
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009, ***"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013"***, Yogyakarta.
- Simanjuntak, P.J, 2001, ***"Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia"***, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sjafrizal, ***"Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat"***, Prisma, LP3ES No. 3.
- Todaro, Michael P, and Smith, Stephen C, 2003, ***"Economic Development 8th Edition"***, Addison Wesley, London.
- Thomas, V., Dailami M., Dhareshwar A., Kaufmann D., Kishor N., Lopez R., and Wang Yang, 2001, ***"The Quality of Growth"***, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widodo, Suseno Triyanto Hg, 1990, ***"Indikator Ekonomi : Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia"***, Kanisius, Yogyakarta.
- Prasetyo, Eko, 2008, ***"The Quality of Growth : Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas"***. JEJAK, Volume 1, Nomor 1, September, 2008, __.

LAMPIRAN

TABEL 1. PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH), 2011-2015

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2104	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.805.134,5	8.640.411,7	9.449.019,7	9.769.112,4	10.848.368,7
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6.859.579,6	7.632.052,3	8.347.274,0	8.545.054,9	9.493.601,1
	a. Tanaman Pangan	2.974.103,4	3.268.290,6	3.318.116,3	3.277.477,0	3.859.420,5
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	244.854,4	257.490,7	284.221,0	262.539,4	287.655,4
	c. Perkebunan Semusim	40.363,0	43.897,5	46.720,3	51.806,1	53.795,0
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1.806.300,9	2.101.951,8	2.563.417,3	2.601.564,0	2.735.787,8
	e. Perkebunan Tahunan	170.629,0	189.760,2	209.369,1	230.395,0	225.176,9
	f. Peternakan	1.480.334,9	1.616.347,0	1.757.555,4	1.930.499,3	2.136.761,6
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	142.993,9	154.314,4	167.874,7	190.774,1	195.003,9
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	684.673,9	707.783,8	750.207,7	816.386,5	906.421,1
	3 Perikanan	260.880,9	300.575,6	351.538,1	407.671,0	448.346,5
B	Pertambangan dan Penggalian	455.989,7	467.147,5	495.039,5	537.599,5	573.133,0
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	455.989,7	467.147,5	495.039,5	537.599,5	573.133,0
C	Industri Pengolahan	10.280.006,9	10.242.467,7	11.563.733,8	12.614.921,0	13.236.292,4
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	5.349.839,4	5.046.199,5	5.822.563,6	6.655.855,8	7.103.601,4
	3 Pengolahan Tembakau	616.615,9	700.417,4	817.470,4	732.370,8	674.861,2
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	963.525,7	1.028.655,1	1.207.632,4	1.339.987,1	1.458.642,5
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	266.663,5	300.615,0	341.306,5	351.932,3	378.490,2
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	189.212,6	186.772,9	200.182,6	201.488,0	204.665,3
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	242.509,5	240.948,4	254.921,0	277.247,2	293.838,4
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	111.811,4	108.993,8	106.227,3	115.955,4	131.001,4
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	302.185,8	334.607,9	352.913,7	343.097,6	318.017,1
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	339.923,7	345.926,4	400.598,5	429.587,2	426.568,7
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	767.141,0	782.670,9	820.253,5	884.077,4	890.732,6
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	384.898,8	404.523,2	414.548,7	460.662,9	494.955,9
	14 Industri Alat Angkutan	3.191,7	3.570,8	3.597,0	3.332,5	3.104,5
	15 Industri Furniture	497.710,9	495.185,1	532.612,8	523.488,8	538.313,4
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	244.777,1	263.381,5	288.905,8	295.838,0	319.499,7
D	Pengadaan Listrik, Gas	91.000,6	90.992,0	86.394,5	89.668,6	92.609,5
	1 Ketenagalistrikan	90.243,4	90.117,5	85.453,6	88.676,1	91.634,7
	2 Gas	757,2	874,5	940,9	992,5	974,9
E	Pengadaan Air	79.885,1	83.130,3	89.645,3	102.669,9	109.697,2
F	Konstruksi	6.786.010,7	7.350.632,3	8.060.750,5	8.722.682,2	9.499.916,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	5.812.823,6	6.413.318,6	6.938.421,0	7.681.034,9	8.342.646,2
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	916.972,6	1.020.529,8	1.163.092,2	1.292.028,2	1.401.769,5
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	4.895.851,0	5.392.788,8	5.775.328,8	6.389.006,7	6.940.876,7
H	Transportasi dan Pergudangan	3.922.583,8	4.256.792,3	4.783.126,5	5.313.232,9	5.755.748,1
	1 Angkutan Rel	50.782,0	57.363,0	62.282,2	84.542,3	102.044,4
	2 Angkutan Darat	2.644.774,9	2.722.687,8	2.975.031,0	3.265.119,4	3.486.346,9
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	455.423,7	594.682,9	777.432,2	886.134,0	982.969,3
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	771.603,2	882.058,6	968.381,1	1.077.437,1	1.184.387,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.457.190,5	7.203.277,9	8.284.060,7	9.323.241,9	10.383.390,7
	1 Penyediaan Akomodasi	1.176.742,1	1.395.506,5	1.665.470,5	1.813.580,6	2.050.478,2
	2 Penyediaan Makan Minum	5.280.448,4	5.807.771,4	6.618.590,2	7.509.661,3	8.332.912,5
J	Informasi dan Komunikasi	6.700.372,8	7.331.839,4	7.572.218,9	7.897.507,2	8.244.241,8
K	Jasa Keuangan	2.412.032,7	2.696.113,0	3.170.932,7	3.602.560,5	4.028.358,1
	1 Bank	1.699.454,4	1.928.289,7	2.342.861,6	2.702.047,9	3.058.440,9
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	225.614,4	244.378,3	255.538,0	286.504,7	305.491,8
	3 Jasa Keuangan Lainnya	480.643,4	516.863,7	565.726,3	606.489,7	656.551,6
	4 Jasa Penunjang Keuangan	6.320,5	6.581,3	6.806,8	7.518,2	7.873,8
L	Real Estate	4.891.400,5	5.429.459,0	5.815.245,1	6.497.271,5	7.143.655,3
M,N	Jasa Perusahaan	783.185,6	836.060,2	855.439,4	956.390,6	1.048.359,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5.223.332,5	5.931.303,6	6.702.818,7	7.492.245,8	8.348.234,3
P	Jasa Pendidikan	6.050.414,1	6.364.491,8	6.816.002,1	7.600.854,9	8.598.743,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.749.193,2	1.928.468,3	2.094.674,4	2.276.361,0	2.553.550,8
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.869.401,4	1.981.955,1	2.147.020,2	2.351.975,0	2.589.171,1
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	71.369.958,1	77.247.860,6	84.924.542,9	92.829.329,9	101.396.117,3

TABEL 2. PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH), 2011-2015

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2104	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.134.678,9	7.500.728,2	7.670.026,2	7.508.980,3	7.703.978,1
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6.241.690,4	6.588.236,9	6.741.414,9	6.539.528,2	6.703.079,0
	a. Tanaman Pangan	2.682.412,3	2.796.754,6	2.808.220,7	2.760.023,5	2.874.734,0
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	230.586,3	232.437,3	235.350,9	212.590,9	220.477,6
	c. Perkebunan Semusim	38.602,2	40.373,5	41.348,4	41.666,1	40.253,7
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1.627.461,2	1.828.045,6	1.942.962,6	1.731.959,8	1.709.503,9
	e. Perkebunan Tahunan	155.231,3	158.001,3	166.790,4	167.480,0	160.968,8
	f. Peternakan	1.374.982,1	1.397.691,3	1.409.959,7	1.478.301,7	1.548.209,3
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	132.415,0	134.933,3	136.782,1	147.506,3	148.931,6
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	651.122,1	654.157,9	657.699,9	680.932,8	700.236,9
	3 Perikanan	241.866,5	258.333,4	270.911,3	288.519,3	300.662,1
B	Pertambangan dan Penggalian	436.328,7	443.626,9	461.013,8	470.734,6	471.323,2
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	436.328,7	443.626,9	461.013,8	470.734,6	471.323,2
C	Industri Pengolahan	9.711.791,7	9.435.888,0	10.084.213,3	10.469.636,9	10.652.525,1
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	4.995.562,6	4.701.531,3	5.141.145,2	5.550.764,0	5.724.930,3
	3 Pengolahan Tembakau	568.517,4	567.358,2	571.755,5	456.644,9	412.954,8
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	891.754,1	896.425,4	982.801,6	1.059.015,3	1.122.114,4
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	252.031,5	263.351,8	279.763,8	279.526,2	300.273,3
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	182.528,6	184.474,5	193.358,3	190.504,2	186.322,4
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	240.487,4	234.555,6	238.009,9	248.636,7	253.685,7
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	114.308,1	117.627,1	117.513,9	125.873,3	135.404,1
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	295.008,4	311.558,1	310.988,6	292.300,2	265.704,0
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	325.560,6	322.467,1	353.713,2	359.128,1	335.701,7
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	754.828,3	734.753,7	769.924,8	788.641,2	777.412,5
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	371.725,1	377.954,7	375.320,8	403.331,4	430.750,2
	14 Industri Alat Angkutan	3.073,8	3.205,9	3.139,4	2.831,6	2.631,5
	15 Industri Furniture	483.901,2	476.249,7	488.110,6	466.972,4	453.940,5
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	232.504,7	244.375,0	258.667,7	245.467,5	250.699,7
D	Pengadaan Listrik, Gas	100.058,9	110.269,8	116.969,2	121.267,5	119.663,1
	1 Ketenagalistrikan	99.367,3	109.542,9	116.199,0	120.467,7	118.854,5
	2 Gas	691,7	727,0	770,2	799,8	808,7
E	Pengadaan Air	76.349,5	78.992,2	79.739,9	82.855,4	85.260,2
F	Konstruksi	6.483.267,4	6.772.475,9	7.106.854,7	7.508.543,3	7.826.700,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	5.410.096,5	5.878.431,7	6.187.855,1	6.540.107,5	6.944.902,7
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	845.696,8	926.345,2	983.772,5	1.058.936,0	1.091.042,1
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	4.564.399,7	4.952.086,6	5.204.082,6	5.481.171,5	5.853.860,6
H	Transportasi dan Pergudangan	3.795.544,7	3.975.070,5	4.217.506,9	4.377.849,8	4.541.309,5
	1 Angkutan Rel	50.532,4	51.558,8	50.999,1	60.546,0	65.371,0
	2 Angkutan Darat	2.604.724,2	2.647.243,4	2.761.816,0	2.810.248,9	2.902.683,0
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	437.198,4	515.711,0	597.096,7	631.120,0	650.042,7
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	703.089,7	760.557,3	807.595,1	875.934,9	923.212,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.066.531,9	6.480.399,2	6.942.541,1	7.414.021,0	7.842.132,3
	1 Penyediaan Akomodasi	1.063.072,9	1.188.626,5	1.289.746,6	1.353.394,3	1.450.425,0
	2 Penyediaan Makan Minum	5.003.459,0	5.291.772,7	5.652.794,5	6.060.626,6	6.391.707,2
J	Informasi dan Komunikasi	6.775.394,2	7.503.157,6	7.969.970,4	8.458.713,2	8.891.144,9
K	Jasa Keuangan	2.268.272,6	2.341.597,7	2.610.919,1	2.826.933,5	3.060.732,9
	1 Bank	1.608.303,6	1.652.024,1	1.898.021,7	2.086.228,9	2.273.369,4
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	214.927,5	220.367,8	224.469,4	237.670,3	247.199,4
	3 Jasa Keuangan Lainnya	439.239,6	463.429,6	482.676,8	496.979,2	533.921,7
	4 Jasa Penunjang Keuangan	5.802,0	5.776,2	5.751,3	6.055,1	6.242,4
L	Real Estate	4.699.363,4	5.116.888,2	5.322.003,8	5.735.457,1	6.105.125,6
M,N	Jasa Perusahaan	769.963,3	831.517,1	858.734,2	924.041,7	991.563,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.999.227,1	5.373.904,2	5.639.411,8	5.971.985,6	6.281.580,3
P	Jasa Pendidikan	5.841.702,3	6.148.737,3	6.430.385,5	6.938.845,3	7.444.276,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.640.479,0	1.791.076,0	1.916.373,7	2.062.978,6	2.210.405,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.840.824,2	1.919.688,6	2.012.930,9	2.119.325,9	2.288.950,1
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	68.049.874,4	71.702.449,2	75.627.449,6	79.532.277,4	83.461.574,5

TABEL 3. LAJU PERTUMBUHAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (persen), 2011-2015

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2104	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,63	5,13	2,26	-2,10	2,60
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-1,89	5,55	2,33	-2,99	2,50
	a. Tanaman Pangan	-2,96	4,26	0,41	-1,72	4,16
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	4,89	0,80	1,25	-9,67	3,71
	c. Perkebunan Semusim	5,55	4,59	2,41	0,77	-3,39
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-5,74	12,32	6,29	-10,86	-1,30
	e. Perkebunan Tahunan	1,81	1,78	5,56	0,41	-3,89
	f. Peternakan	3,24	1,65	0,88	4,85	4,73
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	1,45	1,90	1,37	7,84	0,97
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,27	0,47	0,54	3,53	2,83
	3 Perikanan	0,29	6,81	4,87	6,50	4,21
B	Pertambangan dan Penggalian	7,28	1,67	3,92	2,11	0,13
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	7,28	1,67	3,92	2,11	0,13
C	Industri Pengolahan	5,39	-2,84	6,87	3,82	1,75
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,69	-5,89	9,35	7,97	3,14
	3 Pengolahan Tembakau	0,10	-0,20	0,78	-20,13	-9,57
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	5,78	0,52	9,64	7,75	5,96
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5,22	4,49	6,23	-0,08	7,42
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	-8,46	1,07	4,82	-1,48	-2,20
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	-4,64	-2,47	1,47	4,46	2,03
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	6,25	2,90	-0,10	7,11	7,57
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2,65	5,61	-0,18	-6,01	-9,10
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	6,83	-0,95	9,69	1,53	-6,52
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	9,62	-2,66	4,79	2,43	-1,42
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	4,07	1,68	-0,70	7,46	6,80
	14 Industri Alat Angkutan	-1,80	4,30	-2,07	-9,80	-7,07
	15 Industri Furniture	-2,40	-1,58	2,49	-4,33	-2,79
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	1,09	5,11	5,85	-5,10	2,13
D	Pengadaan Listrik, Gas	5,63	10,20	6,08	3,67	-1,32
	1 Ketenagalistrikan	5,63	10,24	6,08	3,67	-1,34
	2 Gas	4,90	5,10	5,95	3,84	1,11
E	Pengadaan Air	0,31	3,46	0,95	3,91	2,90
F	Konstruksi	4,85	4,46	4,94	5,65	4,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	5,12	8,66	5,26	5,69	6,19
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2,46	9,54	6,20	7,64	3,03
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	5,63	8,49	5,09	5,32	6,80
H	Transportasi dan Pergudangan	3,94	4,73	6,10	3,80	3,73
	1 Angkutan Rel	-25,80	2,03	-1,09	18,72	7,97
	2 Angkutan Darat	2,42	1,63	4,33	1,75	3,29
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	16,09	17,96	15,78	5,70	3,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	5,90	8,17	6,18	8,46	5,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,69	6,82	7,13	6,79	5,77
	1 Penyediaan Akomodasi	9,32	11,81	8,51	4,93	7,17
	2 Penyediaan Makan Minum	4,95	5,76	6,82	7,21	5,46
J	Informasi dan Komunikasi	9,55	10,74	6,22	6,13	5,11
K	Jasa Keuangan	11,33	3,23	11,50	8,27	8,27
	1 Bank	11,52	2,72	14,89	9,92	8,97
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	9,41	2,53	1,86	5,88	4,01
	3 Jasa Keuangan Lainnya	11,67	5,51	4,15	2,96	7,43
	4 Jasa Penunjang Keuangan	7,93	-0,44	-0,43	5,28	3,09
L	Real Estate	4,47	8,88	4,01	7,77	6,45
M,N	Jasa Perusahaan	6,57	7,99	3,27	7,61	7,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,64	7,49	4,94	5,90	5,18
P	Jasa Pendidikan	7,62	5,26	4,58	7,91	7,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,52	9,18	7,00	7,65	7,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,83	4,28	4,86	5,29	8,00
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,21	5,37	5,47	5,16	4,94

Tabel 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Persen), 2011-2015

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2104	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,94	11,19	11,13	10,52	10,70
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9,61	9,88	9,83	9,21	9,36
	a. Tanaman Pangan	4,17	4,23	3,91	3,53	3,81
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,34	0,33	0,33	0,28	0,28
	c. Perkebunan Semusim	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2,53	2,72	3,02	2,80	2,70
	e. Perkebunan Tahunan	0,24	0,25	0,25	0,25	0,22
	f. Peternakan	2,07	2,09	2,07	2,08	2,11
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,20	0,20	0,20	0,21	0,19
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,96	0,92	0,88	0,88	0,89
	3 Perikanan	0,37	0,39	0,41	0,44	0,44
B	Pertambangan dan Penggalian	0,64	0,60	0,58	0,58	0,57
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,64	0,60	0,58	0,58	0,57
C	Industri Pengolahan	14,40	13,26	13,62	13,59	13,05
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,50	6,53	6,86	7,17	7,01
	3 Pengolahan Tembakau	0,86	0,91	0,96	0,79	0,67
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,35	1,33	1,42	1,44	1,44
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,37	0,39	0,40	0,38	0,37
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	0,27	0,24	0,24	0,22	0,20
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	0,34	0,31	0,30	0,30	0,29
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,16	0,14	0,13	0,12	0,13
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,42	0,43	0,42	0,37	0,31
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,48	0,45	0,47	0,46	0,42
	11 Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	1,07	1,01	0,97	0,95	0,88
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,54	0,52	0,49	0,50	0,49
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furniture	0,70	0,64	0,63	0,56	0,53
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,13	0,12	0,10	0,10	0,09
	1 Ketenagalistrikan	0,13	0,12	0,10	0,10	0,09
	2 Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi	9,51	9,52	9,49	9,40	9,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	8,14	8,30	8,17	8,27	8,23
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	1,28	1,32	1,37	1,39	1,38
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	6,86	6,98	6,80	6,88	6,85
H	Transportasi dan Pergudangan	5,50	5,51	5,63	5,72	5,68
	1 Angkutan Rel	0,07	0,07	0,07	0,09	0,10
	2 Angkutan Darat	3,71	3,52	3,50	3,52	3,44
	3 Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Angkutan Udara	0,64	0,77	0,92	0,95	0,97
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1,08	1,14	1,14	1,16	1,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,05	9,32	9,75	10,04	10,24
	1 Penyediaan Akomodasi	1,65	1,81	1,96	1,95	2,02
	2 Penyediaan Makan Minum	7,40	7,52	7,79	8,09	8,22
J	Informasi dan Komunikasi	9,39	9,49	8,92	8,51	8,13
K	Jasa Keuangan	3,38	3,49	3,73	3,88	3,97
	1 Bank	2,38	2,50	2,76	2,91	3,02
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,32	0,32	0,30	0,31	0,30
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,67	0,67	0,67	0,65	0,65
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
L	Real Estate	6,85	7,03	6,85	7,00	7,05
M,N	Jasa Perusahaan	1,10	1,08	1,01	1,03	1,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	7,32	7,68	7,89	8,07	8,23
P	Jasa Pendidikan	8,48	8,24	8,03	8,19	8,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,45	2,50	2,47	2,45	2,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,62	2,57	2,53	2,53	2,55
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 5. ANDIL PERTUMBUHAN EKONOMI (PERSEN), 2011-2015

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2104	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,0	0,5	-1,0	-1,1	0,09
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,0	0,5	-1,0	-1,1	0,06
	a. Tanaman Pangan	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,12
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,0	0,0	0,0	0,1	0,02
	c. Perkebunan Semusim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,0	0,4	-1,2	-1,2	-0,12
	e. Perkebunan Tahunan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	f. Peternakan	0,0	0,2	0,0	0,1	0,03
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02
	3 Perikanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02
B	Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
C	Industri Pengolahan	0,1	0,7	0,4	0,5	0,41
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	0,0	0,4	0,3	0,7	0,25
	3 Pengolahan Tembakau	0,0	0,1	-0,1	-0,1	-0,15
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,0	0,0	0,1	0,1	0,11
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,0	0,0	0,0	0,0	0,03
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,01
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,04
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,0	0,0	0,0	0,0	0,01
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,01
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,02
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,11
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,0	0,0	0,0	0,1	0,01
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	15 Industri Furniture	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,02
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,03
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	1 Ketenagalistrikan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	2 Gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
E	Pengadaan Air	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
F	Konstruksi	0,0	-0,5	-0,1	0,4	0,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan	0,0	1,4	0,5	0,6	0,33
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	0,0	0,1	0,1	0,0	0,07
	2 Perdagangan Besar dan Eceran	0,0	1,3	0,4	0,5	0,25
H	Transportasi dan Pergudangan	0,0	0,2	0,4	0,4	0,22
	1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,01
	2 Angkutan Darat	0,0	0,0	0,2	0,2	0,16
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	0,0	0,1	0,1	0,1	0,03
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0,0	0,1	0,1	0,1	0,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,0	0,6	0,8	0,6	0,36
	1 Penyediaan Akomodasi	0,0	0,1	0,0	0,2	0,05
	2 Penyediaan Makan Minum	0,0	0,5	0,7	0,4	0,30
J	Informasi dan Komunikasi	0,1	1,1	0,6	0,9	0,45
K	Jasa Keuangan	0,0	0,1	0,5	0,4	0,25
	1 Bank	0,0	0,1	0,5	0,4	0,20
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,01
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,1	0,05
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
L	Real Estate	0,0	0,2	0,6	0,6	0,35
M,N	Jasa Perusahaan	0,0	0,0	0,1	0,1	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,0	0,1	0,8	0,8	0,63
P	Jasa Pendidikan	0,0	0,8	1,2	0,3	0,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,0	0,1	0,4	0,3	0,16
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,0	0,0	0,2	0,4	0,21
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	0,3	5,4	5,5	5,2	4,94

TABEL 1. PDRB KABUPATEN KULON PROGO SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(1)	(4)	(2)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.135.300,5	1.255.673,4	1.373.635,0	1.442.659,9	1.579.969,2
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	884.895,7	997.965,8	1.101.150,5	1.150.866,9	1.257.931,6
	a. Tanaman Pangan	269.979,7	292.978,9	295.971,3	299.783,3	350.208,9
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	36.047,7	38.651,8	42.997,6	39.445,3	43.783,9
	c. Perkebunan Semusim	6.225,1	6.760,7	7.245,4	7.962,8	8.398,6
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	191.075,0	240.607,3	296.154,5	295.791,4	317.306,5
	e. Perkebunan Tahunan	110.203,8	121.996,8	135.209,1	148.733,5	146.798,7
	f. Peternakan	251.037,7	275.009,0	300.353,3	332.450,4	363.690,6
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	20.326,7	21.961,3	23.219,3	26.700,2	27.744,4
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	198.623,8	196.039,2	202.144,1	212.589,7	233.677,5
	3 Perikanan	51.780,9	61.668,3	70.340,4	79.203,3	88.360,2
B	Pertambangan dan Penggalian	88.650,6	93.035,5	98.940,2	101.818,1	109.892,1
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi				0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit				0,0	0,0
	3 Pertambangan Biji Logam				0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	88.650,6	93.035,5	98.940,2	101.818,1	109.892,1
C	Industri Pengolahan	708.160,3	692.120,2	780.587,0	870.617,7	918.051,6
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara				0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas				0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	554.879,9	528.257,0	601.198,1	689.086,5	733.110,9
	3 Pengolahan Tembakau	48.183,9	54.505,4	61.382,5	57.291,4	52.669,4
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	24.769,5	26.237,9	29.838,4	32.853,8	35.445,9
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	507,8	563,9	634,2	637,8	675,4
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	9.111,2	9.235,5	9.746,3	9.925,8	10.156,4
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	318,8	324,7	337,0	357,2	371,4
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	22.721,7	22.899,8	22.936,0	24.303,9	26.678,5
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	397,3	466,1	509,9	520,4	504,0
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	12.781,7	12.988,4	15.131,2	15.991,6	15.948,3
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	516,5	526,9	552,2	591,6	592,3
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	3.931,4	4.145,1	4.169,1	4.621,4	4.866,7
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	7.931,2	7.909,4	8.148,1	8.236,0	8.582,3
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	22.109,4	24.060,1	26.004,0	26.200,4	28.450,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.411,9	4.394,8	4.193,6	4.291,8	4.474,1
	1 Ketenagalistrikan	4.381,0	4.359,2	4.155,3	4.251,0	4.433,2
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	30,9	35,6	38,3	40,8	40,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	7.978,5	8.337,3	9.007,7	10.007,7	10.522,2
F	Konstruksi	462.253,2	509.534,5	561.695,7	597.695,7	651.776,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan S	702.917,2	788.515,2	843.413,4	913.413,4	993.190,0
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	30.143,8	33.147,8	37.421,7	42.421,7	45.924,9
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	672.773,3	755.367,4	805.991,7	870.991,7	947.265,2
H	Transportasi dan Pergudangan	495.998,0	510.229,0	547.288,4	593.001,4	636.391,4
	1 Angkutan Rel	2.228,5	2.486,4	2.721,7	3.521,7	4.230,6
	2 Angkutan Darat	409.357,7	412.751,7	442.087,0	479.000,0	510.912,7
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	84.411,7	94.990,9	102.479,7	110.479,7	121.248,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	193.239,6	214.343,2	242.861,2	267.891,2	296.720,5
	1 Penyediaan Akomodasi	210,5	238,8	284,3	314,3	358,5
	2 Penyediaan Makan Minum	193.029,1	214.104,5	242.576,9	267.576,9	296.362,0
J	Informasi dan Komunikasi	305.485,8	323.840,2	342.993,8	364.480,9	382.516,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	140.571,7	161.617,0	205.582,7	228.910,7	255.816,3
	1 Jasa Perantara Keuangan	124.502,8	144.297,0	186.778,4	207.958,3	233.275,5
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	5.594,9	5.889,5	6.123,9	6.933,7	7.409,8
	3 Jasa Keuangan Lainnya	10.307,8	11.258,2	12.507,0	13.825,3	14.927,9
	4 Jasa Penunjang Keuangan	166,2	172,2	173,4	193,4	203,2
L	Real Estate	186.572,4	199.343,3	213.830,0	233.583,0	256.043,7
M,N	Jasa Perusahaan	16.898,0	17.727,8	18.108,0	20.295,8	22.111,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	422.242,0	483.947,7	548.399,2	615.523,0	684.126,5
P	Jasa Pendidikan	330.043,4	344.812,2	369.065,8	409.065,8	461.610,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78.045,1	86.283,5	92.253,1	100.500,0	112.613,0
R,S,T,U	Jasa lainnya	221.482,7	222.819,3	237.738,9	260.500,0	286.474,8
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.500.250,8	5.916.574,0	6.489.593,7	7.034.256,2	7.662.301,2

TABEL 2. PDRB KABUPATEN KULON PROGO SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.047.681,4	1.104.309,3	1.131.360,5	1.120.167,9	1.143.120,2
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	806.984,1	867.219,5	890.441,8	873.914,4	889.581,2
	a. Tanaman Pangan	241.144,2	254.679,7	256.059,4	257.605,0	267.894,2
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	33.308,8	33.747,3	34.536,2	31.205,3	32.967,2
	c. Perkebunan Semusim	5.940,5	6.212,2	6.375,7	6.412,6	6.266,3
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	173.748,0	207.294,5	221.791,2	195.447,9	194.626,8
	e. Perkebunan Tahunan	100.478,7	101.814,1	107.129,5	107.859,3	103.583,7
	f. Peternakan	233.011,1	243.663,3	244.469,2	253.614,0	261.909,5
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	19.352,8	19.808,3	20.080,7	21.770,2	22.333,4
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	193.197,4	185.153,7	185.729,4	188.682,3	193.138,0
	3 Perikanan	47.499,9	51.936,1	55.189,3	57.571,2	60.401,0
B	Pertambangan dan Penggalian	83.104,6	86.177,6	90.140,2	91.487,5	91.992,8
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Biji Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	83.104,6	86.177,6	90.140,2	91.487,5	91.992,8
C	Industri Pengolahan	676.192,3	648.522,9	696.306,9	754.495,1	776.908,7
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara				0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas				0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	529.163,5	499.632,7	543.290,3	608.868,5	631.880,2
	3 Pengolahan Tembakau	45.000,0	44.496,2	44.281,7	35.343,1	31.919,5
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	22.886,1	22.810,3	23.841,8	25.515,5	26.812,6
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	479,7	495,5	522,0	510,1	538,5
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	8.943,3	9.208,0	9.620,3	9.594,7	9.496,0
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetaka	313,4	310,2	312,4	316,9	322,0
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	22.951,2	23.836,9	24.145,2	25.181,0	26.809,8
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	383,6	410,3	415,8	414,7	397,7
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	12.289,3	12.229,3	13.406,2	13.670,3	12.925,0
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	508,2	494,7	518,3	531,9	525,4
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	3.774,0	3.781,5	3.642,1	3.874,7	4.048,0
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	7.837,7	7.781,2	7.807,9	7.705,2	7.643,4
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	21.662,3	23.036,1	24.502,9	22.968,4	23.590,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.873,3	5.365,4	5.714,2	5.842,7	5.833,9
	1 Ketenagalistrikan	4.845,1	5.335,8	5.682,9	5.809,9	5.800,6
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	28,2	29,6	31,4	32,9	33,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	7.831,1	8.154,9	8.241,5	8.341,5	8.523,6
F	Konstruksi	439.159,4	464.304,2	483.855,7	508.855,7	531.260,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan S	660.920,6	718.882,8	757.217,7	796.717,7	849.655,9
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	28.099,9	30.564,4	32.486,6	34.986,6	36.088,0
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	632.820,7	688.318,4	724.731,1	761.731,1	813.567,9
H	Transportasi dan Pergudangan	482.028,8	486.869,9	502.391,6	512.691,3	531.194,2
	1 Angkutan Rel	2.210,4	2.259,7	2.251,9	2.551,7	2.751,0
	2 Angkutan Darat	401.319,9	401.531,6	411.835,4	416.835,4	430.048,0
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	78.498,5	83.078,6	88.304,3	93.304,3	98.395,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	185.323,7	194.959,4	209.359,4	219.373,9	231.152,4
	1 Penyediaan Akomodasi	195,4	207,7	224,4	238,9	254,9
	2 Penyediaan Makan Minum	185.128,4	194.751,7	209.135,0	219.135,0	230.897,5
J	Informasi dan Komunikasi	307.486,9	331.730,4	352.124,3	378.090,0	398.651,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	132.998,6	139.057,4	157.992,0	175.745,1	189.970,4
	1 Jasa Perantara Keuangan	117.752,6	123.038,2	141.362,3	157.888,7	171.024,4
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	5.465,9	5.559,1	5.612,5	6.006,9	6.236,9
	3 Jasa Keuangan Lainnya	9.627,5	10.308,6	10.866,6	11.690,9	12.545,2
	4 Jasa Penunjang Keuangan	152,6	151,5	150,6	158,6	163,9
L	Real Estate	182.504,8	194.169,0	202.865,3	213.562,4	226.908,2
M,N	Jasa Perusahaan	16.957,4	17.618,1	18.328,7	19.560,5	20.889,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	407.381,5	438.666,2	461.077,7	488.812,0	513.344,6
P	Jasa Pendidikan	318.983,4	339.595,6	353.043,9	378.043,9	405.420,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73.705,5	79.975,6	84.986,0	91.000,0	97.499,8
R,S,T,U	Jasa lainnya	219.013,4	216.789,5	226.654,6	240.000,0	259.240,5
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.246.146,8	5.475.148,2	5.741.660,3	6.002.787,2	6.281.566,4

TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN KULON PROGO SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,64	21,22	21,17	20,51	20,62
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	16,09	16,87	16,97	16,36	16,42
	a. Tanaman Pangan	4,91	4,95	4,56	4,26	4,57
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,66	0,65	0,66	0,56	0,57
	c. Perkebunan Semusim	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	3,47	4,07	4,56	4,21	4,14
	e. Perkebunan Tahunan	2,00	2,06	2,08	2,11	1,92
	f. Peternakan	4,56	4,65	4,63	4,73	4,75
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,37	0,37	0,36	0,38	0,36
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,61	3,31	3,11	3,02	3,05
	3 Perikanan	0,94	1,04	1,08	1,13	1,15
B	Pertambangan dan Penggalian	1,61	1,57	1,52	1,45	1,43
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,61	1,57	1,52	1,45	1,43
C	Industri Pengolahan	12,88	11,70	12,03	12,38	11,98
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	10,09	8,93	9,26	9,80	9,57
	3 Pengolahan Tembakau	0,88	0,92	0,95	0,81	0,69
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,45	0,44	0,46	0,47	0,46
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetaka	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,41	0,39	0,35	0,35	0,35
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,23	0,22	0,23	0,23	0,21
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,07	0,07	0,06	0,07	0,06
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	0,14	0,13	0,13	0,12	0,11
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	0,40	0,41	0,40	0,37	0,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06
	1 Ketenagalistrikan	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14
F	Konstruksi	8,40	8,61	8,66	8,50	8,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan S	12,78	13,33	13,00	12,99	12,96
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	0,55	0,56	0,58	0,60	0,60
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	12,23	12,77	12,42	12,38	12,36
H	Transportasi dan Pergudangan	9,02	8,62	8,43	8,43	8,31
	1 Angkutan Rel	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06
	2 Angkutan Darat	7,44	6,98	6,81	6,81	6,67
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	1,53	1,61	1,58	1,57	1,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,51	3,62	3,74	3,81	3,87
	1 Penyediaan Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Penyediaan Makan Minum	3,51	3,62	3,74	3,80	3,87
J	Informasi dan Komunikasi	5,55	5,47	5,29	5,18	4,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,56	2,73	3,17	3,25	3,34
	1 Jasa Perantara Keuangan	2,26	2,44	2,88	2,96	3,04
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,19	0,19	0,19	0,20	0,19
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	3,39	3,37	3,29	3,32	3,34
M,N	Jasa Perusahaan	0,31	0,30	0,28	0,29	0,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	7,68	8,18	8,45	8,75	8,93
P	Jasa Pendidikan	6,00	5,83	5,69	5,82	6,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,42	1,46	1,42	1,43	1,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,03	3,77	3,66	3,70	3,74
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 4. LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN KULON PROGO SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,29	5,41	2,45	-0,99	2,05
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	1,35	7,46	2,68	-1,86	1,79
	a. Tanaman Pangan	-0,28	5,61	0,54	0,60	3,99
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	7,59	1,32	2,34	-9,64	5,65
	c. Perkebunan Semusim	4,22	4,57	2,63	0,58	-2,28
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-3,08	19,31	6,99	-11,88	-0,42
	e. Perkebunan Tahunan	1,54	1,33	5,22	0,68	-3,96
	f. Peternakan	5,14	4,57	0,33	3,74	3,27
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	8,27	2,35	1,37	8,41	2,59
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,17	-4,16	0,31	1,59	2,36
	3 Perikanan	0,59	9,34	6,26	4,32	4,92
B	Pertambangan dan Penggalian	10,47	3,70	4,60	1,49	0,55
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	10,47	3,70	4,60	1,49	0,55
C	Industri Pengolahan	4,44	-4,09	7,37	8,36	2,97
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	5,37	-5,58	8,74	12,07	3,78
	3 Pengolahan Tembakau	0,59	-1,12	-0,48	-20,19	-9,69
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,78	-0,33	4,52	7,02	5,08
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5,62	3,29	5,35	-2,26	5,57
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	-5,54	2,96	4,48	-0,27	-1,03
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	-2,34	-1,00	0,69	1,45	1,63
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	5,04	3,86	1,29	4,29	6,47
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-7,36	6,97	1,32	-0,26	-4,10
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	3,03	-0,49	9,62	1,97	-5,45
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	9,62	-2,66	4,79	2,62	-1,23
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	2,23	0,20	-3,69	6,39	4,47
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	-4,92	-0,72	0,34	-1,32	-0,80
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	2,22	6,34	6,37	-6,26	2,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,53	10,10	6,50	2,25	-0,15
	1 Ketenagalistrikan	5,53	10,13	6,50	2,24	-0,16
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	4,90	5,10	5,95	4,78	1,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	-0,06	4,14	1,06	1,21	2,18
F	Konstruksi	5,38	5,73	4,21	5,17	4,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan S	5,01	8,77	5,33	5,22	6,64
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	5,07	8,77	6,29	7,70	3,15
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5,00	8,77	5,29	5,11	6,81
H	Transportasi dan Pergudangan	1,06	1,00	3,19	2,05	3,61
	1 Angkutan Rel	-32,88	2,23	-0,35	13,31	7,81
	2 Angkutan Darat	0,64	0,05	2,57	1,21	3,17
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	4,78	5,83	6,29	5,66	5,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,20	5,20	7,39	4,78	5,37
	1 Penyediaan Akomodasi	3,64	6,30	8,05	6,46	6,70
	2 Penyediaan Makan Minum	4,20	5,20	7,39	4,78	5,37
J	Informasi dan Komunikasi	8,86	7,88	6,15	7,37	5,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,99	4,56	13,62	11,24	8,09
	1 Jasa Perantara Keuangan	6,19	4,49	14,89	11,69	8,32
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	12,69	1,70	0,96	7,03	3,83
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,29	7,07	5,41	7,59	7,31
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1,19	-0,68	-0,63	5,34	3,35
L	Real Estate	5,71	6,39	4,48	5,27	6,25
M,N	Jasa Perusahaan	5,14	3,90	4,03	6,72	6,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	4,30	7,68	5,11	6,02	5,02
P	Jasa Pendidikan	7,17	6,46	3,96	7,08	7,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,67	8,51	6,27	7,08	7,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,02	-1,02	4,55	5,89	8,02
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,23	4,37	4,87	4,55	4,64

TABEL 1. PDRB KABUPATEN BANTUL SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.992.217,6	2.231.134,9	2.476.292,0	2.556.405,7	2.843.402,7
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	1.859.844,5	2.085.129,3	2.308.295,0	2.364.759,1	2.628.846,3
	a. Tanaman Pangan	787.245,3	872.806,2	887.616,1	880.686,8	1.037.633,9
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	70.478,1	75.261,8	83.381,1	74.955,5	82.348,6
	c. Perkebunan Semusim	14.005,0	15.215,7	16.447,1	18.530,6	19.430,6
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	594.924,0	692.119,2	846.612,1	872.685,0	918.208,4
	e. Perkebunan Tahunan	25.672,8	28.817,4	31.445,8	34.264,9	34.783,2
	f. Peternakan	332.556,9	361.702,6	400.582,6	434.663,1	486.568,4
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	34.962,3	39.206,2	42.210,1	48.973,1	49.873,1
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	66.414,6	70.168,8	75.048,2	82.083,0	92.480,3
	3 Perikanan	65.958,5	75.836,9	92.948,8	109.563,6	122.076,1
B	Pertambangan dan Penggalian	99.562,1	102.395,4	106.879,3	116.953,1	125.530,4
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	99.562,1	102.395,4	106.879,3	116.953,1	125.530,4
C	Industri Pengolahan	2.184.587,5	2.194.704,6	2.491.084,2	2.741.391,6	2.896.660,6
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara				0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas				0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.057.201,6	1.009.309,5	1.159.273,9	1.363.459,8	1.472.594,8
	3 Pengolahan Tembakau	198.139,2	224.652,7	265.840,1	248.106,9	229.706,9
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	231.336,2	244.398,3	284.980,6	321.464,4	355.093,4
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	97.757,7	108.353,4	123.149,5	123.453,1	133.693,1
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	75.984,2	75.397,5	81.174,1	82.172,1	83.502,1
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	19.050,8	18.749,3	20.173,9	22.293,8	23.193,8
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	21.039,1	21.053,1	20.326,8	22.436,8	25.526,8
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	10.211,6	11.250,8	11.864,5	11.444,6	10.884,6
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	97.419,3	100.331,5	114.443,2	124.235,3	126.635,3
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	111.996,8	115.189,7	123.911,2	133.451,0	136.051,0
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	22.898,7	23.509,6	24.111,1	27.383,4	29.173,4
	14 Industri Alat Angkutan	2.622,6	2.935,8	2.966,9	2.764,9	2.579,9
	15 Industri Furnitur	193.910,7	192.649,9	208.403,2	206.725,6	211.725,6
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	45.019,0	46.923,5	50.465,1	51.999,8	56.299,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16.735,7	17.327,8	15.918,6	16.591,0	17.321,5
	1 Ketenagalistrikan	16.547,6	17.108,7	15.679,6	16.335,3	17.069,5
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	188,1	219,1	239,0	255,7	252,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	11.867,4	12.390,3	13.242,1	15.153,3	16.192,9
F	Konstruksi	1.266.973,5	1.380.110,4	1.511.936,7	1.719.150,4	1.873.228,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.087.696,1	1.236.289,9	1.347.850,3	1.497.263,0	1.634.013,0
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	108.476,4	124.455,6	140.633,1	153.866,3	168.176,3
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	979.219,8	1.111.834,3	1.207.217,2	1.343.396,7	1.465.836,7
H	Transportasi dan Pergudangan	675.993,5	721.088,8	789.917,8	869.460,7	935.530,7
	1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Angkutan Darat	534.797,9	560.321,2	614.457,7	678.846,5	725.416,5
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	141.195,5	160.767,5	175.460,1	190.614,2	210.114,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.327.545,4	1.497.407,9	1.770.326,1	2.044.871,2	2.279.275,5
	1 Penyediaan Akomodasi	155.272,7	179.931,1	213.246,2	232.437,7	263.342,0
	2 Penyediaan Makan Minum	1.172.272,7	1.317.476,9	1.557.079,9	1.812.433,4	2.015.933,4
J	Informasi dan Komunikasi	1.104.108,3	1.211.011,8	1.283.762,3	1.347.205,5	1.411.574,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	316.630,3	359.213,7	416.541,8	487.499,1	549.349,2
	1 Jasa Perantara Keuangan	282.725,2	322.137,6	377.582,1	445.469,6	504.114,7
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	11.935,9	12.781,1	13.235,8	14.688,0	15.655,0
	3 Jasa Keuangan Lainnya	21.640,5	23.946,2	25.366,4	26.952,2	29.172,2
	4 Jasa Penunjang Keuangan	328,7	348,8	357,5	389,4	407,4
L	Real Estate	833.205,6	921.204,4	1.008.900,1	1.141.508,8	1.262.118,4
M,N	Jasa Perusahaan	71.383,2	75.197,6	77.173,6	86.886,8	94.901,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	871.212,4	1.008.946,9	1.147.990,0	1.285.862,9	1.432.619,2
P	Jasa Pendidikan	922.603,0	985.459,7	1.073.246,7	1.208.172,6	1.372.466,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	236.957,8	263.004,0	290.728,6	316.399,2	354.915,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	271.387,0	293.944,3	316.964,9	350.967,2	387.739,7
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.290.666,6	14.510.832,4	16.138.755,1	17.801.742,2	19.486.839,3

TABEL 2. PDRB KABUPATEN BANTUL SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.809.397,1	1.913.122,8	1.964.025,9	1.912.487,9	1.961.982,7
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	1.684.320,6	1.782.033,0	1.827.697,4	1.767.746,1	1.810.653,8
	a. Tanaman Pangan	705.432,2	733.158,2	736.003,8	726.357,6	757.387,2
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	66.870,2	67.956,9	68.592,7	59.538,0	62.611,6
	c. Perkebunan Semusim	13.448,5	14.024,6	14.317,0	14.406,9	13.902,3
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	535.629,6	595.679,0	632.367,5	574.894,0	568.012,3
	e. Perkebunan Tahunan	23.248,9	23.985,8	25.515,3	25.399,2	25.256,5
	f. Peternakan	307.862,3	314.668,3	318.072,3	331.495,1	347.556,0
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	31.829,0	32.560,3	32.828,8	35.655,4	35.928,0
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	63.752,1	65.233,1	66.514,8	69.058,3	71.635,1
	3 Perikanan	61.324,4	65.856,7	69.813,6	75.683,4	79.693,9
B	Pertambangan dan Penggalian	95.918,1	97.861,6	100.263,1	101.804,8	102.422,6
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	95.918,1	97.861,6	100.263,1	101.804,8	102.422,6
C	Industri Pengolahan	2.060.040,2	2.011.903,8	2.138.364,4	2.224.275,1	2.276.303,3
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara				0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas				0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	983.955,1	935.172,7	1.013.260,1	1.116.885,1	1.161.311,1
	3 Pengolahan Tembakau	184.219,3	184.707,7	187.937,7	150.321,8	136.321,8
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	216.228,5	216.960,7	235.876,6	257.648,6	278.748,6
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	92.192,2	95.051,2	100.308,3	98.341,6	106.241,6
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	73.666,3	74.815,6	77.630,6	77.115,7	75.515,7
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	18.875,2	18.380,5	18.699,1	19.486,0	19.872,0
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	21.233,3	21.534,5	21.867,2	23.658,6	25.522,6
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	10.103,2	10.663,4	10.625,4	10.200,6	9.500,8
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	93.724,7	94.372,4	101.490,8	102.770,2	98.450,2
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	110.704,3	107.651,2	112.822,7	117.922,0	117.721,0
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	22.160,5	21.935,1	21.844,6	23.515,5	24.915,5
	14 Industri Alat Angkutan	2.520,3	2.617,2	2.590,0	2.350,3	2.185,3
	15 Industri Furnitur	188.271,1	184.639,9	187.940,4	181.179,8	176.117,8
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	42.186,3	43.401,7	45.470,8	42.879,2	43.879,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.681,5	20.649,1	21.910,9	22.804,9	22.797,5
	1 Ketenagalistrikan	18.508,6	20.464,2	21.712,2	22.597,1	22.587,2
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	172,9	184,9	198,7	207,8	210,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	11.738,3	12.151,7	12.222,4	12.649,0	13.022,1
F	Konstruksi	1.241.827,2	1.305.124,7	1.368.231,2	1.462.564,0	1.526.241,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.005.349,1	1.095.015,8	1.156.441,8	1.232.188,2	1.315.611,2
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	99.496,8	109.322,2	115.813,5	127.492,1	132.420,2
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	905.852,3	985.693,6	1.040.628,2	1.104.696,1	1.183.191,1
H	Transportasi dan Pergudangan	657.646,9	687.776,6	721.870,5	746.086,1	774.381,9
	1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Angkutan Darat	526.677,2	545.642,2	570.330,7	583.998,9	603.298,9
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	130.969,7	142.134,5	151.539,7	162.087,2	171.082,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.262.297,3	1.342.268,4	1.443.507,6	1.555.098,5	1.646.727,0
	1 Penyediaan Akomodasi	143.036,2	155.655,9	167.916,8	178.419,3	191.349,3
	2 Penyediaan Makan Minum	1.119.261,1	1.186.612,5	1.275.590,8	1.376.679,2	1.455.377,7
J	Informasi dan Komunikasi	1.159.756,3	1.277.883,8	1.358.556,6	1.454.258,1	1.536.406,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	306.893,3	314.929,7	351.945,0	390.477,1	423.450,3
	1 Jasa Perantara Keuangan	274.440,9	280.495,8	316.712,0	353.753,2	384.506,4
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	11.634,1	12.045,2	12.256,5	13.193,9	13.673,9
	3 Jasa Keuangan Lainnya	20.507,8	22.072,4	22.657,7	23.197,1	24.927,1
	4 Jasa Penunjang Keuangan	310,4	316,4	318,8	333,0	343,0
L	Real Estate	808.367,1	870.666,5	910.010,4	989.905,3	1.057.941,5
M,N	Jasa Perusahaan	68.846,2	73.135,3	76.405,4	81.440,8	87.194,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	840.956,5	910.575,3	959.446,7	1.010.099,0	1.063.245,3
P	Jasa Pendidikan	892.945,2	948.651,7	996.811,5	1.073.653,8	1.157.438,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	222.714,0	244.130,4	262.486,9	281.683,2	302.837,0
R,S,T,U	Jasa lainnya	265.292,0	281.174,5	296.218,9	315.933,2	342.511,4
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	12.728.666,3	13.407.021,8	14.138.719,3	14.867.408,8	15.610.514,3

TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN BANTUL SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,99	15,38	15,34	14,36	14,59
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	13,99	14,37	14,30	13,28	13,49
	a. Tanaman Pangan	5,92	6,01	5,50	4,95	5,32
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,53	0,52	0,52	0,42	0,42
	c. Perkebunan Semusim	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	4,48	4,77	5,25	4,90	4,71
	e. Perkebunan Tahunan	0,19	0,20	0,19	0,19	0,18
	f. Peternakan	2,50	2,49	2,48	2,44	2,50
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,26	0,27	0,26	0,28	0,26
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,50	0,48	0,47	0,46	0,47
	3 Perikanan	0,50	0,52	0,58	0,62	0,63
B	Pertambangan dan Penggalian	0,75	0,71	0,66	0,66	0,64
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,75	0,71	0,66	0,66	0,64
C	Industri Pengolahan	16,44	15,12	15,44	15,40	14,86
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,95	6,96	7,18	7,66	7,56
	3 Pengolahan Tembakau	1,49	1,55	1,65	1,39	1,18
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	1,74	1,68	1,77	1,81	1,82
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,74	0,75	0,76	0,69	0,69
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0,57	0,52	0,50	0,46	0,43
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,16	0,15	0,13	0,13	0,13
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,73	0,69	0,71	0,70	0,65
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0,84	0,79	0,77	0,75	0,70
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15
	14 Industri Alat Angkutan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
	15 Industri Furnitur	1,46	1,33	1,29	1,16	1,09
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	0,34	0,32	0,31	0,29	0,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,12	0,10	0,09	0,09
	1 Ketenagalistrikan	0,12	0,12	0,10	0,09	0,09
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,09	0,09	0,08	0,09	0,08
F	Konstruksi	9,53	9,51	9,37	9,66	9,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	8,18	8,52	8,35	8,41	8,39
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	0,82	0,86	0,87	0,86	0,86
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	7,37	7,66	7,48	7,55	7,52
H	Transportasi dan Pergudangan	5,09	4,97	4,89	4,88	4,80
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	4,02	3,86	3,81	3,81	3,72
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	1,06	1,11	1,09	1,07	1,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,99	10,32	10,97	11,49	11,70
	1 Penyediaan Akomodasi	1,17	1,24	1,32	1,31	1,35
	2 Penyediaan Makan Minum	8,82	9,08	9,65	10,18	10,35
J	Informasi dan Komunikasi	8,31	8,35	7,95	7,57	7,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,38	2,48	2,58	2,74	2,82
	1 Jasa Perantara Keuangan	2,13	2,22	2,34	2,50	2,59
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,16	0,17	0,16	0,15	0,15
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	6,27	6,35	6,25	6,41	6,48
M,N	Jasa Perusahaan	0,54	0,52	0,48	0,49	0,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	6,56	6,95	7,11	7,22	7,35
P	Jasa Pendidikan	6,94	6,79	6,65	6,79	7,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,78	1,81	1,80	1,78	1,82
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,04	2,03	1,96	1,97	1,99
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 4. LAJU PERTUMBUHAN PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)
0 0

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,98	5,73	2,66	-2,62	2,59
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	-2,24	5,80	2,56	-3,28	2,43
	a. Tanaman Pangan	-1,99	3,93	0,39	-1,31	4,27
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	4,85	1,63	0,94	-13,20	5,16
	c. Perkebunan Semusim	5,99	4,28	2,09	0,63	-3,50
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-5,90	11,21	6,16	-9,09	-1,20
	e. Perkebunan Tahunan	1,53	3,17	6,38	-0,46	-0,56
	f. Peternakan	1,70	2,21	1,08	4,22	4,84
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	-0,42	2,30	0,82	8,61	0,76
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,23	2,32	1,96	3,82	3,73
	3 Perikanan	1,32	7,39	6,01	8,41	5,30
B	Pertambangan dan Penggalian	5,18	2,03	2,45	1,54	0,61
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	5,18	2,03	2,45	1,54	0,61
C	Industri Pengolahan	4,70	-2,34	6,29	4,02	2,34
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,85	-4,96	8,35	10,23	3,98
	3 Pengolahan Tembakau	2,06	0,27	1,75	-20,02	-9,31
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	3,28	0,34	8,72	9,23	8,19
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	4,78	3,10	5,53	-1,96	8,03
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	-7,50	1,56	3,76	-0,66	-2,07
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	-3,94	-2,62	1,73	4,21	1,98
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7,38	1,42	1,55	8,19	7,88
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	4,56	5,54	-0,36	-4,00	-6,86
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	7,73	0,69	7,54	1,26	-4,20
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	8,71	-2,76	4,80	4,52	-0,17
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	3,44	-1,02	-0,41	7,65	5,95
	14 Industri Alat Angkutan	-1,40	3,85	-1,04	-9,26	-7,02
	15 Industri Furnitur	-2,84	-1,93	1,79	-3,60	-2,79
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	0,43	2,88	4,77	-5,70	2,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,64	10,53	6,11	4,08	-0,03
	1 Ketenagalistrikan	5,66	10,57	6,10	4,08	-0,04
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	3,50	6,93	7,45	4,62	1,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	3,50	3,52	0,58	3,49	2,95
F	Konstruksi	6,14	5,10	4,84	6,89	4,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	5,56	8,92	5,61	6,55	6,77
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	3,68	9,88	5,94	10,08	3,87
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5,77	8,81	5,57	6,16	7,11
H	Transportasi dan Pergudangan	3,60	4,58	4,96	3,35	3,79
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	3,06	3,60	4,52	2,40	3,30
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	5,84	8,52	6,62	6,96	5,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,04	6,34	7,54	7,73	5,89
	1 Penyediaan Akomodasi	8,35	8,82	7,88	6,25	7,25
	2 Penyediaan Makan Minum	6,88	6,02	7,50	7,92	5,72
J	Informasi dan Komunikasi	9,42	10,19	6,31	7,04	5,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,19	2,62	11,75	10,95	8,44
	1 Jasa Perantara Keuangan	14,85	2,21	12,91	11,70	8,69
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	6,14	3,53	1,75	7,65	3,64
	3 Jasa Keuangan Lainnya	10,60	7,63	2,65	2,38	7,46
	4 Jasa Penunjang Keuangan	4,76	1,92	0,78	4,43	3,00
L	Real Estate	6,12	7,71	4,52	8,78	6,87
M,N	Jasa Perusahaan	7,45	6,23	4,47	6,59	7,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	4,95	8,28	5,37	5,28	5,26
P	Jasa Pendidikan	7,66	6,24	5,08	7,71	7,80
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,42	9,62	7,52	7,31	7,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,30	5,99	5,35	6,66	8,41
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,07	5,33	5,46	5,15	5,00

TABEL 1. PDRB KABUPATEN GUNUNGKIDUL SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

28/04/20169:53

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.553.058,7	2.838.937,2	3.046.994,5	3.150.565,0	3.535.656,7
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	2.103.430,0	2.360.750,3	2.523.488,1	2.579.953,8	2.893.983,8
	a. Tanaman Pangan	1.272.856,5	1.414.887,1	1.439.232,6	1.421.015,0	1.654.410,2
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	6.898,8	7.286,8	8.097,9	7.688,8	8.291,0
	c. Perkebunan Semusim	3.159,1	3.471,8	3.764,8	4.241,7	4.493,2
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	294.045,7	344.722,4	415.139,3	422.137,3	442.591,4
	e. Perkebunan Tahunan	16.269,6	17.941,0	19.893,2	22.683,6	22.330,0
	f. Peternakan	466.173,6	523.620,3	584.180,9	642.772,5	700.251,6
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	44.026,6	48.820,9	53.179,5	59.414,8	61.616,5
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	370.615,5	391.254,0	421.629,6	456.036,4	513.727,3
	3 Perikanan	79.013,2	86.932,9	101.876,8	114.574,8	127.945,6
B	Pertambangan dan Penggalian	157.131,0	160.265,0	170.194,5	178.643,4	188.772,5
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	157.131,0	160.265,0	170.194,5	178.643,4	188.772,5
C	Industri Pengolahan	980.901,6	956.960,4	1.086.106,3	1.204.712,4	1.284.019,1
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara				0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas				0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	597.554,5	566.776,6	657.919,9	756.613,1	818.833,9
	3 Pengolahan Tembakau	556,1	629,5	731,7	717,7	684,1
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	12.161,1	13.213,7	15.787,6	17.761,0	19.618,4
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2.447,9	2.663,8	2.994,2	3.203,5	3.366,8
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	41.737,2	41.130,9	44.344,3	45.571,1	46.244,4
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	4.878,4	4.851,7	5.211,1	5.671,8	5.921,8
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	20.810,7	20.400,9	18.874,1	21.419,4	24.053,5
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3.277,4	3.641,2	3.862,5	4.169,9	3.936,4
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	80.064,3	80.422,8	93.029,3	102.467,1	104.925,5
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	46.678,2	48.697,4	52.076,8	56.260,6	57.098,5
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	16.176,2	16.755,3	17.263,2	18.909,4	20.086,2
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	120.369,5	121.090,6	133.734,0	129.259,2	133.428,5
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	34.190,1	36.686,1	40.277,5	42.688,7	45.821,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.898,5	8.037,1	7.563,4	7.950,4	8.244,5
	1 Ketenagalistrikan	7.768,9	7.888,5	7.406,0	7.788,1	8.083,6
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	129,6	148,6	157,4	162,3	161,0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	17.154,9	17.940,9	19.538,6	22.134,7	23.520,7
F	Konstruksi	907.213,7	1.004.221,5	1.109.379,3	1.218.556,4	1.328.853,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	853.292,6	935.267,2	1.002.567,1	1.114.233,7	1.216.309,9
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	44.412,6	47.740,6	54.972,2	60.536,0	65.967,5
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	808.880,0	887.526,6	947.594,8	1.053.697,7	1.150.342,4
H	Transportasi dan Pergudangan	522.613,5	551.034,8	603.119,4	659.675,5	707.695,0
	1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Angkutan Darat	419.228,0	436.353,3	478.073,4	520.332,7	553.254,7
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	103.385,5	114.681,5	125.046,0	139.342,8	154.440,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	511.066,1	544.434,6	628.770,2	726.389,4	813.608,1
	1 Penyediaan Akomodasi	8.774,1	9.997,9	11.963,7	13.190,2	15.062,6
	2 Penyediaan Makan Minum	502.291,9	534.436,8	616.806,5	713.199,2	798.545,6
J	Informasi dan Komunikasi	752.243,4	808.024,7	855.560,3	916.149,7	963.597,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	186.581,4	211.943,4	243.579,5	284.852,3	322.775,3
	1 Jasa Perantara Keuangan	162.805,8	185.896,6	214.873,4	253.061,6	288.479,6
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	9.623,1	10.479,7	10.996,3	12.354,6	13.212,4
	3 Jasa Keuangan Lainnya	14.075,9	15.484,4	17.624,0	19.340,3	20.982,9
	4 Jasa Penunjang Keuangan	76,7	82,8	85,8	95,8	100,3
L	Real Estate	319.618,4	351.999,1	385.700,5	430.299,2	474.733,5
M,N	Jasa Perusahaan	47.475,9	49.077,8	49.472,5	55.035,7	60.222,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	821.091,3	930.487,0	1.048.848,1	1.166.153,8	1.299.112,2
P	Jasa Pendidikan	598.781,8	629.714,2	678.669,5	772.874,0	876.367,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	186.776,4	208.238,4	227.171,6	247.287,8	277.851,2
R,S,T,U	Jasa lainnya	316.195,2	338.771,2	367.105,3	408.817,1	452.888,9
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.739.094,4	10.545.354,5	11.530.340,8	12.564.330,6	13.834.227,9

TABEL 2. PDRB KABUPATEN GUNUNGKIDUL SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

28/04/20169:53

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.354.431,5	2.452.276,5	2.508.677,4	2.493.155,8	2.557.403,2
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	1.931.021,7	2.016.569,9	2.066.846,4	2.039.894,2	2.087.324,1
	a. Tanaman Pangan	1.171.375,8	1.210.971,2	1.226.636,7	1.203.663,7	1.238.415,9
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	6.402,5	6.473,9	6.648,4	6.443,5	6.719,0
	c. Perkebunan Semusim	3.015,9	3.189,4	3.310,8	3.376,1	3.284,3
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	267.452,1	301.945,2	320.819,1	287.592,9	285.079,0
	e. Perkebunan Tahunan	14.745,1	14.871,4	15.887,7	16.088,2	15.476,2
	f. Peternakan	426.321,5	435.640,2	449.408,6	476.208,5	491.092,1
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	41.708,6	43.478,5	44.135,1	46.521,3	47.257,6
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	349.155,8	359.529,3	361.775,9	369.673,8	382.529,1
	3 Perikanan	74.254,1	76.177,4	80.055,1	83.587,8	87.550,0
B	Pertambangan dan Penggalian	149.800,0	151.107,6	158.455,7	160.985,2	161.383,4
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	149.800,0	151.107,6	158.455,7	160.985,2	161.383,4
C	Industri Pengolahan	926.817,9	895.217,6	968.727,9	1.008.531,4	1.035.143,9
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara				0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas				0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	555.775,5	523.204,0	576.211,1	614.314,3	644.235,3
	3 Pengolahan Tembakau	510,0	513,3	519,3	441,6	415,0
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	11.197,8	11.324,9	12.508,7	13.485,7	14.495,8
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2.350,6	2.477,3	2.640,8	2.683,9	2.814,1
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	40.088,3	40.593,6	42.682,7	42.615,2	41.981,3
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	4.837,2	4.695,9	4.810,5	5.007,7	5.112,1
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	21.466,2	22.062,6	21.919,6	23.629,0	25.342,3
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3.150,4	3.340,1	3.293,7	3.475,4	3.218,6
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	77.125,5	75.478,0	82.617,9	86.256,3	82.204,4
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	46.011,6	46.291,4	48.872,5	50.380,1	49.946,6
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	15.530,3	15.364,0	15.225,0	16.214,7	17.092,5
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	115.946,6	115.301,8	120.905,8	113.772,1	111.399,3
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	32.828,0	34.570,8	36.520,3	36.255,4	36.886,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.428,9	9.377,9	10.025,5	10.448,7	10.374,6
	1 Ketenagalistrikan	8.309,6	9.253,5	9.897,1	10.318,3	10.242,5
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	119,3	124,3	128,4	130,5	132,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	16.135,8	16.544,6	16.785,1	17.437,0	17.940,0
F	Konstruksi	854.604,5	904.779,7	945.650,5	993.510,4	1.036.792,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	809.291,2	866.000,1	910.271,7	971.903,7	1.038.835,3
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	41.691,2	43.606,0	46.176,0	50.812,5	52.659,0
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	767.599,9	822.394,1	864.095,7	921.091,2	986.176,3
H	Transportasi dan Pergudangan	510.643,6	523.854,8	548.633,4	561.987,4	582.657,8
	1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Angkutan Darat	416.218,6	424.133,5	443.223,9	449.507,6	463.407,5
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	94.424,9	99.721,2	105.409,5	112.479,8	119.250,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	484.415,3	507.494,2	549.675,6	596.989,2	635.346,4
	1 Penyediaan Akomodasi	7.968,2	8.645,8	9.427,3	9.863,8	10.592,9
	2 Penyediaan Makan Minum	476.447,1	498.848,4	540.248,3	587.125,5	624.753,5
J	Informasi dan Komunikasi	755.195,5	834.951,0	886.937,7	957.028,2	1.011.119,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	172.858,8	177.683,8	198.811,9	220.771,0	239.629,5
	1 Jasa Perantara Keuangan	150.692,5	154.282,9	174.194,0	194.619,7	211.890,4
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	9.165,6	9.442,9	9.596,0	10.261,8	10.669,1
	3 Jasa Keuangan Lainnya	12.930,5	13.886,0	14.948,5	15.811,0	16.988,9
	4 Jasa Penunjang Keuangan	70,1	72,0	73,4	78,4	81,0
L	Real Estate	309.495,8	326.602,0	341.097,1	368.705,2	393.209,3
M,N	Jasa Perusahaan	44.203,6	48.071,4	49.766,5	52.936,8	56.662,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	788.096,5	849.357,4	887.944,9	939.395,0	988.811,7
P	Jasa Pendidikan	577.556,2	610.113,9	640.146,6	692.197,5	744.844,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	173.332,8	192.216,6	208.405,4	223.760,5	239.841,1
R,S,T,U	Jasa lainnya	312.703,1	330.330,7	347.419,6	369.722,6	401.692,0
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.248.010,9	9.695.979,8	10.177.432,5	10.639.465,7	11.151.687,9

TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN GUNUNGKIDUL SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

28/04/20169:53

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,21	26,92	26,43	25,08	25,56
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	21,60	22,39	21,89	20,53	20,92
	a. Tanaman Pangan	13,07	13,42	12,48	11,31	11,96
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
	c. Perkebunan Semusim	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	3,02	3,27	3,60	3,36	3,20
	e. Perkebunan Tahunan	0,17	0,17	0,17	0,18	0,16
	f. Peternakan	4,79	4,97	5,07	5,12	5,06
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,45	0,46	0,46	0,47	0,45
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,81	3,71	3,66	3,63	3,71
	3 Perikanan	0,81	0,82	0,88	0,91	0,92
B	Pertambangan dan Penggalian	1,61	1,52	1,48	1,42	1,36
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1,61	1,52	1,48	1,42	1,36
C	Industri Pengolahan	10,07	9,07	9,42	9,59	9,28
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	6,14	5,37	5,71	6,02	5,92
	3 Pengolahan Tembakau	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,12	0,13	0,14	0,14	0,14
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0,43	0,39	0,38	0,36	0,33
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,21	0,19	0,16	0,17	0,17
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,82	0,76	0,81	0,82	0,76
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	0,48	0,46	0,45	0,45	0,41
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	1,24	1,15	1,16	1,03	0,96
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06
	1 Ketenagalistrikan	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,18	0,17	0,17	0,18	0,17
F	Konstruksi	9,32	9,52	9,62	9,70	9,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	8,76	8,87	8,70	8,87	8,79
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	0,46	0,45	0,48	0,48	0,48
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	8,31	8,42	8,22	8,39	8,32
H	Transportasi dan Pergudangan	5,37	5,23	5,23	5,25	5,12
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	4,30	4,14	4,15	4,14	4,00
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	1,06	1,09	1,08	1,11	1,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,25	5,16	5,45	5,78	5,88
	1 Penyediaan Akomodasi	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
	2 Penyediaan Makan Minum	5,16	5,07	5,35	5,68	5,77
J	Informasi dan Komunikasi	7,72	7,66	7,42	7,29	6,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,92	2,01	2,11	2,27	2,33
	1 Jasa Perantara Keuangan	1,67	1,76	1,86	2,01	2,09
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	3,28	3,34	3,35	3,42	3,43
M,N	Jasa Perusahaan	0,49	0,47	0,43	0,44	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	8,43	8,82	9,10	9,28	9,39
P	Jasa Pendidikan	6,15	5,97	5,89	6,15	6,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,92	1,97	1,97	1,97	2,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,25	3,21	3,18	3,25	3,27
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 4. LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN GUNUNGKIDUL SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

28/04/2016 9:53

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,22	4,16	2,30	-0,62	2,58
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	-1,57	4,43	2,49	-1,30	2,33
	a. Tanaman Pangan	-2,47	3,38	1,29	-1,87	2,89
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	5,20	1,12	2,69	-3,08	4,28
	c. Perkebunan Semusim	4,70	5,75	3,81	1,97	-2,72
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-4,20	12,90	6,25	-10,36	-0,87
	e. Perkebunan Tahunan	2,55	0,86	6,83	1,26	-3,80
	f. Peternakan	2,32	2,19	3,16	5,96	3,13
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,55	4,24	1,51	5,41	1,58
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,35	2,97	0,62	2,18	3,48
	3 Perikanan	0,53	2,59	5,09	4,41	4,74
B	Pertambangan dan Penggalian	7,13	0,87	4,86	1,60	0,25
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	7,13	0,87	4,86	1,60	0,25
C	Industri Pengolahan	5,42	-3,41	8,21	4,11	2,64
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,65	-5,86	10,13	6,61	4,87
	3 Pengolahan Tembakau	2,27	0,65	1,17	-14,96	-6,02
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	5,60	1,13	10,45	7,81	7,49
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5,60	5,39	6,60	1,63	4,85
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	-6,47	1,26	5,15	-0,16	-1,49
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	-4,11	-2,92	2,44	4,10	2,09
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	5,87	2,78	-0,65	7,80	7,25
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3,40	6,02	-1,39	5,52	-7,39
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	4,90	-2,14	9,46	4,40	-4,70
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	8,19	0,61	5,58	3,08	-0,86
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	4,10	-1,07	-0,90	6,50	5,41
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	0,85	-0,56	4,86	-5,90	-2,09
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan per	1,27	5,31	5,64	-0,73	1,74
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,36	11,26	6,91	4,22	-0,71
	1 Ketenagalistrikan	5,44	11,36	6,96	4,26	-0,73
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,03	4,25	3,27	1,61	1,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,81	2,53	1,45	3,88	2,88
F	Konstruksi	4,90	5,87	4,52	5,06	4,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	5,65	7,01	5,11	6,77	6,89
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	4,35	4,59	5,89	10,04	3,63
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5,72	7,14	5,07	6,60	7,07
H	Transportasi dan Pergudangan	3,31	2,59	4,73	2,43	3,68
	1 Angkutan Rel					
	2 Angkutan Darat	2,78	1,90	4,50	1,42	3,09
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	5,75	5,61	5,70	6,71	6,02
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,98	4,76	8,31	8,61	6,43
	1 Penyediaan Akomodasi	11,78	8,50	9,04	4,63	7,39
	2 Penyediaan Makan Minum	4,87	4,70	8,30	8,68	6,41
J	Informasi dan Komunikasi	13,30	10,56	6,23	7,90	5,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,34	2,79	11,89	11,05	8,54
	1 Jasa Perantara Keuangan	15,51	2,38	12,91	11,73	8,87
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	14,17	3,03	1,62	6,94	3,97
	3 Jasa Keuangan Lainnya	14,17	7,39	7,65	5,77	7,45
	4 Jasa Penunjang Keuangan	8,71	2,63	2,04	6,81	3,23
L	Real Estate	7,17	5,53	4,44	8,09	6,65
M,N	Jasa Perusahaan	8,97	8,75	3,53	6,37	7,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	4,95	7,77	4,54	5,79	5,26
P	Jasa Pendidikan	7,81	5,64	4,92	8,13	7,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,58	10,89	8,42	7,37	7,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,81	5,64	5,17	6,42	8,65
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,52	4,84	4,97	4,54	4,81

TABEL 1. PDRB KABUPATEN SLEMAN SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.074.187,9	2.290.986,4	2.534.773,3	2.574.199,3	2.855.879,0
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	1.959.424,9	2.163.196,1	2.393.150,1	2.419.559,8	2.682.871,0
	a. Tanaman Pangan	648.578,6	695.100,8	702.048,9	683.578,0	813.383,7
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	131.133,1	136.030,6	149.463,6	140.352,4	152.353,0
	c. Perkebunan Semusim	16.973,4	18.448,8	19.262,9	21.070,3	21.805,3
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	708.801,3	819.493,2	999.876,2	1.004.807,8	1.064.913,3
	e. Perkebunan Tahunan	18.478,0	21.000,6	22.815,8	24.708,2	24.483,1
	f. Peternakan	394.252,8	429.423,6	452.807,4	491.989,4	549.606,1
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	41.207,7	43.698,6	46.875,4	53.053,7	56.326,6
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	50.828,6	52.202,8	55.127,0	58.660,8	65.126,9
	3 Perikanan	63.934,4	75.587,5	86.496,2	95.978,8	107.881,1
B	Pertambangan dan Penggalian	113.929,1	116.627,4	122.599,9	137.850,2	147.413,2
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	113.929,1	116.627,4	122.599,9	137.850,2	147.413,2
C	Industri Pengolahan	3.525.819,9	3.564.850,8	4.021.392,5	4.310.924,1	4.539.798,3
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.561.161,8	1.471.990,4	1.693.806,6	1.932.243,4	2.092.675,7
	3 Pengolahan Tembakau	344.578,8	387.402,5	450.669,1	397.367,6	363.902,4
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	561.521,7	599.238,7	695.470,7	773.357,4	852.914,8
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	76.090,8	84.829,5	95.896,2	98.587,8	106.789,0
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	53.162,9	51.293,3	54.065,7	55.101,8	55.664,8
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	154.678,4	154.413,6	162.964,5	174.220,1	183.991,5
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	41.839,6	39.845,4	39.160,5	42.373,9	48.366,0
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	271.667,1	301.923,3	317.823,9	310.620,6	290.209,2
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	140.620,0	142.406,5	162.811,4	171.954,9	170.680,4
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	7.508,8	7.469,1	7.828,9	8.394,6	8.586,6
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	46.123,3	47.188,7	48.291,9	52.871,6	56.932,3
	14 Industri Alat Angkutan	584,4	625,2	633,3	588,2	545,0
	15 Industri Furnitur	153.947,0	152.603,2	159.815,9	157.488,1	161.589,8
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	112.335,3	123.621,4	132.154,0	135.754,2	146.951,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25.462,1	25.229,9	24.296,8	24.641,2	25.325,8
	1 Ketenagalistrikan	25.241,8	24.978,7	24.023,6	24.357,6	25.042,0
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	220,3	251,2	273,1	283,6	283,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	12.575,9	13.270,2	14.052,2	16.069,8	17.198,3
F	Konstruksi	2.672.609,9	2.892.462,5	3.109.586,7	3.339.673,5	3.631.128,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.770.478,2	1.935.808,7	2.103.955,9	2.292.696,9	2.507.164,1
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	408.938,1	447.595,8	512.528,6	554.589,7	607.429,2
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1.361.540,1	1.488.212,9	1.591.427,3	1.738.107,2	1.899.734,9
H	Transportasi dan Pergudangan	1.427.247,1	1.638.557,6	1.929.376,7	2.164.299,8	2.379.991,0
	1 Angkutan Rel	813,9	904,8	904,1	1.130,3	1.364,8
	2 Angkutan Darat	658.806,5	676.741,0	741.545,8	818.941,1	880.008,6
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	455.424,0	594.682,8	777.432,1	886.133,4	982.969,4
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	312.202,7	366.229,0	409.494,7	458.095,0	515.648,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.256.011,2	2.495.259,2	2.796.604,3	3.086.048,1	3.458.076,4
	1 Penyediaan Akomodasi	433.622,2	510.975,5	611.660,5	661.704,5	754.632,1
	2 Penyediaan Makan Minum	1.822.389,0	1.984.283,7	2.184.943,8	2.424.343,6	2.703.444,3
J	Informasi dan Komunikasi	2.145.998,4	2.343.189,4	2.470.222,7	2.612.761,5	2.731.066,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	647.864,9	726.674,2	860.246,4	993.408,7	1.115.223,3
	1 Jasa Perantara Keuangan	466.986,0	527.910,0	643.199,0	761.082,2	863.138,2
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	31.544,4	34.079,7	35.373,2	39.800,8	42.630,1
	3 Jasa Keuangan Lainnya	148.174,2	163.476,4	180.443,4	191.189,8	208.056,0
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1.160,3	1.208,2	1.230,8	1.335,9	1.399,0
L	Real Estate	1.832.978,6	2.014.600,3	2.129.836,5	2.383.940,9	2.629.348,2
M,N	Jasa Perusahaan	431.986,4	460.136,2	470.231,8	528.106,6	578.396,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.422.703,0	1.594.237,3	1.796.460,4	2.021.715,0	2.251.056,6
P	Jasa Pendidikan	2.342.505,6	2.459.108,3	2.644.487,8	2.943.821,9	3.346.591,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	533.367,0	590.589,7	646.475,9	701.977,8	791.283,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	528.640,6	570.660,8	620.762,9	680.848,8	751.294,1
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	23.764.365,7	25.732.248,9	28.295.362,8	30.812.984,1	33.756.235,6

TABEL 2. PDRB KABUPATEN SLEMAN SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.899.940,0	2.011.265,1	2.066.440,3	1.968.070,7	2.014.728,9
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	1.791.959,8	1.897.844,3	1.948.817,1	1.848.247,5	1.889.472,7
	a. Tanaman Pangan	576.837,8	599.738,3	600.435,8	582.884,2	607.870,0
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	123.482,7	124.027,7	125.358,5	112.232,1	117.691,7
	c. Perkebunan Semusim	16.196,9	16.947,0	17.344,3	17.469,9	16.919,4
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	645.992,4	718.451,4	763.259,2	674.276,7	664.643,7
	e. Perkebunan Tahunan	16.754,1	17.325,5	18.253,2	18.129,9	17.782,2
	f. Peternakan	374.588,4	382.773,9	385.219,2	401.635,5	421.027,9
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	38.107,3	38.580,5	38.947,0	41.619,1	43.537,8
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	48.628,9	49.464,7	50.127,0	51.327,0	52.917,8
	3 Perikanan	59.351,3	63.956,1	67.496,2	68.496,2	72.338,4
B	Pertambangan dan Penggalian	109.962,6	111.615,1	114.158,6	115.316,4	115.517,4
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	109.962,6	111.615,1	114.158,6	115.316,4	115.517,4
C	Industri Pengolahan	3.318.220,1	3.247.733,5	3.442.811,3	3.513.098,4	3.584.504,4
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.451.725,7	1.363.388,6	1.487.910,9	1.591.997,5	1.658.531,5
	3 Pengolahan Tembakau	318.276,3	316.664,9	319.922,3	254.690,4	230.803,3
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	520.817,1	522.484,2	565.470,7	609.964,2	657.725,2
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	71.209,0	74.386,1	78.896,2	78.843,1	85.213,8
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	51.251,1	51.347,7	52.844,0	52.799,4	51.640,4
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	153.023,8	150.050,8	152.023,0	158.512,2	161.418,5
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	43.071,4	44.422,5	43.933,6	46.733,3	50.459,8
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	266.795,2	280.290,2	280.007,2	264.777,6	241.434,6
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	134.496,0	132.837,3	143.311,4	145.151,6	136.284,9
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	7.373,2	7.081,4	7.378,9	7.536,8	7.529,5
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	43.975,5	44.028,3	43.791,9	46.862,7	50.012,0
	14 Industri Alat Angkutan	565,8	566,5	553,3	498,4	460,6
	15 Industri Furnitur	149.725,5	146.892,8	149.613,9	143.200,6	139.077,7
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	105.914,6	113.292,3	117.154,0	111.530,6	113.912,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27.942,7	30.687,6	32.747,5	32.897,8	32.369,2
	1 Ketenagalistrikan	27.741,8	30.478,7	32.523,6	32.668,3	32.134,4
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	200,9	209,0	223,8	229,6	234,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	11.898,0	12.402,5	12.547,3	13.051,2	13.445,4
F	Konstruksi	2.535.035,0	2.689.103,6	2.816.446,0	2.989.378,7	3.117.439,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.659.343,1	1.788.177,8	1.882.435,0	2.003.871,3	2.132.734,9
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	383.627,6	412.347,4	437.695,2	474.735,9	494.492,7
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1.275.715,5	1.375.830,4	1.444.739,7	1.529.135,4	1.638.242,2
H	Transportasi dan Pergudangan	1.370.422,6	1.486.851,7	1.621.175,8	1.708.682,4	1.783.984,4
	1 Angkutan Rel	808,9	826,1	809,0	862,5	931,2
	2 Angkutan Darat	648.184,0	657.299,0	687.115,5	711.859,4	739.902,5
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	437.199,0	515.711,0	597.096,7	631.131,2	650.043,1
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	284.230,8	313.015,5	336.154,7	364.829,3	393.107,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.128.690,7	2.273.315,2	2.435.074,3	2.581.614,6	2.746.288,4
	1 Penyediaan Akomodasi	391.364,2	436.712,6	472.561,4	494.344,9	533.855,6
	2 Penyediaan Makan Minum	1.737.326,5	1.836.602,6	1.962.512,9	2.087.269,7	2.212.432,8
J	Informasi dan Komunikasi	2.154.212,9	2.370.708,0	2.571.044,5	2.757.450,5	2.914.483,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	608.323,0	630.611,7	713.637,0	793.030,1	860.349,5
	1 Jasa Perantara Keuangan	440.522,0	452.063,0	522.438,0	594.972,0	647.965,3
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	29.924,9	30.624,4	31.252,6	33.351,5	34.707,1
	3 Jasa Keuangan Lainnya	136.772,3	146.825,1	158.837,1	163.538,7	176.472,8
	4 Jasa Penunjang Keuangan	1.103,7	1.099,2	1.109,3	1.167,9	1.204,2
L	Real Estate	1.766.791,0	1.923.376,6	2.019.632,4	2.188.665,9	2.336.477,3
M,N	Jasa Perusahaan	422.228,5	457.275,9	472.690,1	515.392,4	552.150,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.350.369,6	1.446.081,9	1.517.840,3	1.618.043,2	1.702.107,9
P	Jasa Pendidikan	2.256.431,2	2.370.403,3	2.470.132,9	2.681.853,4	2.893.218,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	499.901,9	550.302,6	593.989,7	641.582,9	690.675,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	526.138,9	557.200,8	584.611,3	618.537,2	669.199,2
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	22.645.851,9	23.957.112,8	25.367.414,2	26.740.537,1	28.159.673,9

TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN SLEMAN SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,73	8,90	8,96	8,35	8,46
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	8,25	8,41	8,46	7,85	7,95
	a. Tanaman Pangan	2,73	2,70	2,48	2,22	2,41
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,55	0,53	0,53	0,46	0,45
	c. Perkebunan Semusim	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2,98	3,18	3,53	3,26	3,15
	e. Perkebunan Tahunan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
	f. Peternakan	1,66	1,67	1,60	1,60	1,63
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,21	0,20	0,19	0,19	0,19
	3 Perikanan	0,27	0,29	0,31	0,31	0,32
B	Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,45	0,43	0,45	0,44
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,48	0,45	0,43	0,45	0,44
C	Industri Pengolahan	14,84	13,85	14,21	13,99	13,45
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	6,57	5,72	5,99	6,27	6,20
	3 Pengolahan Tembakau	1,45	1,51	1,59	1,29	1,08
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	2,36	2,33	2,46	2,51	2,53
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,32	0,33	0,34	0,32	0,32
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	0,22	0,20	0,19	0,18	0,16
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0,65	0,60	0,58	0,57	0,55
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,18	0,15	0,14	0,14	0,14
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1,14	1,17	1,12	1,01	0,86
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,59	0,55	0,58	0,56	0,51
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,19	0,18	0,17	0,17	0,17
	14 Industri Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Industri Furnitur	0,65	0,59	0,56	0,51	0,48
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	0,47	0,48	0,47	0,44	0,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
	1 Ketenagalistrikan	0,11	0,10	0,08	0,08	0,07
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	11,25	11,24	10,99	10,84	10,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	7,45	7,52	7,44	7,44	7,43
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	1,72	1,74	1,81	1,80	1,80
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5,73	5,78	5,62	5,64	5,63
H	Transportasi dan Pergudangan	6,01	6,37	6,82	7,02	7,05
	1 Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Angkutan Darat	2,77	2,63	2,62	2,66	2,61
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	1,92	2,31	2,75	2,88	2,91
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	1,31	1,42	1,45	1,49	1,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,49	9,70	9,88	10,02	10,24
	1 Penyediaan Akomodasi	1,82	1,99	2,16	2,15	2,24
	2 Penyediaan Makan Minum	7,67	7,71	7,72	7,87	8,01
J	Informasi dan Komunikasi	9,03	9,11	8,73	8,48	8,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,73	2,82	3,04	3,22	3,30
	1 Jasa Perantara Keuangan	1,97	2,05	2,27	2,47	2,56
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0,62	0,64	0,64	0,62	0,62
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Real Estate	7,71	7,83	7,53	7,74	7,79
M,N	Jasa Perusahaan	1,82	1,79	1,66	1,71	1,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	5,99	6,20	6,35	6,56	6,67
P	Jasa Pendidikan	9,86	9,56	9,35	9,55	9,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,24	2,30	2,28	2,28	2,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,22	2,22	2,19	2,21	2,23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 4. LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN SLEMAN SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,75	5,86	2,74	-4,76	2,37
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	-2,96	5,91	2,69	-5,16	2,23
	a. Tanaman Pangan	-3,62	3,97	0,12	-2,92	4,29
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	3,96	0,44	1,07	-10,47	4,86
	c. Perkebunan Semusim	5,84	4,63	2,34	0,72	-3,15
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-6,93	11,22	6,24	-11,66	-1,43
	e. Perkebunan Tahunan	3,19	3,41	5,35	-0,68	-1,92
	f. Peternakan	2,58	2,19	0,64	4,26	4,83
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	-1,02	1,24	0,95	6,86	4,61
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,12	1,72	1,34	2,39	3,10
	3 Perikanan	0,70	7,76	5,54	1,48	5,61
B	Pertambangan dan Penggalian	10,34	1,50	2,28	1,01	0,17
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	10,34	1,50	2,28	1,01	0,17
C	Industri Pengolahan	4,48	-2,12	6,01	2,04	2,03
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,70	-6,08	9,13	7,00	4,18
	3 Pengolahan Tembakau	1,04	-0,51	1,03	-20,39	-9,38
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	5,22	0,32	8,23	7,87	7,83
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	5,22	4,46	6,06	-0,07	8,08
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	-8,44	0,19	2,91	-0,08	-2,20
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	-4,10	-1,94	1,31	4,27	1,83
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	5,07	3,14	-1,10	6,37	7,97
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2,63	5,06	-0,10	-5,44	-8,82
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	6,72	-1,23	7,88	1,28	-6,11
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	9,46	-3,96	4,20	2,14	-0,10
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	2,04	0,12	-0,54	7,01	6,72
	14 Industri Alat Angkutan	-1,44	0,12	-2,32	-9,92	-7,58
	15 Industri Furnitur	-2,06	-1,89	1,85	-4,29	-2,88
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	1,26	6,97	3,41	-4,80	2,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,16	9,82	6,71	0,46	-1,61
	1 Ketenagalistrikan	8,17	9,87	6,71	0,44	-1,63
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	6,65	3,99	7,11	2,57	2,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	1,09	4,24	1,17	4,02	3,02
F	Konstruksi	6,11	6,08	4,74	6,14	4,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	4,80	7,76	5,27	6,45	6,43
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	2,75	7,49	6,15	8,46	4,16
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5,43	7,85	5,01	5,84	7,14
H	Transportasi dan Pergudangan	7,29	8,50	9,03	5,40	4,41
	1 Angkutan Rel	-26,36	2,14	-2,08	6,61	7,97
	2 Angkutan Darat	2,81	1,41	4,54	3,60	3,94
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara	16,09	17,96	15,78	5,70	3,00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	5,60	10,13	7,39	8,53	7,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,45	6,79	7,12	6,02	6,38
	1 Penyediaan Akomodasi	9,82	11,59	8,21	4,61	7,99
	2 Penyediaan Makan Minum	5,71	5,71	6,86	6,36	6,00
J	Informasi dan Komunikasi	9,76	10,05	8,45	7,25	5,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,08	3,66	13,17	11,13	8,49
	1 Jasa Perantara Keuangan	10,07	2,62	15,57	13,88	8,91
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	10,13	2,34	2,05	6,72	4,06
	3 Jasa Keuangan Lainnya	10,13	7,35	8,18	2,96	7,91
	4 Jasa Penunjang Keuangan	7,47	-0,41	0,92	5,28	3,11
L	Real Estate	4,64	8,86	5,00	8,37	6,75
M,N	Jasa Perusahaan	6,67	8,30	3,37	9,03	7,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	4,26	7,09	4,96	6,60	5,20
P	Jasa Pendidikan	7,12	5,05	4,21	8,57	7,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,22	10,08	7,94	8,01	7,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,64	5,90	4,92	5,80	8,19
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,42	5,79	5,89	5,41	5,31

TABEL 1. PDRB KOTA YOGYAKARTA SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37.691,7	40.074,5	43.311,0	41.997,7	45.039,0
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	37.046,6	39.375,9	42.548,4	41.196,6	44.183,8
	a. Tanaman Pangan	3.311,8	3.397,4	3.453,3	3.454,1	3.783,8
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	250,2	260,4	282,0	265,8	285,9
	c. Perkebunan Semusim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	4.954,0	4.975,9	5.634,2	6.155,8	6.592,5
	e. Perkebunan Tahunan	4,1	4,4	4,6	5,0	5,0
	f. Peternakan	27.780,6	29.967,3	32.347,2	30.488,8	32.682,6
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	746,0	770,5	827,1	827,2	834,0
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Perikanan	645,1	698,7	762,6	801,1	855,2
B	Pertambangan dan Penggalian	854,2	869,2	912,6	1.017,4	1.041,0
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	854,2	869,2	912,6	1.017,4	1.041,0
C	Industri Pengolahan	2.856.417,0	2.825.696,2	3.162.724,6	3.503.635,6	3.658.131,6
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara				0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas				0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.562.547,1	1.470.766,9	1.709.793,3	1.938.840,9	2.028.045,2
	3 Pengolahan Tembakau	30.039,6	33.368,8	38.895,7	36.540,7	33.792,9
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	122.833,8	135.091,8	165.768,4	178.274,8	193.756,4
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	87.965,4	101.668,6	116.816,4	123.869,1	134.743,1
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	11.128,5	11.122,5	11.796,0	11.811,5	12.077,2
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	66.791,4	65.791,6	70.357,6	79.210,4	83.205,0
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	4.694,4	4.562,4	4.301,1	4.487,4	5.034,8
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	14.986,8	15.309,8	15.819,0	15.284,2	14.325,5
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	6.680,5	7.047,7	8.094,6	8.606,6	9.005,0
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	597.688,7	604.269,9	633.192,9	684.596,4	691.446,5
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	293.371,6	316.374,2	322.943,7	355.834,5	382.482,6
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	26.013,5	25.898,9	26.798,9	26.305,7	27.381,5
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	31.675,6	34.423,0	38.146,9	39.973,5	42.835,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	36.589,8	36.436,5	34.920,0	36.563,0	37.974,4
	1 Ketenagalistrikan	36.409,5	36.227,4	34.694,3	36.320,2	37.732,7
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	180,3	209,0	225,7	242,7	241,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	30.470,2	31.958,4	34.604,5	39.433,3	42.035,3
F	Konstruksi	1.537.120,9	1.684.536,5	1.857.547,3	2.006.618,2	2.174.134,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.315.500,8	1.465.195,8	1.622.198,4	1.778.124,2	1.931.298,6
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	319.945,5	356.971,5	404.582,3	476.139,0	521.831,5
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	995.555,3	1.108.224,3	1.217.616,1	1.301.985,2	1.409.467,1
H	Transportasi dan Pergudangan	791.621,1	825.264,4	898.347,9	1.011.503,3	1.095.534,7
	1 Angkutan Rel	47.739,9	53.971,3	58.656,8	79.890,7	96.446,5
	2 Angkutan Darat	622.827,6	636.007,1	693.220,2	767.846,4	818.178,8
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	121.053,7	135.286,1	146.471,0	163.766,2	180.909,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.187.487,2	2.447.398,1	2.841.005,2	3.177.195,7	3.550.966,4
	1 Penyediaan Akomodasi	564.991,1	667.292,4	798.596,6	888.517,5	1.010.818,8
	2 Penyediaan Makan Minum	1.622.496,1	1.780.105,8	2.042.408,6	2.288.678,2	2.540.147,6
J	Informasi dan Komunikasi	2.392.731,9	2.585.689,5	2.658.361,7	2.675.115,1	2.799.355,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.105.231,7	1.236.641,9	1.446.245,6	1.607.978,4	1.787.494,2
	1 Jasa Perantara Keuangan	656.434,7	748.200,4	920.811,4	1.034.475,8	1.169.640,0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	166.666,1	181.515,7	191.523,8	213.675,8	226.695,4
	3 Jasa Keuangan Lainnya	277.572,8	302.199,0	328.952,3	354.266,1	385.333,2
	4 Jasa Penunjang Keuangan	4.558,1	4.726,8	4.958,1	5.560,7	5.825,6
L	Real Estate	1.722.458,6	1.929.863,5	2.077.702,6	2.304.808,7	2.519.071,1
M,N	Jasa Perusahaan	229.282,1	245.134,4	246.546,1	270.552,0	296.115,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.686.728,2	1.914.362,1	2.160.769,5	2.408.848,6	2.680.897,3
P	Jasa Pendidikan	1.842.339,5	1.938.828,6	2.018.579,1	2.251.404,1	2.535.454,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	711.393,4	775.467,0	831.318,6	903.928,4	1.016.645,1
R,S,T,U	Jasa lainnya	513.267,7	553.438,7	602.697,2	658.138,5	717.935,4
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	18.997.186,1	20.536.855,5	22.537.791,9	24.676.862,1	26.889.123,7

TABEL 2. PDRB KOTA YOGYAKARTA SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

0

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35.476,3	35.709,1	36.100,0	35.733,8	36.052,7
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	34.850,6	35.066,9	35.453,1	35.075,5	35.380,3
	a. Tanaman Pangan	3.139,6	3.163,1	3.165,9	3.119,4	3.166,7
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	231,1	231,9	234,2	232,7	235,8
	c. Perkebunan Semusim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	4.677,4	4.639,1	4.725,1	4.761,3	4.716,7
	e. Perkebunan Tahunan	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1
	f. Peternakan	26.073,6	26.298,5	26.588,5	26.226,3	26.524,7
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	724,9	730,2	735,2	731,6	732,3
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Perikanan	625,7	642,2	647,0	658,3	672,4
B	Pertambangan dan Penggalian	831,3	837,1	839,0	850,0	851,2
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	831,3	837,1	839,0	850,0	851,2
C	Industri Pengolahan	2.708.581,3	2.630.976,6	2.813.952,7	2.943.834,5	2.995.839,5
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. Industri Batu Bara				0,0	0,0
	b. Industri Pengilangan Migas				0,0	0,0
	2 Industri Makanan dan Minuman	1.455.485,3	1.380.446,8	1.515.575,9	1.614.793,0	1.633.407,2
	3 Pengolahan Tembakau	27.700,2	27.072,6	27.429,3	22.827,9	20.682,3
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	112.848,6	114.305,4	128.688,5	134.580,7	142.673,0
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	84.081,9	88.581,9	94.675,5	95.294,4	103.412,9
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan B	10.434,9	10.479,5	10.817,4	10.576,4	10.410,3
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	65.768,1	63.915,7	64.838,9	67.248,8	68.700,6
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	4.793,8	4.916,9	4.786,6	4.946,6	5.245,7
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	13.993,2	13.883,8	13.771,4	12.821,8	11.796,7
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	6.474,9	6.643,3	7.155,8	7.253,2	7.066,1
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang El	586.329,5	566.949,3	592.985,5	604.042,1	601.150,8
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	285.116,8	296.561,9	293.377,0	311.670,4	333.074,6
	14 Industri Alat Angkutan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15 Industri Furnitur	25.187,0	24.792,1	25.150,5	23.971,7	23.593,0
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	30.367,2	32.427,3	34.700,3	33.807,4	34.626,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	40.841,2	45.056,7	47.599,0	49.150,8	48.689,7
	1 Ketenagalistrikan	40.675,8	44.883,4	47.416,0	48.957,0	48.491,9
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	165,4	173,2	183,0	193,7	197,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	29.241,9	30.166,8	30.712,0	31.963,4	32.797,8
F	Konstruksi	1.458.032,3	1.526.571,8	1.600.097,5	1.674.189,0	1.740.508,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	1.247.376,9	1.326.260,7	1.407.238,6	1.468.894,1	1.552.644,8
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	297.242,2	322.298,5	340.394,6	359.016,1	373.699,6
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	950.134,7	1.003.962,2	1.066.844,0	1.109.877,9	1.178.945,2
H	Transportasi dan Pergudangan	771.849,8	785.335,2	815.841,3	838.086,9	870.914,5
	1 Angkutan Rel	47.514,1	48.470,6	47.936,7	57.131,8	61.691,1
	2 Angkutan Darat	612.534,7	618.719,0	644.133,5	646.826,9	667.836,5
	3 Angkutan Laut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	111.801,0	118.145,5	123.771,1	134.128,2	141.386,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.036.971,2	2.183.269,6	2.320.365,4	2.450.064,8	2.596.749,8
	1 Penyediaan Akomodasi	521.611,1	585.034,6	635.310,9	666.200,6	716.829,4
	2 Penyediaan Makan Minum	1.515.360,1	1.598.235,0	1.685.054,6	1.783.864,2	1.879.920,4
J	Informasi dan Komunikasi	2.393.738,0	2.654.507,8	2.779.291,4	2.900.953,3	3.041.921,6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.034.826,8	1.077.853,5	1.196.258,9	1.275.249,8	1.374.111,3
	1 Jasa Perantara Keuangan	619.895,3	641.889,1	750.030,2	809.405,0	880.574,7
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	158.665,1	163.399,4	167.205,4	179.444,2	185.159,7
	3 Jasa Keuangan Lainnya	252.131,6	268.467,3	274.958,1	282.049,0	303.891,0
	4 Jasa Penunjang Keuangan	4.134,8	4.097,8	4.065,2	4.351,7	4.485,9
L	Real Estate	1.659.929,6	1.782.655,3	1.848.546,3	1.973.548,8	2.089.601,9
M,N	Jasa Perusahaan	218.718,3	238.288,9	245.485,7	259.521,0	278.211,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	1.612.448,2	1.729.732,9	1.813.729,6	1.921.203,7	2.019.480,1
P	Jasa Pendidikan	1.785.435,5	1.889.249,1	1.960.166,2	2.088.605,8	2.231.519,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	667.109,6	721.038,9	766.206,6	818.611,5	879.118,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	504.681,6	531.565,1	557.127,4	581.682,5	623.162,3
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	18.206.089,7	19.189.074,8	20.239.557,7	21.312.143,8	22.412.175,7

TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KOTA YOGYAKARTA SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,20	0,20	0,19	0,17	0,17
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	0,20	0,19	0,19	0,17	0,16
	a. Tanaman Pangan	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Perkebunan Semusim					
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
	e. Perkebunan Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f. Peternakan	0,15	0,15	0,14	0,12	0,12
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu					
	3 Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	15,04	13,76	14,03	14,20	13,60
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	8,23	7,16	7,59	7,86	7,54
	3 Pengolahan Tembakau	0,16	0,16	0,17	0,15	0,13
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,65	0,66	0,74	0,72	0,72
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,46	0,50	0,52	0,50	0,50
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	0,35	0,32	0,31	0,32	0,31
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	3,15	2,94	2,81	2,77	2,57
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	1,54	1,54	1,43	1,44	1,42
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,18	0,15	0,15	0,14
	1 Ketenagalistrikan	0,19	0,18	0,15	0,15	0,14
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16
F	Konstruksi	8,09	8,20	8,24	8,13	8,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	6,92	7,13	7,20	7,21	7,18
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	1,68	1,74	1,80	1,93	1,94
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	5,24	5,40	5,40	5,28	5,24
H	Transportasi dan Pergudangan	4,17	4,02	3,99	4,10	4,07
	1 Angkutan Rel	0,25	0,26	0,26	0,32	0,36
	2 Angkutan Darat	3,28	3,10	3,08	3,11	3,04
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos	0,64	0,66	0,65	0,66	0,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,51	11,92	12,61	12,88	13,21
	1 Penyediaan Akomodasi	2,97	3,25	3,54	3,60	3,76
	2 Penyediaan Makan Minum	8,54	8,67	9,06	9,27	9,45
J	Informasi dan Komunikasi	12,60	12,59	11,80	10,84	10,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,82	6,02	6,42	6,52	6,65
	1 Jasa Perantara Keuangan	3,46	3,64	4,09	4,19	4,35
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0,88	0,88	0,85	0,87	0,84
	3 Jasa Keuangan Lainnya	1,46	1,47	1,46	1,44	1,43
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
L	Real Estate	9,07	9,40	9,22	9,34	9,37
M,N	Jasa Perusahaan	1,21	1,19	1,09	1,10	1,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	8,88	9,32	9,59	9,76	9,97
P	Jasa Pendidikan	9,70	9,44	8,96	9,12	9,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,74	3,78	3,69	3,66	3,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,70	2,69	2,67	2,67	2,67
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TABEL 4. LAJU PERTUMBUHAN PDRB KOTA YOGYAKARTA SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,88	0,66	1,09	-1,01	0,89
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Perta	0,86	0,62	1,10	-1,07	0,87
	a. Tanaman Pangan	-0,58	0,75	0,09	-1,47	1,52
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	-1,86	0,35	0,98	-0,64	1,32
	c. Perkebunan Semusim					
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-0,94	-0,82	1,86	0,76	-0,94
	e. Perkebunan Tahunan	0,96	1,08	1,33	0,83	-1,41
	f. Peternakan	1,35	0,86	1,10	-1,36	1,14
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	2,25	0,74	0,68	-0,49	0,10
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu					
	3 Perikanan	1,90	2,63	0,75	1,76	2,14
B	Pertambangan dan Penggalian	5,11	0,70	0,23	1,31	0,14
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi					
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit					
	3 Pertambangan Bijih Logam					
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	5,11	0,70	0,23	1,31	0,14
C	Industri Pengolahan	6,41	-2,87	6,95	4,62	1,77
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas					
	a. Industri Batu Bara					
	b. Industri Pengilangan Migas					
	2 Industri Makanan dan Minuman	7,00	-5,16	9,79	6,55	1,15
	3 Pengolahan Tembakau	1,85	-2,27	1,32	-16,78	-9,40
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	6,91	1,29	12,58	4,58	6,01
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	3,56	5,35	6,88	0,65	8,52
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Ba	-8,90	0,43	3,22	-2,23	-1,57
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan	-2,71	-2,82	1,44	3,72	2,16
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2,18	2,57	-2,65	3,34	6,05
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-2,29	-0,78	-0,81	-6,90	-7,99
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	3,12	2,60	7,72	1,36	-2,58
	11 Industri Logam Dasar					
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Ele	9,19	-3,31	4,59	1,86	-0,48
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	4,03	4,01	-1,07	6,24	6,87
	14 Industri Alat Angkutan					
	15 Industri Furnitur	-2,91	-1,57	1,45	-4,69	-1,58
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pe	1,93	6,78	7,01	-2,57	2,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,82	10,32	5,64	3,26	-0,94
	1 Ketenagalistrikan	5,83	10,34	5,64	3,25	-0,95
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	4,83	4,70	5,63	5,89	2,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan	0,29	3,16	1,81	4,07	2,61
F	Konstruksi	4,67	4,70	4,82	4,63	3,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	2,64	6,32	6,11	4,38	5,70
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi	2,72	8,43	5,61	5,47	4,09
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	2,62	5,67	6,26	4,03	6,22
H	Transportasi dan Pergudangan	0,46	1,75	3,88	2,73	3,92
	1 Angkutan Rel	-25,42	2,01	-1,10	19,18	7,98
	2 Angkutan Darat	2,46	1,01	4,11	0,42	3,25
	3 Angkutan Laut					
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan					
	5 Angkutan Udara					
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos k	4,67	5,67	4,76	8,37	5,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,99	7,18	6,28	5,59	5,99
	1 Penyediaan Akomodasi	9,41	12,16	8,59	4,86	7,60
	2 Penyediaan Makan Minum	4,87	5,47	5,43	5,86	5,38
J	Informasi dan Komunikasi	8,17	10,89	4,70	4,38	4,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,01	4,16	10,99	6,60	7,75
	1 Jasa Perantara Keuangan	10,36	3,55	16,85	7,92	8,79
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	9,10	2,98	2,33	7,32	3,19
	3 Jasa Keuangan Lainnya	9,77	6,48	2,42	2,58	7,74
	4 Jasa Penunjang Keuangan	7,77	-0,90	-0,79	7,05	3,08
L	Real Estate	4,62	7,39	3,70	6,76	5,88
M,N	Jasa Perusahaan	6,22	8,95	3,02	5,72	7,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	4,73	7,27	4,86	5,93	5,12
P	Jasa Pendidikan	7,63	5,81	3,75	6,55	6,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,15	8,08	6,26	6,84	7,39
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,80	5,33	4,81	4,41	7,13
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,84	5,40	5,47	5,30	5,16

